

**GERAKAN SOSIAL DALAM BIDANG LINGKUNGAN
(Studi pada Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) di TPST Bantargebang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Program Studi Sosiologi



Disusun Oleh :

AMELIA AULIA RAHMA

NIM. 1906026011

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Amelia Aulia Rahma

NIM : 1906026011

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Gerakan Sosial dalam Bidang Lingkungan (Studi pada Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) di TPST Bantargebang)

Semarang, 31 Agustus 2023

Pembimbing, Bidang Metodologi, Substansi
Materi, & Tatatulis


Drs. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.

NIP.196201071999032001

PERNYATAAN

Dengan ini saya Amelia Aulia Rahma menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu universitas atau perguruan tinggi di Lembaga Pendidikan lainnya. Temuan dan sumber dari hasil publikasi atau tidak dipublikasikan dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 31 Agustus 2023



Amelia Aulia Rahma

NIM. 1906026011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gerakan Sosial dalam Bidang Lingkungan (Studi pada Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) di TPST Bantargebang)” dengan tepat waktu.

Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam peneliti mengucapkan terima kasih begitu besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Drs. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sekaligus Wali Dosen dan Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, serta tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi hingga tahap akhir.
3. Bapak Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu peneliti selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan membantu peneliti selama proses menempuh Pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Jamalludin S.H, Bapak Deddy, Abdul Hasan, Iwan, Ibu Suminah, Bapak Romin, dan Ibu Kasur yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan dan telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian skripsi.
6. Bapak Roy Sihombing selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan dan telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian skripsi.
7. Kedua orang tua peneliti (H. Sukandi & Hj. Eny Rahmawati) dua orang hebat yang selalu menjadi penyemangat peneliti sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan kasih serta

selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan putrimu yang selalu disertai dengan do'a dan dukungan Mamah dan Bapak sehingga bisa sampai dititik ini. Semoga sehat selalu dan panjang umur supaya selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup putrimu.

8. Kepada ketiga saudara tersayang Aditya Yuliansyah, Rizki Endika, dan Ade Irma Andiani. Terima kasih atas segala do'a, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada adik terakhir ini.
9. Nenek dan Kakek tercinta Alm. Kakek Amin, Almh. Nenek Inah, Alm. Mbah Hatib, Almh. Mbah Jamilatun yang telah menjadi salah satu penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
10. Ramasepta Athallah sebagai partner special peneliti, terima kasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani dan meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal baik untuk meraih segala sesuatu yang menjadi impian peneliti.
11. Teman-teman Bekasi peneliti Lutiana Nur Hidayah, Salsabila Alifa Kurnia, Laily Roudhotul Jannah, dan Nadya Aprilia Niode yang telah memberi semangat dan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi.
12. Teman-teman Semarang peneliti Dinda Ayu Wulandari, Layun Zizana Agathis, Rizky Septi Permana, Nisrina Laila Hanifah, Chantika Avifah Nurachmad, Aliffah Khoirunnisa, dan Ramadhani Kharisma Asri yang selalu menghibur dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi.
13. Teman-teman KKN MIT-14 Kelompok 28 yaitu Ramasepta Athallah, Aulia Filazofah, Erlangga Nabil Nurfalih, Renaldo Syahputra, Nisrina Laila Hanifah, Ayu Nindika Parastuti, Rahayu Octavianti Dewi, Atik Dina Sabila Anjani, Ika Nur Indra, Dian Arianti, M. Dhiya Ulhaq, M. Khabiburohman yang telah memberikan semangat dan dukungan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman PPL LRC-KJHAM yaitu Dheasyinta R, Ruki, Prisma Khusuma W, Adinda Rizka A, Layun Zizana A, Ramadhani Kharisma A, dan Laeli Muftichana yang telah memberikan semangat serta dukungan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

15. Teman-teman Sosiologi A Angkatan 2019 yang telah menjadi bagian dari perjalanan peneliti selama menempuh Pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
16. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Peneliti ucapkan terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.

Demikian ucapan terima kasih yang berlimpah kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala niat dan perilaku baik yang telah diberikan kepada peneliti sebagai bentuk kasih sayang menjadi berkah untuk kita semua dan setiap kebaikan dibalas berkali lipat oleh Allah SWT. Di samping itu, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti memohon untuk diberikan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki skripsi ini.

Semarang, 31 Agustus 2023



Amelia Aulia Rahma

NIM. 1906026011

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tersayang.

Teruntuk Bapak H. Sukandi dan Hj. Ibu Eny Rahmawati yang sudah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh cinta dan kasih sayang hingga saat ini. Terima kasih Mamah dan Bapak atas pengorbanan dan perjuangannya selama ini dalam memberikan yang terbaik.

Semoga Mamah dan Bapak diberikan keberkahan, kesehatan lahir batin, panjang umur, rezeki yang berlimpah dan bisa selalu menemani putri bungsunya hingga tua nanti. Kalian selalu menjadi prioritas utama saya dalam setiap langkah.

Serta untuk Almamater Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, semoga kedepannya bisa menjadi lebih unggul dan melahirkan generasi penerus bangsa yang kreatif dan inovatif.

MOTTO

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Membukakan jalan keluar baginya, dan Dia Memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah Melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

(Qs. At-Talaq: 2-3)

ABSTRAK

Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara di TPST Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk diteliti. Gerakan Masyarakat Bantargebang (Gerbang Nusa) terbentuk karena masyarakat setempat dengan memiliki tujuan menampung setiap aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan dan menuntut setiap hak masyarakat yang tidak terpenuhi dengan melakukan berbagai upaya agar memberikan keuntungan dan meminimalisir kerugian yang didapatkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keresahan yang dialami oleh masyarakat kemudian diatasi oleh Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) dengan upaya baik dari segi lingkungan, social, dan ekonomi, sehingga dapat memberikan dampak yang baik sebagai bentuk sebuah transformasi pada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara dengan teknik purposive yang melibatkan ketua Gerbang Nusa, masyarakat yang menjadi anggota Gerbang Nusa, dan Institusi Pemerintahan. Sementara itu, data dalam penelitian ini dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keresahan masyarakat timbul karena disebabkan oleh hadirnya TPST Bantargebang yang mencakup bidang lingkungan, kesehatan, social, dan ekonomi. Gerbang Nusa melakukan beberapa upaya dengan melibatkan beberapa pihak didalamnya seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mengambil serta menetapkan keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan keuntungan yang mampu didapatkan oleh masyarakat. Adapun dampak yang dihasilkan dari upaya tersebut, dalam bidang lingkungan armada pengangkut sampah menjadi lebih tertib dan disiplin dalam mengangkut sampah sesuai dengan kapasitas armada. Dalam bidang social, Badan Pengawas Keuangan (BPK) menanggapi laporan gagal konstruksi yang dilakukan oleh team monev, kemacetan dapat terurai karena armada tidak parkir di bahu jalan, oknum guru di skorsing akibat melakukan pungutan liar dalam system PPDB dan masyarakat setempat dapat menjadi bagian dari anggota team monev. Dalam bidang ekonomi, pembagian BLT tersebar secara merata dan adil, tersedianya lapangan pekerjaan sehingga perekonomian masyarakat dapat stabil dan jalan pikiran masyarakat terbuka karena diberikan edukasi oleh Gerbang Nusa.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Masyarakat, dan Lingkungan

ABSTRACT

The Bantargebang Nusantara Social Movement at the Bantargebang TPST, Bantargebang District, Bekasi City is an interesting phenomenon to study. The Bantargebang Social Movement (Gerbang Nusa) was formed because the local community had the aim of accommodating every community aspiration that had not been conveyed and demanding every community right that was not fulfilled by making various efforts to provide profits and minimize the losses obtained. Therefore, this research aims to describe the unrest experienced by the community and then overcome by the Bantargebang Nusantara Social Movement (Gerbang Nusa) with efforts both from an environmental, social and economic perspective, so that it can have a good impact as a form of transformation in society.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. This type of research is field research using two data sources, namely primary and secondary. The data in this research was obtained through observation, interviews and documentation. In collecting data, researchers conducted interviews using a purposive technique involving the chairman of Pintu Nusa, people who are members of Gerbang Nusa, and government institutions. Meanwhile, the data in this research was analyzed by means of data reduction, data presentation and conclusions.

The results of this research show that public unrest arises because of the presence of the Bantargebang TPST which covers the environmental, health, social and economic sectors. Gerbang Nusa has made several efforts by involving several parties, such as the Department of Transportation (Dishub), the Department of the Environment (DLH), and the Bekasi City Education Department in making and determining the right decisions by considering the benefits that can be obtained by the community. As for the impact resulting from these efforts, in the environmental sector, waste transport fleets have become more orderly and disciplined in transporting waste according to fleet capacity. In the social sector, the Financial Supervisory Agency (BPK) responded to reports of construction failures carried out by the monitoring and evaluation team, traffic jams could be broken down because the fleet was not parked on the side of the road, teachers were suspended due to illegal levies in the PPDB system and local communities could become part of the members. money team. In the economic sector, the distribution of BLT is distributed evenly and fairly, job opportunities are available so that the community's economy can be stable and people's minds are open because of the education provided by Gerbang Nusa.

Keywords: Social Movements, Society and Environment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II GERAKAN SOSIAL, MASYARAKAT, LINGKUNGAN, DAN TEORI MOBILISASI SUMBER DAYA MCCARTHY DAN MAYER ZALD	21
A. Gerakan Sosial, Masyarakat, Lingkungan	21
1. Gerakan Sosial	21
2. Masyarakat	26
3. Lingkungan	29
4. Gerakan Sosial dalam Perspektif Islam	32
B. Teori Mobilisasi Sumber Daya McCarthy dan Mayer Zald	33
1. Konsep Teori Mobilisasi Sumber Daya McCarthy dan Mayer Zald	33
2. Asumsi Dasar Teori	40
3. Istilah-Istilah Kunci Teori	40
BAB III GERAKAN MASYARAKAT BANTARGEBAH	42
A. Gambaran Umum Lokasi Gerakan Masyarakat Bantargebah	42
1. Kondisi Geografis	42
2. Kondisi Topografi, dan Geomorfologi	44

3. Kondisi Demografis.....	45
4. Profil Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Bantargebang	50
B. Profil Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (GERBANG NUSA)	54
1. Sejarah Berdirinya Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara.....	54
2. Legalitas , Visi dan Misi, Tujuan Gerakan Masyarakat Bantargebang	55
3. Fungsi, Tugas, dan Kewajiban Gerakan Masyarakat Bantargebang	57
4. Kegiatan Perkumpulan Gerakan Masyarakat Bantargebang	59
5. Struktur Organisasi dan Ketentuan Pembubaran Gerakan Masyarakat Bantargebang.....	60
BAB IV LATAR BELAKANG GERAKAN MASYARAKAT BANTARGEBOANG NUSANTARA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN	63
A. Keresahan dalam Bidang Lingkungan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi.....	63
1. Keresahan dalam Bidang Lingkungan.....	63
2. Keresahan dalam Bidang Kesehatan	69
3. Keresahan dalam Bidang Sosial	73
4. Keresahan dalam Bidang Ekonomi	76
B. Upaya Gerbang Nusantara dalam Mengatasi Keresahan Masyarakat	81
1. Upaya yang Dilakukan dalam Bidang Lingkungan.....	81
2. Upaya yang Dilakukan dalam Bidang Sosial	83
3. Upaya yang Dilakukan dalam Bidang Ekonomi.....	85
BAB V DAMPAK GERAKAN MASYARAKAT BANTARGEBOANG NUSANTARA TERHADAP MASYARAKAT	90
A. Dampak dalam Bidang Sosial dan Ekonomi yang Dihasilkan Melalui Upaya Gerakan Masyarakat Bantargebang.....	90
1. Dampak dalam Bidang Sosial.....	90
2. Dampak dalam Bidang Ekonomi.....	95
B. Dampak dalam Bidang Lingkungan yang Dihasilkan Melalui Upaya Gerakan Masyarakat Bantargebang.....	99
1. Tertib dalam Berkendara	99
2. Disiplin dan Menaati Peraturan	102
BAB VI PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Wilayah Kecamatan Bantargebang.....	43
Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan Bantargebang.....	43
Tabel 3. Tinggi Wilayah dan Letak Geografis Kecamatan Bantargebang	44
Tabel 4. Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin.....	45
Tabel 5. Jumlah Mutasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 6. Rasio Penduduk Kecamatan Bantargebang Berdasarkan Umur.....	46
Tabel 7. Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	48
Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	49
Tabel 10. Fasilitas Sekolah di Kecamatan Bantargebang (2019-2021).....	50
Tabel 11. Fasilitas Kesehatan Kecamatan Bantargebang (2019-2021)	51
Tabel 12. Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Bantargebang	51
Tabel 13. Produksi Tanaman Sayuran (Kuintal).....	52
Tabel 14. Produksi Buah-buahan Semusim (Kuintal)	52
Tabel 15. Produksi Tanaman Biofarmaka (Kg).....	53
Tabel 16. Jenis Sarana Perdagangan (2021)	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Bantargebang	42
Gambar 2. Peta Topografi Kecamatan Bantargebang.....	44
Gambar 3. Logo Gerakan Masyarakat Bantargebang (Gerbang).....	54
Gambar 4. Struktur Organisasi Gerakan Masyarakat Bantargebang	60
Gambar 5. Armada Pengangkut Sampah Tidak Safety.....	64
Gambar 6. Armada Pengangkut Sampah Melebihi Muatan.....	65
Gambar 7. Sungai Berwarna Keruh	66
Gambar 8. Rusaknya Estetika Lingkungan.....	66
Gambar 9. Mind Mapping Keresahan dalam Bidang Lingkungan	67
Gambar 10. Jalan Bergelombang dan Berlubang.....	68
Gambar 11. Dampak Negatif TPST Bantargebang.....	68
Gambar 12. Gangguan Kesehatan Masyarakat	71
Gambar 13. Mind Mapping Keresahan dalam Bidang Kesehatan.....	72
Gambar 14. Mind Mapping Keresahan dalam Bidang Sosial.....	75
Gambar 15. Mind Mapping Keresahan dalam Bidang Ekonomi.....	78
Gambar 16. 1 Tanggapan BPK Terhadap Laporan Dugaan Gagal Konstruksi	91
Gambar 17. 1 Mind Mapping Dampak dalam Bidang Sosial	94
Gambar 18. 1 Mind Mapping Dampak dalam Bidang Ekonomi	99
Gambar 19. 1 Mind Mapping Dampak dalam Bidang Lingkungan.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan sosial merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memiliki berbagai macam kepentingan yang pada dasarnya ingin dituju secara bersama. Terciptanya sebuah gerakan sosial didasarkan pada persamaan latar belakang profesi, kondisi lingkungan, status sosial ekonomi, rendahnya sumber daya, tidak adanya kesetaraan gender, ataupun terkait dengan upah pekerja (Haris & dkk, 2019). Adapun contoh gerakan sosial dimasyarakat. Pertama, mengenai Gerakan Sosial Wanita Bisa merupakan sebuah gerakan yang mendukung perempuan supaya bisa lebih berdaya dan kreatif. Kedua, mengenai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Launching GARASI (Gerakan Sadar Demokrasi). Ketiga, mengenai Gerakan Masyarakat Berbagi dan Peduli (GEMA BALI) pada masa Covid-19. Berdasarkan deskripsi tersebut gerakan sosial yang terjadi di ruang lingkup masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi dan mencapai suatu tujuan tertentu.

Gerakan sosial telah diteliti oleh banyak tokoh, penelitian oleh Abraham Geraldine, Muhammad Ali Azhar, dan Piers Andreas Noak membahas mengenai pendekatan gerakan sosial baru dalam gerakan reduksi sampah plastik di Bali. Hadirnya ruang demokratis yang membuka sebuah peluang artikulasi kepentingan lingkungan supaya dapat terakomodir dengan sesuai. Dalam kemajuan demokrasi ini timbul sebuah aktivitas sosial baru yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatasi keberpihakan serta kehancuran lingkungan. Kampanye Pulau Plastik ialah sebuah kelompok yang bergerak dalam bidang lingkungan dengan fokus pada mobilitasnya terhadap sampah plastik yang digunakan sekali pakai oleh masyarakat di Bali. Strategi yang digunakan dalam pengurangan sampah plastik terbagi menjadi 3 tahapan: Pertama, memproduksi empat seri film Pulau Plastik.

Kedua, melakukan proses *screening* kepada komunitas lokal (universitas, event lingkungan, dan sebagainya). Ketiga, melakukan diskusi untuk memperoleh sebuah *input* yang bisa bermanfaat dalam menangani permasalahan sampah plastik. Gerakan sosial baru dalam rangka pengurangan sampah plastik sekali pakai dalam melakukan

kampanyenya menjalankan hubungan dengan Pemerintah Bali dan pengelola bisnis. Didalam kampanye tersebut setiap strategi yang digunakan membutuhkan sebuah power, kampanye tersebut bukan sebatas kritik yang ditujukan kepada Pemerintah Bali dan pengelola bisnis dalam reduksi sampah plastik sekali pakai, namun hadirnya sebuah gerakan kampanye tersebut bisa memberikan berbagai informasi dan solusi terkait dengan permasalahan lingkungan merupakan sebuah permasalahan bersama yang membutuhkan sikap peduli dari semua komponen masyarakat (Geraldine & dkk, 2021)

Hal tersebut sudah terbukti melalui sebuah penelitian yang sudah dilakukan mengenai hadirnya sebuah gerakan sosial dalam bidang lingkungan. Dimana dari penelitian tersebut mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa hadirnya sebuah gerakan sosial baru berupa kampanye terkait pengurangan sampah plastik di Bali, tidak hanya Pemerintah dan pelaku bisnis yang memiliki peran penting tetapi masyarakat juga memiliki peran utama dalam menumbuhkan sikap kepedulian terhadap menjaga lingkungan, agar penggunaan bahan plastik dikehidupan sehari-hari dapat berkurang, kemudian masyarakat dapat memulai kebiasaan baru dengan mengganti penggunaan bahan baku plastik dengan bahan yang ramah lingkungan seperti mengganti kebiasaan penggunaan tas plastik menjadi tas kanvas, sedotan plastik menjadi sedotan *stainless*, botol minum plastik menjadi botol minum kaca.

Berbeda dengan kajian di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada gerakan masyarakat Bantargebang. Gerbang (Gerakan Masyarakat Bantargebang) merupakan suatu lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan, khususnya di area TPST Bantargebang. Pada tahun 2021 lembaga masyarakat tersebut telah dibentuk dan diketuai oleh bapak Jamaluddin S.H, terbentuknya gerakan masyarakat Bantargebang disebabkan karena Bantargebang merupakan wilayah yang menjadi titik untuk tempat pembuangan sampah. Selain itu, tujuan dari terbentuknya lembaga masyarakat gerbang adalah untuk memantau terkait dengan pembuangan sampah karena dalam jangka waktu yang panjang masyarakat yang berada di area pembuangan sampah tersebut akan dirugikan. Walaupun mendapatkan kompensasi dari Pemerintah DKI Jakarta, tetapi dampak yang cukup besar untuk tenggang waktu 10 sampai 20 tahun kedepan tidak bisa diprediksi apa yang akan dialami oleh masyarakat. Berulang kali adanya peristiwa dari tumpukan sampah di TPST Bantargebang meledak, sehingga beberapa zonasi yang terdampak dari pembuangan sampah sudah tidak menggunakan air yang di bor lagi,

tetapi untuk saat ini menggunakan air PAM. Bahkan hadirnya pekerja harian lepas (PHL) untuk membersihkan kali pembuangan sampah dinilai tidak cukup untuk mengatasi permasalahan sampah. Kemudian selain PHL, adapun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang bekerja dalam mengorganisasikan limbah terlebih limbah yang menyimpan bahan dasar zat kimia (racun berbahaya) sehingga sampah yang diproses dapat dibuang ke lingkungan tanpa menghasilkan imbas yang mengkhawatirkan bagi masyarakat, media tersebut juga dinilai tidak bekerja secara maksimal sesuai dengan karakteristiknya dalam mengelola limbah dari TPST Bantargebang.

Penyebab lainnya juga berdampak kepada indera penciuman masyarakat, permasalahan sampah yang tidak bisa teratasi dengan benar menghasilkan aroma yang tidak sedap bagi masyarakat. Kemudian aktivitas sehari-hari dari kendaraan pengangkut sampah yang menuju ke TPST Bantargebang maupun TPA DKI Jakarta merupakan armada yang dinilai tidak *safety*, karena sudah rusak sehingga air dari tumpukan sampah yang terdapat didalam armada tersebut mengalir ke jalan. Selain itu, sampah yang terdapat di dalam armada tersebut juga banyak yang berterbangan, sehingga membuat jalan menjadi licin dan menyebabkan banyak pengguna kendaraan bermotor mengalami kecelakaan lalu lintas karena dampak dari kendaraan yang mengangkut sampah untuk ke TPST Bantargebang tersebut.

Rasa khawatir yang dialami oleh masyarakat menjadi salah satu tujuan dari didirikannya lembaga masyarakat Gerbang (Gerakan Masyarakat Bantargebang). Menurut Bapak Jamal selaku ketua Gerbang, masyarakat mendapat kompensasi dari pemerintah bukan bentuk sebagai kebahagiaan justru akan menjadi suatu masalah kedepannya, baik melalui gangguan pernafasan, penggunaan sumber daya air yang kedepannya akan tercemar, dan sebagainya. Kritik yang diberikan oleh Bapak Jamal kepada pemerintah Kota Bekasi terkait dengan hadirnya tim monev (monitoring dan evaluasi) yang sudah diatur sesuai dengan UU No.5 Tahun 2019 merupakan orang yang memang dibentuk untuk mengawasi berbagai aspek seperti apa saja aktivitas sehari-hari, apa saja dampak-dampaknya, apa saja yang harus diperbaiki. Tetapi dari segala aspek tersebut tidak ada yang dilaksanakan oleh tim monev.

Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta kepada Kota Bekasi tidak sedikit untuk diberikan kepada tim monev. Hal penting yang seharusnya dikerjakan justru terabaikan begitu saja adalah tidak adanya laporan

pertanggungjawaban yang dibuat dalam mengawasi TPST Bantargebang. Anggota tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk bukan orang-orang yang dianggap bisa bertanggungjawab atas lingkungan mereka, justru anggotanya berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) karena mereka melihat bahwa didalam tim monitoring dan evaluasi terdapat uang yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Bapak Jamal, anggota PNS yang masuk kedalam tim monev merupakan orang-orang yang seharusnya bekerja sebagai administrasi di kelurahan atau kecamatan, mereka tidak bisa bekerja secara maksimal karena bagian monitoring dan evaluasi bukanlah ranah yang mereka kuasai.

Hal tersebut membuat pak Jamal selaku ketua lembaga masyarakat Gerbang merasa geram dan khawatir serta berfikir bahwa mulai saat ini gerakan masyarakat Bantargebang harus bisa mengawasi permasalahan lingkungan terutama terkait dengan polusi sampah dan dampak kedepannya. Pada tahun 2021 sebelum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat TPST Bantargebang dikelola oleh swasta karena adanya perusahaan yang mengelola sampah. Selang berapa tahun ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat TPST Bantargebang diambil alih untuk dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. TPST Bantargebang dibagi menjadi dua TPST yaitu satu tempat untuk pembuangan sampah dari DKI dan satu tempat khusus untuk pembuangan sampah dari Kota Bekasi. Semenjak DKI Jakarta mengelola sampah sendiri pemerintah hanya memberikan uang kompensasi kepada warga, uang tersebut digunakan untuk perbaikan jalan yang rusak dengan anggaran yang cukup besar.

Pada tahun 2024 pemerintah Kota Bekasi mengajukan dana kepada DKI Jakarta sebesar 1 Triliun untuk TPST Bantargebang. Sedangkan pada tahun 2023 Kota Bekasi mengajukan dana sebesar 357 Miliar kalau tidak salah. Pengajuan dana yang diberikan pemerintah Kota Bekasi kepada pemerintah DKI Jakarta seharusnya ada musyawarah masyarakat, saya kaget tiba-tiba tau pemerintah Kota Bekasi mengajukan dana sampai 1 Triliun tanpa sepengetahuan masyarakat, menurut saya masyarakat sangat dirugikan disini. Makanya saya disini membuat gerakan masyarakat Bantargebang untuk mengawasi-mengawasi kebijakan pemerintah terkait dengan dana yang dikeluarkan oleh DKI Jakarta. Menutup kemungkinan juga karena sebelumnya sudah terikat kontrak yang sudah ditanda tangani oleh walikota, kita sebagai masyarakat tidak diberi tahu bagaimana isi dari kontrak tersebut dan tidak di publikasikan. Seharusnya hal

seperti itu dipublikasikan, makanya saya sangat menentang keras pemerintah Kota Bekasi terkait dengan TPST salah satunya saya berdiri sebagai Gerbang, ujar Bapak Jamal.

Berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan peneliti pada paragraph diatas, peneliti terkesan untuk meneliti terkait dengan gerakan sosial di bidang lingkungan yang berfokus pada Gerakan Masyarakat Bantargebang (Gerbang) di TPST Bantargebang. Penelitian ini akan membahas terkait dengan bagaimana gerakan masyarakat Bantargebang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terdapat di lingkungan TPST Bantargebang. Sedangkan dibalik permasalahan yang terjadi tersebut terdapat problematika dimana masyarakat justru mengalami kerugian dari hadirnya TPST Bantargebang untuk jangka waktu yang cukup panjang. Maka keistimewaan tersebut menyebabkan peneliti sangat terkesan untuk meneliti problematika sosial lingkungan dengan judul **“Gerakan Sosial Dalam Bidang Lingkungan (Studi Pada Gerakan Masyarakat Bantargebang di TPST Bantargebang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, serta merujuk dari latar belakang yang telah dijelaskan peneliti, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Gerakan Sosial Dalam Bidang Lingkungan Pada Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) Di TPST Bantargebang?”**. Rumusan masalah inti tersebut kemudian diturunkan kedalam tiga persoalan penelitian yaitu:

1. Apa yang menjadi keresahan masyarakat di TPST Bantargebang?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) terhadap keresahan masyarakat di TPST Bantargebang?
3. Apa dampak Gerakan yang dilakukan terhadap kondisi lingkungan di TPST Bantargebang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang membuat masyarakat di TPST Bantargebang menjadi resah.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) dalam menghadapi keresahan masyarakat di TPST Bantargebang.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak hadirnya gerakan yang dilakukan terhadap kondisi lingkungan di TPST Bantargebang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan hadirnya manfaat yang mampu diberikan oleh penulis kepada masyarakat dan kedepannya bisa dipilih sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya yang ingin mengambil judul yang sama. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoretik

Penelitian ini secara teoritis dapat meningkatkan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan umum, khususnya pengetahuan mengenai bentuk gerakan sosial dalam bidang lingkungan pada Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) di TPST Bantargebang. Kemudian, memberikan gambaran terkait dengan kondisi masyarakat yang berada di TPST Bantargebang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat untuk masyarakat di TPST Bantargebang maupun pembaca. Memberikan wawasan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hal yang berkaitan dengan hadirnya gerakan sosial dalam bidang lingkungan pada Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) di TPST Bantargebang dalam menjaga lingkungan.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagian hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul skripsi yang peneliti angkat, maka tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan dikelompokkan menjadi 3 tema besar ialah mengenai gerakan sosial, masyarakat, dan lingkungan.

1. Gerakan Sosial

Perkembangan literature yang membahas mengenai fenomena gerakan sosial sebelumnya telah dijelaskan oleh Rajendra Singh (2010), Rendi Ariyansyah dan Masyhur (2020), Aribowo (2020), dan Priyatno Harsasto (2020) menjelaskan mengenai gerakan sosial.

Menurut Rajendra Singh (2010) gerakan sosial dibagi menjadi 2 bagian: Pertama, mengartikulasikan upaya kolektif masyarakat untuk memperjuangkan sebuah ekualitas, keadilan sosial, dan merepresentasikan setiap perjuangan masyarakat untuk membela identitas serta warisan budaya yang dimiliki oleh mereka. Menurutnya aksi kolektif yang dijalankan merupakan sebuah bentuk usaha bersama dari sekelompok orang dalam memperoleh prospek baik prospek jangka pendek, maupun jangka menengah. Kedua, memobilisasi anggota masyarakat untuk bisa berusaha menyuarakan keluhan dalam melawan pihak musuh entah itu Negara ataupun bagian lain dari masyarakat. Hadirnya suatu ideologi yang sama-sama dianut oleh anggotanya merupakan sebuah ciri khas dari gerakan sosial (Singh, 2010). Menurut Rendi Ariyansyah dan Masyhur (2020) gerakan sosial memiliki perbedaan dalam segi kualitas transformasi yang diharapkan. Perubahan tersebut memprioritaskan pada modifikasi, berusaha untuk mempresentasikan kebiasaan baru, konfigurasi kehidupan baru, serta prinsip baru. Penyesuaian tindakan tersebut dinamakan progresif. Selain itu gerakan sosial memfokuskan pandangan terhadap transformasi struktur sosial dan transformasi individual (Ariyansyah & Masyhur, 2020).

Menurut Aribowo (2020) gerakan sosial sebagai bentuk upaya yang sebenarnya dilaksanakan oleh sekelompok individu secara sistematis dengan tujuan membentuk terjadinya suatu transformasi dalam bentuk korelasi di dalam masyarakat (Aribowo, 2020). Menurut Priyatno Harsasto (2020) pada dasarnya modal sosial adalah hasil dari gerakan sosial dan sebaliknya. Gerakan sosial merupakan sebuah bentuk upaya yang didalamnya mengemukakan mekanisme partisipatoris dalam pengumpulan ketetapan. Selain itu, dalam penelitian ini gerakan sosial tidak lagi dipandang sebagai suatu wadah, namun perlu ditafsirkan sebagai mobilisasi *network*. Dengan mengimplementasikan kaidah studi kasus, penelitian ini menjelaskan bahwa suatu gerakan sosial terdapat dalam sektor sosial

tertentu, membentuk kerangka umum sebuah tindakan dan mempengaruhi kemungkinan berkembangnya suatu perilaku kolektif (Harsasto, 2020).

2. Masyarakat

Perkembangan literature yang membahas mengenai fenomena masyarakat sebelumnya telah dijelaskan oleh Donny Prasetyo, Irwansyah (2020), Ansori Hidayat (2019), Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan (2019), S. Purwaningsih (2020) menjelaskan mengenai masyarakat.

Menurut Donny Prasetyo, Irwansyah (2020) masyarakat memiliki dua arti yaitu dalam penjelasan luas masyarakat yaitu integritas relasi hidup yang dijalin secara bersamaan tanpa ditentukan dengan lingkungan, warga negara dan sebagainya. Sementara itu definisi dalam arti sempit ialah serangkaian individu yang ditentukan oleh kelompok, wilayah, dan bangsa. Dapat disimpulkan dari penjelasan yang telah dibahas bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berkaitan dalam suatu relasi sosial. Mereka memiliki keselarasan dalam adat istiadat, wilayah, dan personalitas. Serta memiliki suatu kebiasaan, sikap, tradisi, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan (Prasetyo & Irwansyah, 2020). Menurut Ansori Hidayat (2019) masyarakat sebagai komunitas yang hidup secara berdampingan di suatu daerah sehingga dapat mendirikan suatu daerah dan sebuah sistem, baik semi tertutup, dimana hubungan yang akan terjalin didalamnya ialah berasal dari perseorangan yang terdapat di kelompok tersebut. Selain itu, suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia mengimplementasikan ideologi, hasrat, dan perasaan dalam beraksi pada lingkungannya. Keadaan tersebut membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan antara satu dengan lainnya (Hidayat, 2019).

Menurut Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019) masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang mempunyai tujuan bersama dan mempunyai adat istiadat serta institusi yang khas. Pengertian masyarakat dalam kenyataannya justru memiliki variasi antara golongan masyarakat satu dengan golongan masyarakat lainnya. Perbedaan tersebut timbul karena masyarakat menghadapi suatu evolusi (perkembangan secara lambat). Berdasarkan kualitas yang akan diraih dalam prosedur evolusi, tergolong beberapa jenis golongan masyarakat. Jenis kelompok masyarakat tersebut mempunyai perpaduan salah

satunya ialah bersedia menolong antar masyarakat saat satu diantara mereka sedang mengalami kesulitan. Pada umumnya, masyarakat akan segan untuk menawarkan sebuah pertolongan kepada masyarakat yang hidup tidak sepadan dengan adat istiadat dan norma yang berlaku (Nainggolan & E, 2019). Menurut S. Puwaningsih (2020) masyarakat ialah sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan berbagai macam kebudayaan serta kepribadiannya. Oleh karena itu, dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis masyarakat memerlukan seperangkat aturan dan norma yang dijadikan sebagai kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan bersama (Purwaningsih, 2020).

3. Lingkungan

Perkembangan literature yang membahas mengenai fenomena lingkungan sebelumnya telah dijelaskan oleh Dantje T. Sembel (2015), Faisal Faliyandra (2019), Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti (2021), dan Dewi Annisa Qisti, dkk (2021) menjelaskan mengenai lingkungan.

Menurut Dantje T. Sembel, B.Agr.Sc., Ph.D. (2015) lingkungan sebagai ruang yang dapat memengaruhi kehidupan makhluk hidup secara bersamaan, selain itu lingkungan merupakan penilaian untuk unsur-unsur yang terdapat disekitar makhluk hidup, termasuk keseluruhan makhluk hidup dan energy alaminya. Berdasarkan penjelasan tersebut, lingkungan dapat disimpulkan sebagai penilaian dan interaksi satu dengan yang lain seperti unsur air, udara dan tanah dengan organisme lainnya, seperti flora (tumbuhan) dan fauna (hewan). Termasuk di dalamnya seluruh ruang lingkup, baik fisik maupun biologis dan hubungannya terhadap satu dengan lainnya. Di Indonesia lingkungan selalu memiliki keterkaitan dengan istilah “lingkungan hidup” (Sembel, 2015). Menurut Faisal Faliyandra (2019) lingkungan diartikan sebagai seluruh benda hidup dan mati, tidak berwujud dan berwujud yang dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh makhluk hidup dalam kelangsungan hidupnya (Faliyandra, 2019).

Menurut Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti (2021) lingkungan sebagai integritas ruang dengan semua benda, daya, kondisi dan makhluk hidup termasuk manusia dan kepribadiannya yang dapat berpengaruh terhadap alam, serta kesinambungan hidup. Lingkungan ialah seputar kondisi yang bisa berpengaruh

untuk pertumbuhan dan tingkah laku makhluk hidup. Hal-hal yang berada di sekitar manusia yang berpengaruh pada pertumbuhan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan arti dari lingkungan. Lingkungan merupakan jumlah seluruh benda dan kondisi yang terdapat pada ruangan yang menjadi tempat tinggal serta dapat berpengaruh pada kehidupan kita. Secara akademis lingkungan jumlahnya tidak terbatas (Wihardjo & Rahmayanti, 2021). Menurut Dewi Annisa Qisti, dkk (2021) lingkungan merupakan satu kesatuan yang berkaitan dengan sumber daya, termasuk makhluk hidup yang saling berhubungan dan berpengaruh sehingga bisa menciptakan suatu kesesuaian yang harmonis untuk keberlangsungan hidup (Qisti & dkk, 2021).

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a. Gerakan Sosial

Menurut John D. McCarthy dan Mayer Zald gerakan sosial sebagai seperangkat pandangan dan keyakinan (*opinion and belief*) dalam suatu golongan masyarakat yang mampu mempresentasikan pengutamaan untuk transformasi pada sebagian unsur-unsur struktur sosial dan perputaran keuntungan dalam sistem masyarakat yang lebih besar. Gerakan sosial muncul karena hadirnya sebuah kesamaan latar belakang yang dimiliki oleh sekelompok individu

b. Masyarakat

Menurut Fredian Tonny Nasdian (2014) menggambarkan masyarakat sebagai suatu *community* (komunitas). Komunitas diartikan mengacu pada masyarakat di dusun, desa, kota, suku, ataupun bangsa. Meskipun tiap komponen suatu golongan, baik golongan besar maupun kecil dalam menjalankan kehidupan yang kolektif. Sehingga dapat merasakan bahwa golongan tersebut dapat melengkapi kebutuhan hidup yang paling penting (Nasdian, 2014).

c. Lingkungan

Adapun definisi lingkungan menurut Manik (2016) ialah integritas ruang dengan seluruh kondisi, benda, makhluk hidup, dan kepribadiannya yang memengaruhi alam tersebut, kesinambungan hidup, kebahagiaan manusia dan makhluk hidup lainnya (Manik, 2016). Al-qur'an membahas mengenai kelestarian lingkungan dalam sebuah pendidikan, karena pada dasarnya agama islam dengan ketetapan lingkungan memiliki kaitan kompleks sebagai daya moralitas dan spiritualitas yang berhubungan. Pendidikan tersebut mengajarkan manusia untuk bisa mengarahkan tingkah laku dan akhlak yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, karena bisa menjadi dampak berkepanjangan (Amin & dkk, 2019).

d. Gerakan Sosial dalam Perspektif Islam

Dalam Islam gerakan sosial dipandang sebagai sebuah refleksi dan reaksi atas dinamika sosial yang terdapat di kehidupan masyarakat. Sehingga tindakan tersebut dinilai mengevaluasi serta menyarankan sebuah solusi dengan mengutamakan nilai-nilai keyakinan serta aturan yang berlandaskan pada agama Islam (Afifah & dkk, 2020). Pengaruh agama mempunyai horizon yang luas, hal tersebut menjadi sumber nilai untuk membentuk kepribadian, pandangan bagi gerakan sosial dan perekat hubungan sosial. Islam merupakan agama damai yang mampu mengaitkan secara normative dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun dalam praktik dan realitas sejarah. Agama Islam memiliki perubahan menjadi sebuah agama dan pandangan yang mampu menjadi spirit yang menjelma menjadi sebuah gerakan sosial, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya (Nurdin & dkk, 2018).

2. Teori Mobilisasi Sumber Daya McCarthy dan Mayer Zald

a. Konsep Dasar Teori

Pendekatan yang digunakan oleh John McCarthy dan Mayer Zald dalam membahas mengenai gerakan sosial ini adalah *resource mobilization theory* (Teori Mobilisasi Sumber Daya), pendekatan ini digunakan karena memberikan perhatian khusus dan lebih luas pada fundamental factor peran organisasi dalam melakukan suatu gerakan sosial (Syawaludin, 2017). Teori Mobilisasi Sumber Daya merupakan respon terhadap Teori Perilaku Kolektif.

Munculnya Teori Mobilisasi Sumber Daya menandai bahwa mulainya kajian gerakan sosial modern. Teori Mobilisasi Sumber Daya muncul pada tahun 1977, gerakan sosial dinilai sebagai tindakan langsung pada keluhan serta kekecewaan. Menurut McCarthy dan Mayer Zald (Edwards, 2014), dalam keadaan yang mengakomodasi suatu perubahan setiap nilai dalam tingkah laku nyata serta menekan pada keadaan yang dapat mempermudah organisasi gerakan sosial dalam bermufakat ataupun berjuang. Teori Mobilisasi Sumber Daya mendeskripsikan dua perspektif. Pertama, berhubungan dengan sumber daya fisik, dan non fisik yang dimiliki oleh sebuah gerakan seperti pengetahuan, keahlian, atau hubungan tertentu dalam usaha memperoleh tujuan dari gerakan tersebut. Aspek sumber daya mampu didominasi dengan baik secara individu maupun bersamaan. Kedua, mobilisasi adalah sebuah mekanisme yang memiliki keterkaitan dengan tokohnya dengan cara menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam meraih sebuah tujuan melalui adanya gerakan. Gabungan dari aspek yang telah dijelaskan saling berintegritas dalam kedudukannya, sehingga hal ini dibutuhkan dalam usaha untuk mencapai tujuan (Aulia, 2020).

b. Asumsi Dasar Teori

Teori Mobilisasi Sumber Daya memiliki 4 (empat) asumsi yang dapat menggambarkan mengenai munculnya suatu gerakan sosial yaitu: Pertama, peserta gerakan sosial tidak berubah dari individu rasional menjadi emosional (irasional), akan tetapi mereka akan tetap menjadi aktor rasional. Individu bergabung dalam suatu gerakan sosial melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang rasional. Kedua, suatu kemarahan dan atau frustrasi yang disebabkan oleh ketegangan struktural tidak serta merta mendorong individu terlibat dalam suatu gerakan sosial, kecuali adanya sarana yang dapat memungkinkan mereka dapat terlibat dalam gerakan sosial, sarana tersebut merupakan sumber daya baik *tangible* (berwujud) maupun *intangible* (tidak berwujud).

Ketiga, dalam proses pengambilan sebuah keputusan untuk dapat terlibat dalam gerakan sosial, aktor rasional dapat mempertimbangkan *cost* (kerugian) dan *benefits* (keuntungan) yang akan mereka dapatkan dan mereka akan menentukan atau memilih strategi yang paling efektif untuk digunakan

dalam mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Keempat, individu yang berasal dari kelas social sama akan memiliki suatu kepentingan yang sama, diantaranya dapat memunculkan suatu kepentingan politik yang sama, sehingga mereka bisa menjalin keterkaitan antara satu dengan lainnya dalam mewujudkan tujuan melalui sebuah gerakan social (Edwards, 2014).

c. Istilah-Istilah Kunci Teori

Konsep kunci teori mobilisasi sumber daya mengarah kepada istilah sumber daya. Sumber daya yang dibahas dalam teori ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama, Sumber Daya *Tangible* (berwujud) seperti uang, peserta, dan infrastruktur komunikasi. Kedua, Sumber Daya *Intangible* (tidak berwujud) seperti keterampilan, dan dukungan publik. Selain itu, dalam teori mobilisasi sumber daya terdapat istilah-istilah kunci teori lainnya seperti *Cost* (kerugian), *Benefits* (keuntungan), Rasionalitas Instrumental (menemukan sarana yang paling efektif untuk memenuhi keinginan atau kepentingan dengan mempertimbangkan *cost* (kerugian) dan *benefits* (keuntungan), *Public Goods* (sarana dan prasarana), *Private Goods* (sarana dan prasarana pribadi), *Free Ride* (orang-orang yang dapat menikmati *public goods* meskipun mereka tidak ikut memperjuangkannya), *Social Sanction* (tekanan dan sanksi social kepada individu yang tidak terlibat dalam gerakan sosial untuk memperjuangkan *public goods*), *Selective Incentive* (keuntungan baik material maupun non material bagi individu yang terlibat dalam gerakan sosial untuk memperjuangkan *public goods*), dan *Critical Mass* (individu-individu dengan kepentingan diri yang tinggi serta memiliki sumber daya yang berani melawan tantangan dan dapat berkomunikasi serta menemukan satu sama lain).

d. Implementasi Teori Pada Penelitian

Teori mobilisasi sumber daya berargumen bahwa individu memutuskan untuk bergabung dengan sebuah gerakan sosial atau tidak, berdasarkan proses rasional (melalui mekanisme pengambilan keputusan) oleh sebab itu gerakan sosial dinilai sebagai aksi kolektif yang rasional. Individu memiliki kecenderungan, keinginan, atau tujuan tertentu dan memiliki strategi dalam memenuhi keinginannya, dengan menimbang strategi apa yang paling efektif untuk digunakan dalam memenuhi keinginannya. Serta dalam proses pemilihan

strategi, individu perlu memikirkan keuntungan dan kerugian, karena keputusan akan tindakan yang diambil oleh individu akan dipengaruhi oleh berubahnya keuntungan dan kerugian dalam lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, hal yang diperlukan untuk diketahui adalah sumber daya yang dimiliki.

Implementasi teori mobilisasi sumber daya terhadap penelitian ini adalah hadirnya Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) sebagai wadah bagi masyarakat yang bertempat tinggal di area TPST Bantargebang. Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) memiliki tujuan atau keinginan dalam memaksimalkan sumber daya manusia yang masih belum terpenuhi akan hak-hak yang seharusnya bisa didapatkan oleh mereka. Selain itu, lembaga kemasyarakatan tersebut juga menimbang *cost* (kerugian) dan *benefits* (keuntungan) yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Sumber daya manusia di area TPST Bantargebang dinilai kurang memiliki edukasi dalam memperjuangkan hak hidup yang dimiliki termasuk dalam menikmati *public goods*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dalam meneliti ialah pengkajian lapangan dengan menerapkan kaidah kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif. Basrowi dan Suwandi (2008) dikutip oleh Farida Nugrahani penelitian dengan metode kualitatif dinilai dapat mengenali subjek, serta merasakan hal yang dialami oleh subjek terutama pada kegiatan sehari-hari. Setiap fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat merupakan sesuatu yang unik dan berbeda konteks dengan lainnya. Sehingga peneliti bisa terlibat dalam konteks dan situasi fenomena alami sesuai yang sedang diteliti (Nugrahani, 2014). Sedangkan pendekatan deskriptif digunakan sesuai dengan gejala atau fenomena yang terjadi, dipaparkan dengan spesifik arah dan tujuan yang ingin dicapai, serta mengakumulasi data atau fakta sebagai subjek dalam membuat sebuah laporan (Jayusman & dkk, 2020). Pada penelitian ini peneliti melaksanakan peninjauan lapangan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengakumulasi sumber data melalui cara observasi (pengamatan), wawancara, serta dokumentasi (pengambilan gambar).

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diakumulasi oleh peneliti dengan melakukan observasi atau turun secara langsung ke lapangan. Selain itu dalam memperoleh data primer peneliti langsung mendatangi sumber atau memperoleh data dengan menggunakan pendekatan wawancara (Indrasari, 2020). Data primer sebagai data pokok yang harus didapatkan di lapangan penelitian. Pada penelitian gerakan social dalam bidang lingkungan pada gerakan masyarakat Bantargebang (GERBANG) diperoleh dengan cara melakukan observasi, dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diakumulasi oleh peneliti dengan cara mendapatkan dari sumber-sumber terdahulu baik melalui informasi artikel, buku ataupun jurnal (Assidiqi & Sumarni, 2020). Data sekunder bersumber dari tulisan yang berbentuk dokumen, jurnal ilmiah, buku, website resmi dan dokumen resmi baik yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Adapun data sekunder yang digunakan oleh peneliti selain melalui jurnal dan buku, peneliti memperoleh data arsip yang berasal dari lembaga masyarakat. Data yang diperoleh peneliti berhubungan dengan focus pada penelitian mengenai gerakan social dalam bidang lingkungan di TPST Bantargebang. Dengan sumber yang telah digunakan ini diharapkan mampu membantu peneliti dalam memberikan pemahaman serta keterangan yang dapat memperkuat data primer yang digunakan pada penelitian ini.

3. Teknik Pengambilan Data

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik:

a. Wawancara

Wawancara merupakan gambaran komunikasi verbal seperti dialog yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau ditafsirkan sebagai

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara terbuka, kemudian diawali dengan peneliti yang akan mengajukan pertanyaan yang tidak berstruktur karena pada tahap awal informan mendapatkan kelonggaran dan keluasaan untuk mengekspresikan pandangan, serta perasaannya tanpa dimanipulasi oleh peneliti. Ketika peneliti telah mendapatkan keterangan yang diberikan oleh informan maka peneliti dapat memulai wawancara yang lebih berstruktur berlandaskan apa yang telah disampaikan oleh informan tersebut. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka maupun dengan media komunikasi. Selain itu wawancara bertujuan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam hati dan pikiran seseorang, bagaimana pandangannya tentang dunia yaitu hal-hal yang tidak peneliti ketahui melalui serangkaian observasi (Abdussamad, 2022).

Maka wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu wawancara secara tatap muka dan melalui media komunikasi yang dilakukan secara langsung. Wawancara menggunakan media komunikasi menjadi teknik alternatif yang digunakan oleh peneliti ketika sumber data yang tidak didapat dari wawancara secara langsung. Selain itu, penelitian ini menggunakan *purposive* dalam menentukan informan. Teknik *purposive* merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan sebuah informan melalui sebuah pertimbangan atau kriteria tertentu (Sidiq & dkk, 2019).

Adapun beberapa pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti untuk melengkapi data penelitian ini yaitu:

- 1) Ketua Gerakan Masyarakat Bantargebang
- 2) Masyarakat yang ikut bergabung dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang
- 3) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
- 4) Masyarakat

b. Observasi

Zuchri Abdussamad mendefinisikan observasi sebagai suatu metode akumulasi data yang dilaksanakan secara sistematis dan direncanakan melalui pengamatan dan kodifikasi terhadap indikasi yang akan diamati. Hal yang diperlukan dalam melakukan observasi adalah peneliti harus bisa berinteraksi dengan manusia (masyarakat), mempelajari melalui segi bahasa yang digunakan, melihat dengan pandangan langsung hal-hal yang terjadi didalam lingkungan tersebut, mendengar apa yang dikatakan, pikirkan, dan rasakan. Menurut J.P Spradley (dalam Nasution1988) menjelaskan dalam setiap keadaan terdapat tiga elemen penting dalam observasi yaitu ruang (tempat), pelaku (actor) dan kegiatan (aktivitas) (Abdussamad, 2022).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan menelaah suatu data yang berkaitan dengan variable berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ialah sebuah evaluasi kejadian yang sudah berlalu dan dapat dimanfaatkan untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi di lapangan yang bersumber dari dokumen serta rekaman. Dokumen memiliki bentuk yang berbeda seperti gambar, catatan, atau historis dari manusia. Teknik dokumentasi salah satu konfigurasi akumulasi data yang paling sederhana, karena peneliti hanya mencermati benda mati dan ketika menghadapi kesalahan akan mudah untuk memperbaikinya karena sumber data yang diperoleh konsisten dan tidak berubah (Abdussamad, 2022).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah teknik memeriksa dan mengurutkan secara terstruktur data yang telah didapatkan melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan kaidah mengintegrasikan data ke dalam tingkatan, menganalisis ke dalam komponen, melakukan analisis, mengurutkan ke dalam metode, kemudian menentukan data yang relevan dan yang akan dianalisis, dan membuat kesimpulan agar mudah ditafsirkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data induktif dalam menyusun laporan. Analisis data induktif merupakan sebuah pemaparan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, berikutnya akan diuraikan menjadi suatu

hipotesis (dugaan sementara). Hipotesis yang akan dijelaskan berdasarkan data yang telah diperoleh, kemudian mencari data lagi secara berulang kali dan berakhir disimpulkan apakah dugaan sementara tersebut bisa diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah diperoleh. Bersumber melalui data yang telah dikumpulkan secara berulang kali dengan metode triangulasi, ternyata dugaan sementara tersebut diterima, sehingga hipotesis dapat berkembang menjadi teori (Abdussamad, 2022).

Dari penjelasan diatas peneliti menggunakan analisis data berdasarkan Miles dan Huberman (1984) yang mendeskripsikan bahwa langkah analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berproses secara berkepanjangan hingga sempurna, sehingga data yang diperoleh sudah transparan. Analisis tersebut terbagi menjadi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Adapun penjelasan aktivitas dalam analisis data tersebut sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang didapatkan oleh peneliti berasal dari lapangan yang kuantitasnya cukup berlimpah, maka harus ditulis secara teliti dan rinci. Semakin lambat peneliti turun ke lokasi penelitian, maka kuantitas data yang didapat akan semakin bertambah, dan kompleks. Sehingga harus dilakukannya analisis data menggunakan tahap reduksi data. Mereduksi data adalah menggabungkan, menentukan hal pokok, mengutamakan pada hal yang penting, serta mencari pokok pikiran dan polanya. Sehingga data yang sudah direduksi akan memberikan representasi yang lebih transparan, dan memudahkan peneliti dalam melaksanakan akumulasi data selanjutnya (Abdussamad, 2022). Kemudian peneliti akan menggabungkan, mengambil data yang bernilai, kemudian membuat kelompok berdasarkan tema dan pembahasan mengenai gerakan social dalam bidang lingkungan pada gerakan masyarakat Bantargebang.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilaksanakan dalam bentuk deskripsi singkat, skema, flowchart, dan lainnya. Dengan menampilkan data lalu akan

mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, mempersiapkan proses selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. Kemudian dalam menyelesaikan penyajian data, peneliti mengumpulkan informasi terkait data yang telah diperoleh sebelumnya dan melakukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data tersebut bisa berupa teks yang naratif, kemudian data memberikan sebuah kesimpulan (Abdussamad, 2022).

c. Conclusion Drawing (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan penelitian kualitatif akan merespons rumusan masalah yang dirumuskan pada tahap awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Pada tahap ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan terkait dengan gerakan social dalam bidang lingkungan (Abdussamad, 2022).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian adalah sebuah rancangan penelitian (*outline*) dari penulis yang disusun secara deskriptif. Sistematika penulisan menjelaskan terkait susunan dan struktur tiap bab dan sub bab dalam menyusun skripsi yang mengindikasikan ikatan sistematis dan logis. Berikut merupakan sistematika penelitian yang akan peneliti sampaikan dalam penyusunan skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan blue print dari skripsi oleh sebab itu bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam laporan penelitian.

BAB II GERAKAN SOSIAL, MASYARAKAT, LINGKUNGAN DAN TEORI MOBILISASI SUMBERDAYA

Bab ini berisi konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian serta teorinya yaitu gerakan sosial, masyarakat, lingkungan serta gerakan sosial dalam perspektif islam. Teori mobilisasi sumberdaya dirinci menjadi konsep, asumsi dasar, istilah-istilah kunci, dan implementasi teori pada penelitian.

BAB III GERAKAN MASYARAKAT BANTARGEBAH DI TPST BANTARGEBAH KOTA BEKASI

Bab ini berisi mengenai gambaran umum mengenai Kota Bekasi dan Bantargebah yang meliputi kondisi geografis, topografis, dan demografis. Selanjutnya dipaparkan mengenai gambaran mengenai Gerbang di TPST Bantargebah yang meliputi profil (sejarah, visi, misi, tujuan program).

BAB IV LATAR BELAKANG GERAKAN MASYARAKAT BANTARGEBAH DAN UPAYA YANG DILAKUKAN

Bab ini berisi tentang data mengenai latar belakang dari gerakan sosial tersebut serta upaya yang dilakukan oleh gerakan masyarakat Bantargebah.

BAB V DAMPAK GERBANG TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN

Bab ini memaparkan mengenai dampak dari hadirnya Gerbang terhadap kondisi lingkungan dan sosial bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah deskripsi hasil temuan baru yang diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan saran adalah masukan yang diberikan oleh peneliti untuk berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi daftar sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian.

BAB II

GERAKAN SOSIAL, MASYARAKAT, LINGKUNGAN, DAN TEORI MOBILISASI SUMBER DAYA MCCARTHY DAN MAYER ZALD

A. Gerakan Sosial, Masyarakat, Lingkungan

1. Gerakan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gerakan social diartikan sebagai suatu tindakan yang telah direncanakan dan dilakukan oleh sekelompok masyarakat disertai dengan beberapa program terencana kemudian ditujukan kepada sebuah perubahan atau sebagai tindakan perlawanan dalam melestarikan pola dan institusi-institusi yang sudah ada. McCarthy dan Mayer Zald mendefinisikan gerakan sosial sebagai seperangkat pendapat dan keyakinan didalam kelompok yang mempresentasikan tuntunan perubahan yang bernilai sosial di beberapa elemen dan struktur sosial (McCarthy & Zald, 1977).

Gerakan sosial memfokuskan pada suatu kelompok sebagai dasar analisis maka keberadaan struktur mobilisasi menjadi hal yang tidak bisa dianggap mudah dalam memahami gerakan sosial. Struktur mobilisasi adalah alat untuk memahami aksi kolektif yang pada dasarnya melibatkan organisasi, jaringan, serta bagaimana mereka merancang pola dan strategi yang dapat digunakan dalam partisipan (McCarthy J. D.). Berdasarkan dimensi sasaran perubahan dan dimensi jumlah besarnya (tingkat) perubahan, maka gerakan sosial dapat dikelompokkan kedalam empat jenis, yaitu: gerakan sosial alternatif, gerakan sosial pembebasan, gerakan sosial reformasi, dan gerakan sosial revolusi. Berbeda dengan tokoh lainnya, jenis gerakan sosial menurut Syarbaini (2013) terbagi menjadi 9 macam.

Pertama, *Utopian movement*. Gerakan sosial tersebut dijalankan dengan memiliki tujuan dalam menciptakan lingkungan sosial yang ideal sebagai tempat huni atau upaya menciptakan masyarakat sejahtera dengan ruang lingkup skala yang kecil. Kedua, *Revolurionary movement*. Gerakan revolusioner merupakan gerakan yang melibatkan masyarakat secara tepat dengan memiliki tujuan merubah sistem yang telah ada menjadi sistem baru. Ketiga, *Reform movement*. Gerakan reformasi mempunyai upaya dalam memperbaiki ketidakseimbangan tanpa melakukan perubahan secara keseluruhan. Keempat, *Reactioner movement*. Gerakan sosial ini berusaha dalam membalikkan kondisi pada kedudukan

sebelumnya, dan setiap individu yang telah bergabung dengan gerakan tersebut merupakan orang-orang yang memiliki kekecewaan terhadap kecenderungan social yang sedang terjadi.

Kelima, *Migratory movement*. Gerakan ini disebut dengan gerakan perpindahan yaitu terjadinya arus perpindahan dari satu tempat ke tempat yang baru, individu yang merasa tidak cukup puas terhadap kondisi saat ini maka akan melakukan migrasi dengan berharap mendapatkan kondisi yang lebih baik. Keenam, *Expresive movement*. Gerakan ekspresif merupakan gerakan penduduk yang dijalankan dengan tujuan untuk merubah sikap mereka sendiri terhadap keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi sama sekali tidak merubah keadaan luar yang tidak menyenangkan. Ketujuh, *Resistance movement*. Gerakan perlawanan merupakan gerakan yang berusaha melakukan perlawanan terhadap beberapa perubahan sosial. Kedelapan, *Progressive movement*. Gerakan ini memiliki tujuan dalam memperbaiki masyarakat dengan cara mendatangkan perubahan positif pada tiap lembaga atau organisasi. Kesembilan, *Conservative movement*. Gerakan ini diartikan sebagai upaya yang dijalankan dengan cara menjaga supaya masyarakat tidak berubah, dan tokoh gerakan sosial sudah beranggapan bahwa kedudukan masyarakat pada saat ini dikategorikan sebagai kedudukan yang menyenangkan (Syahbaini, 2013).

Perkembangan gerakan sosial dipandang sebagai produk dari kekuatan lingkungan dan memiliki sifat internal serta eksternal terhadap gerakan. Pada sifat internal terbagi menjadi beberapa kategori seperti kepemimpinan, ukuran kelompok, tingkat ketersediaan sumber daya, dan tingkat dari organisasi internal. Sedangkan sifat eksternal dibagi menjadi tiga kategori yaitu tingkat represi dari masyarakat, tingkat simpatisan eksternal, dan jumlah serta kekuatan kelompok politik. Interaksi melalui berbagai faktor tersebut disebut sebagai faktor penentu atas perkembangan dan perilaku dari suatu gerakan sosial (Adam, McCarthy, & Zald, 1988).

Keberhasilan dan kegagalan suatu gerakan sosial ditentukan berdasarkan lima faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Leadership: Effective Leadership* (Kepemimpinan yang efektif)
- b. *Image: Positive Image* (Citra positif)

- c. *Tactics: Socially Accepted Tactics* (Taktik yang dapat diterima secara sosial)
- d. *Goals: Socially Accepted Goals* (Tujuan yang dapat diterima secara sosial)
- e. *Support: Cultivated Financial and Political Support* (Pembudayaan dukungan politik dan finansial)

McCarthy menjelaskan bahwa yang dapat memengaruhi mobilisasi sumber daya dalam suatu gerakan sosial adalah pemimpin, karena hadirnya keberadaan seorang pemimpin dipastikan dapat memonitor peran sebagai penyemangat dan eksplisit untuk memobilisasi sumber daya bagi gerakan sosial (Adam, McCarthy, & Zald, 1988). Terjadinya suatu gerakan sosial tentunya didasari dengan adanya komponen penting yang dapat menentukan gerakan sosial dapat terbentuk. Komponen tersebut dibagi menjadi lima yaitu: Pertama, struktur. Kedua, tujuan Bersama yang ingin dicapai. Ketiga, tantangan kolektif. Keempat, terjalinnya solidaritas dan identitas kolektif. Kelima, mampu memelihara politik perlawanan.

Anthony Giddens menafsirkan gerakan sosial sebagai upaya kolektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan melalui aksi kolektif diluar lembaga yang ada (Giddens, 1993). Selaras dengan Anthony, Macionis (1999) mengartikan *social movement* (gerakan sosial) sebagai bagian penting dari perilaku kolektif. Para sosiolog menyebut gerakan sosial sebagai bentuk dari sebuah tindakan kolektif daripada sebagai bentuk perilaku kolektif. Mereka berpandangan bahwa gerakan sosial memiliki perbedaan dengan bentuk-bentuk perilaku kolektif (Macionis, 1999).

Tarrow menjelaskan bahwa gerakan sosial memiliki empat kekhususan ialah: Pertama, membentuk aksi-aksi yang digunakan oleh kelompok tertindas dalam melawan kelompok elit atau penguasa yang berpedoman pada norma dan budaya tertentu. Kedua, melakukan tindakan tersebut mengatas namakan permintaan yang sama terhadap kelompok elit (penguasa). Ketiga, berasal dari munculnya rasa solidaritas dari aktor yang terlibat dalam suatu gerakan sosial. Keempat, kemudian melanjutkan tindakan kolektifnya hingga terjadi suatu perubahan sosial dari tujuan yang dibentuk sebelumnya (Tarrow, 1998).

Iwan Gardono Sijatmiko mengaitkan masyarakat sipil dengan gerakan sosial. Menurut Sijatmiko gerakan sosial adalah aksi yang berhubungan dengan suatu tindakan lembaga atau kelompok *civil society* dalam mengakomodasi atau menuju

sebuah perubahan sosial (Sijatmiko, 2006). Terjadinya gejala sosial di luar gerakan sosial ada apa saja yang memungkinkan para aktor dapat memiliki petunjuk dan mengetahui apakah hal-hal tersebut dapat dikelompokkan sebagai suatu gerakan sosial atau tidak. Dalam pembagian wilayah antara Negara, perusahaan atau *civil society* terdapat suatu “gerakan politik”.

Pembagian ranah tersebut ikut disinggung oleh Sidney Tarrow terkait “*political parties*” yang memiliki keterkaitan dengan gerakan politik. Keterkaitan tersebut dijadikan upaya penguasaan kedudukan politik oleh partai politik dalam pemilu. Sedangkan gerakan ekonomi memiliki keterkaitan dengan lobby yang memiliki upaya dalam menciptakan transisi kebijakan publik tanpa harus berjuang untuk mengharapkan jabatan publik dalam meraih keuntungan secara ekonomi (Triwibowo, 2006). Oleh karena itu, gerakan sosial diartikan sebagai upaya kolektif masyarakat sipil (*civil society*) yang berlandaskan pada rasa solidaritas sosial dalam mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

Gerakan sosial dapat disimpulkan sebagai sebuah tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mencapai sebuah transformasi dan sesuai dengan apa yang akan dituju. Gerakan sosial dalam Islam dipandang sebagai refleksi dan reaksi atas dinamika sosial yang terdapat di kehidupan masyarakat, sehingga tindakan tersebut dinilai mengevaluasi serta menyarankan sebuah solusi dengan mengutamakan nilai keyakinan, dan aturan yang berlandaskan pada agama Islam.

Berbeda dari kedua tokoh tersebut, Locher (2002) berpendapat bahwa gerakan sosial memiliki perbedaan apabila dilihat dari perilaku kolektif lainnya ialah *crowd* (kerumunan), *rebel* (penolakan), dan *riot* (kerusuhan) dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu:

a. Aspek Pengorganisasian (*Organized*)

Menurut aspek pengorganisasian gerakan sosial merupakan sebuah kegiatan yang terstruktur, sementara perilaku kolektif pada dasarnya hadir tidak terstruktur. Misalnya, sekelompok anggota di tragedi kerusuhan kemungkinan satu diantara mereka memiliki kerjasama untuk jangka waktu singkat dalam waktu tertentu, namun keterkaitan anggota dalam

tragedi kerusuhan tersebut bersifat sementara, bebas, dan tidak termasuk kejadian yang terorganisir. Keanggotaan dan kepemimpinan dari sebuah perilaku kolektif datang dan pergi dengan cepat, hal ini merupakan hal yang umum. Dalam perilaku kolektif, tidak terdapat penugasan khusus yang harus dilakukan oleh tiap anggota, sementara dalam gerakan sosial tiap anggota memiliki tugas khusus untuk diperlihatkan, dimana mereka membuat strategi aksi secara teliti. Selain itu dalam suatu gerakan sosial, pemimpin bertugas dalam merancang dan mengatur pekerjaan serta tugas khusus yang akan diberikan kepada tiap-tiap anggota yang berpartisipasi dalam gerakan tersebut.

b. Aspek Pertimbangan (*Deliberate*)

Penyebab terjadinya suatu gerakan sosial disebabkan karena hadirnya sebuah pertimbangan. Sebagian besar perilaku kolektif dapat terjadi tanpa adanya sebuah rencana apapun. Sedangkan gerakan sosial secara intens hadir dengan sengaja dan para anggota berhati-hati dalam memutuskan apakah ikut serta atau tidak dalam suatu gerakan. Keterlibatan para anggota didesak oleh janji dan dorongan partisipan, gerakan sosial mencari advertensi serta memiliki upaya untuk memikat sebanyak mungkin individu-individu supaya mendukung gerakan tersebut. Aspek pertimbangan ini tidak berlaku pada sebagian besar dari perilaku kolektif.

c. Aspek Daya Tahan (*Enduring*)

Tindakan gerakan sosial pada dasarnya bertahan dalam waktu yang tergolong lama atau memiliki daya tahan. Sedangkan perilaku kolektif berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, tragedi kerusuhan terjadi hanya beberapa hari atau jam saja, sedangkan tindakan gerakan sosial kehadirannya untuk beberapa tahun kedepan (Locher, 2002).

Teori yang menunjukkan akar dari suatu gerakan sosial, salah satunya adalah teori mobilisasi sumber daya. Teori mobilisasi sumber daya yang diperkenalkan oleh McCarthy dan Mayer Zald (1977) berargumen bahwa munculnya gerakan sosial ketika orang memiliki akses kepada sumber daya yang memungkinkan

mereka mengorganisasikan suatu gerakan. Selain itu, teori ini juga berasumsi bahwa sejumlah ketidakpuasan selalu terdapat dalam ruang lingkup masyarakat. Model ini mengaplikasikan teori untuk menganalisis gerakan sosial serta menjelaskan bahwa organisasi formal merupakan *carrier of social movement*. Menurut McCarthy dan Mayer Zald, organisasi gerakan social merupakan suatu organisasi yang kompleks atau formal, dengan mengindentikkan tujuannya dengan pengutamaan dari gerakan sosial dan mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh suatu gerakan social.

2. Masyarakat

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya serta terikat dengan kebudayaan yang mereka anggap sama. Secara umum masyarakat memiliki beberapa macam diantaranya adalah masyarakat madani yang diartikan sebagai masyarakat kota atau masyarakat yang terikat oleh nilai, norma, dan hukum. Selain itu adapun masyarakat tradisional diartikan sebagai masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi oleh adat istiadat yang telah diterapkan sejak lama, dan beragam jenis masyarakat lainnya. Menurut Fredian Tonny Nasdian (2014) menggambarkan masyarakat sebagai suatu *community* (komunitas). Komunitas diartikan mengacu pada masyarakat di dusun, desa, kota, suku, ataupun bangsa.

Meskipun tiap komponen suatu golongan, baik golongan besar maupun kecil dalam menjalankan kehidupan yang kolektif. Sehingga dapat merasakan bahwa golongan tersebut dapat melengkapi kebutuhan hidup yang paling penting (Nasdian, 2014). Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, hal tersebut disebabkan karena adanya kondisi intern tanah air dan bangsa Indonesia yaitu kondisi geografis menjadi factor utama terbentuknya keanekaragaman suku bangsa yang tersebar, Bahasa yang digunakan, serta agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia sendiri. Multikulturalisme yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dapat bersedia menerima kelompok lain dan menganggap hal tersebut sebagai kesatuan tanpa memandang adanya perbedaan budaya, gender, bahasa, agama, ataupun etnis. Multikultural menjadi sebuah strategi dan integrasi sosial masyarakat.

M.J Herskovits mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu. Pengertian masyarakat menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin adalah sekelompok manusia terbesar yang memiliki suatu kebiasaan, tradisi, dan sikap persatuan yang tidak berbeda. Sedangkan menurut S.R. Steinmetz memberikan sebuah batasan terhadap pengertian masyarakat sebagai sekelompok manusia terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil dan memiliki hubungan erat dan teratur. Opini dari Maclver mendefinisikan masyarakat sebagai satu sistem cara kerja dari otoritas serta saling membantu yang meliputi tiap kelompok dan pembagian sosial lainnya, sistem pengawasan sikap manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah atau disebut jaringan relasi sosial.

Beni Ahmad Saebani mendefinisikan bahwa masyarakat terbentuk berawal dari hadirnya sekelompok individu yang cukup lama hidup dan bekerja sama. Dalam jangka waktu tersebut, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu Pertama, adaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggotanya. Kedua, timbulnya secara lambat, perasaan kelompok atau *lesprit de corps*. Kedua proses tersebut terbentuk tanpa disadari oleh semua anggota. Kelompok manusia yang dimaksud merupakan himpunan manusia sosial yang membentuk relasi sosial antara satu dan lainnya. Sebagai satu resiprositas, kelompok tersebut belum terorganisasikan secara sadar. Contohnya adalah *crowd*, *class*, *primary* dan *secondary group* serta organisasi besar (Saebani, 2012).

Masyarakat diartikan ke dalam beberapa macam kelompok diantaranya merupakan masyarakat modern dan masyarakat tradisional:

a. Masyarakat Modern

Pada dasarnya masyarakat modern merupakan kelompok individu yang sudah terikat pada hadirnya adat yang digunakan secara turun-temurun. Menurut (Amiruddin, 2010) masyarakat modern disebut sebagai individu yang memiliki solidaritas sosial organik. Solidaritas organik mengacu pada pembagian kerja sesuai dengan bidang atau kategori tertentu, sehingga antar individu terdapat saling ketergantungan satu dengan lainnya kemudian dapat memenuhi kepentingan bersama. Didalam ruang lingkup masyarakat tentunya diatur dengan norma atau

konstitusi yang berlaku bagi tiap anggota, Amiruddin (2010) menjelaskan bahwa konstitusi yang terdapat dalam masyarakat modern adalah hukum restruktif.

Hukum restruktif yang dimaksud ialah berfungsi dalam membangun kembali suatu kondisi seperti sediakala dan berguna dalam membentuk relasi yang hancur menjadi kondisi yang normal. Pada masyarakat modern jumlah penduduknya tidak menentu, mayoritas masyarakat bersifat individualis. Berdasarkan pekerjaan masyarakat modern lebih memiliki variasi dan sulit dalam mendapatkan pekerjaan, perubahan sosial terjadi secara cepat dan memiliki potensi menimbulkan konflik antar golongan muda dan tua. Berbeda dengan masyarakat tradisional, interaksi yang dilakukan oleh masyarakat modern cenderung disebabkan karena terdapat faktor kepentingan dari pada faktor pribadi. Penduduk migran yang menetap di kota mengakibatkan sebuah dampak negative, seperti pengangguran, naiknya angka kriminalitas, dan sebagainya (Soekanto & Sulistyowati, 2014).

b. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional menurut Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati adalah masyarakat yang memiliki hubungan erat antar individunya (Soekanto & Sulistyowati, 2014). Selain itu sistem kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat tradisional biasanya berkelompok dengan mengedepankan kekeluargaan, berbeda dengan masyarakat modern pembagian sistem kerja yang digunakan oleh masyarakat tradisional adalah berdasarkan pada usia, dan pembedaan jenis kelamin. Dalam masyarakat tradisional orang tua memiliki peran penting, contohnya orang akan selalu meminta nasihat kepada orang tua yang berada di ruang lingkup masyarakat tradisional apabila mengalami kesulitan, kemudian dalam merubah pandangan orang tua pada masyarakat tradisional dinilai cukup sulit karena mereka terpaku dengan adanya adat istiadat yang kental.

Berdasarkan hubungan pemerintah, penguasa, dan antar rakyat dalam masyarakat tradisional dinilai bersifat informal. Segala sesuatu

yang dialami oleh masyarakat tradisional cenderung dipecahkan secara musyawarah, perhatian masyarakat lebih mengutamakan pada keperluan untuk kehidupan. Masyarakat tradisional dalam hal beragama dikenal sangat taat dan kebanyakan dari mereka melakukan urbanisasi (perpindahan) ke kota karena perkotaan memiliki beberapa factor yang menarik perhatian masyarakat tradisional dalam bertransformasi. Apabila ditinjau berdasarkan pandangan hukum, karakteristik masyarakat tradisional berbeda dengan masyarakat modern. Menurut Amiruddin (2010) masyarakat tradisional memiliki solidaritas sosial mekanik. Hadirnya solidaritas mekanik dipengaruhi karena adanya kesamaan dan kesepakatan antar anggota masyarakat.

3. Lingkungan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan lingkungan sebagai sebuah daerah atau kawasan serta seluruh elemen yang terdapat didalamnya berkaitan dengan manusia dan berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia. Adapun definisi lingkungan menurut Manik (2016) ialah integritas ruang dengan seluruh kondisi, benda, makhluk hidup, dan kepribadiannya yang memengaruhi alam tersebut, kesinambungan hidup, kebahagiaan manusia dan makhluk hidup lainnya. Didalam lingkungan terdapat ekosistem sebagai unsur terpenting dan berpengaruh dalam membentuk keseimbangan, daya produksi lingkungan hidup. Aktivitas pelestarian lingkungan hidup berfungsi dalam upaya untuk membudidayakan daya dukung dan tampung lingkungan hidup.

Daya dukung menjadi upaya yang memiliki nilai penting dalam lingkungan, daya dukung tersebut berguna pada kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya serta menyeimbangkan keduanya. Sedangkan daya tampung berfungsi sebagai menyerap wujud, energi, serta elemen lain yang terdapat didalamnya. Selain itu, menurut Reda Rizal (2017) lingkungan ialah kesatuan ruang dengan semua benda, zat, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya terdapat manusia dan kepribadiannya yang dapat mempengaruhi alam tersebut, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Rizal, 2017). Menurut Natsir Abduh lingkungan merupakan perpaduan antara keadaan fisik yang melingkupi kondisi sumber daya alam seperti air, tanah, hewan, tanaman, dan sebagainya.

Prof. Otto Soemarwoto berargumen bahwa lingkungan merupakan jumlah semua benda serta kondisi yang ada didalam ruangan yang manusia tempati dan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Tingkah laku manusia merupakan bagian dari suatu lingkungan baik secara fisik maupun biologi, adapun lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Manusia bersama dengan makhluk hidup lainnya menempati suatu ruang tertentu, dalam ruangan tersebut terdapat benda mati seperti udara (gas), air (uap, cair, padat), tanah dan batu. Sebuah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dengan benda hidup atau tak hidup secara bersamaan atau berdampingan disebut dengan lingkungan (Soemarwoto, 2008).

Campbell membagi lingkungan kedalam dua garis besar yaitu lingkungan fisik dan lingkungan biotik. Pertama, lingkungan fisik didefinisikan sebagai benda mati dan kondisi fisik yang berada di sekitar individu tersebut yaitu seperti batu, air, iklim, angin, kelembapan dan sebagainya. Lingkungan fisik memiliki kaitan erat dengan makhluk hidup yang menempatnya, misalnya mineral yang dikandung oleh tanah dapat menentukan tingkat kesuburan tanaman yang akan tumbuh dan berkembang di atasnya. Kedua, lingkungan biotik merupakan segala makhluk hidup yang berada di sekitar individu seperti manusia, flora, dan fauna. Tiap-tiap unsur biotik tersebut dapat berinteraksi dengan biotik lainnya serta unsur dari lingkungan fisik lainnya (Campbell & dkk, 1983).

Berbeda dengan Campbell, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa lingkungan dibagi menjadi tiga kategori yaitu: (Soekanto & Sulistyowati, 2014)

- a. Lingkungan fisik, diartikan sebagai semua benda mati yang berada di sekeliling manusia.
- b. Lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia berupa organisme yang hidup (di samping manusia itu sendiri).
- c. Lingkungan social, terdiri dari sekelompok orang baik individual maupun kelompok yang berada disekitar manusia.

Lingkungan fisik, biologis, dan sosial pada dasarnya mengalami suatu transformasi. Dalam mempertahankan hidup, manusia perlu

melakukan sebuah penyesuaian (adaptasi). Adaptasi tersebut dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Adaptasi genetic

Berasal dari kata “*gen*”, setiap lingkungan hidup pada dasarnya menarik anggotanya untuk membentuk struktur tubuh yang spesifik dan bersifat secara turun-temurun serta permanen.

b. Adaptasi somatic

Adaptasi ini diartikan sebagai penyesuaian secara struktural atau fungsional yang bersifat tidak turun-temurun. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, manusia memiliki daya adaptasi yang relatif lebih besar.

Dalam membedakan antara organisme hidup dengan benda mati dapat ditemukan melalui sifat-sifat dasar dari kedua elemen tersebut. Organisme hidup bersifat dinamis, dapat tumbuh dan berkembang biak, kemudian mampu mendapatkan serta menyimpan energi, memiliki daya reaksi dan bervariasi. Sedangkan benda mati memiliki sifat yang statis, tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Berbeda dengan organisme hidup, elemen ini tidak mampu mendapatkan energi secara aktif, akan tetapi mampu mengeluarkan sampai habis. Selain itu, daya reaksi yang dimiliki oleh benda mati sangat kecil serta tidak bervariasi.

Hubungan organisme hidup lainnya dalam lingkungan dapat disadari ataupun tidak disadari. Biasanya hubungan tersebut dibedakan menjadi dua, yakni: (Soekanto & Sulistyowati, 2014)

a. Hubungan simbiosis, merupakan hubungan timbal balik yang dilakukan antara organisme-organisme hidup yang berbeda macamnya. Bentuk hubungan tersebut ialah:

- 1) Parasitisme, hanya salah satu pihak yang beruntung dan pihak lainnya dirugikan
- 2) Komensalisme, satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan

3) Mutualisme, hubungan yang dijalin saling menguntungkan.

- b. Hubungan sosial yang merupakan hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup yang sama macamnya. Bentuk tersebut adalah kompetisi, dan kooperasi.

Lingkungan terdiri dari dua elemen pembentuk yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik berkaitan dengan semua lingkungan yang terdiri dari elemen-elemen makhluk hidup di permukaan hidup, contoh dari lingkungan biotik adalah flora, fauna, manusia. Elemen lingkungan biotik berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga tingkatan ialah produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan lingkungan abiotik terdiri dari seluruh benda mati yang terdapat di permukaan bumi yang memiliki manfaat serta berpengaruh dalam melengkapi kehidupan manusia dan makhluk hidup yang ada. Misalnya, tanah, air, udara, suhu dan sinar matahari (Abduh, 2018).

4. Gerakan Sosial dalam Perspektif Islam

Islam memandang gerakan sosial sebagai sebuah refleksi dan reaksi atas dinamika sosial yang terdapat di kehidupan masyarakat. Sehingga tindakan tersebut dinilai mengevaluasi serta menyarankan sebuah solusi dengan mengutamakan nilai-nilai keyakinan serta aturan yang berlandaskan pada agama Islam. Pengaruh agama mempunyai horizon yang luas, hal tersebut menjadi sumber nilai untuk membentuk kepribadian, pandangan bagi gerakan sosial dan perekat hubungan sosial. Islam merupakan agama damai yang mampu mengaitkan secara normatif dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun dalam praktik dan realitas sejarah. Agama Islam memiliki perubahan menjadi sebuah agama dan pandangan yang mampu menjadi spirit yang menjelma menjadi sebuah gerakan sosial, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya (Nurdin & dkk, 2018).

Manusia sebagai Khalifah di muka bumi diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga lingkungan dari hal-hal yang dapat merusaknya. Hadirnya gerakan sosial yang berfokus pada lingkungan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dapat merusak lingkungan dan merugikan makhluk hidup lainnya serta memperjuangkan hak masyarakat dengan melakukan berbagai upaya yang terbaik supaya masyarakat tidak dirugikan. Hal tersebut berkaitan dengan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan

terkait dengan Amar Makruf Nahi Munkar terdapat pada QS. Ali-Imran/3 : 104
Allah SWT berfirman:

بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَىٰ يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ
الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأَوْلِيَاكَ ۖ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Allah SWT telah berfirman kepada umatnya untuk berbuat kebajikan dan mencegah kemunkaran, maka ayat tersebut berkaitan dengan hadirnya Gerbang Nusa sebagai wadah aspirasi untuk masyarakat dan bergerak dalam mencegah kerugian yang dialami oleh masyarakat. Terbentuknya Gerakan tersebut berlandaskan pada visi dan misi yang dijalankan dalam membentuk masyarakat yang idealis dan memiliki jiwa berkeadilan. Adapun hal lainnya seperti melaksanakan kegiatan sosial kemanusiaan, peduli terhadap lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

B. Teori Mobilisasi Sumber Daya McCarthy dan Mayer Zald

1. Konsep Teori Mobilisasi Sumber Daya McCarthy dan Mayer Zald

Gerakan sosial adalah upaya yang digunakan dalam menciptakan suatu perubahan. Gerakan sosial menurut McCarthy dan Mayer Zald (1977) merupakan seperangkat pandangan dan keyakinan (*opinion and belief*) dalam suatu golongan masyarakat yang mampu mempresentasikan pengutamaan untuk transformasi pada sebagian unsur-unsur struktur sosial dan perputaran keuntungan dalam sistem masyarakat yang lebih besar. Pendekatan yang digunakan oleh John McCarthy dan Mayer Zald dalam membahas mengenai gerakan sosial ini adalah *resource mobilization theory* (Teori Mobilisasi Sumber Daya), pendekatan ini digunakan karena memberikan perhatian khusus dan lebih luas pada fundamental faktor peran organisasi dalam melakukan suatu gerakan sosial.

Terkait dalam upaya menganalisis serta memahami gerakan sosial dalam bidang lingkungan dapat dikaji melalui teori mobilisasi sumber daya (*Resource Mobilization Theory*) yang dikembangkan oleh McCarthy dan Mayer Zald. Teori mobilisasi sumber daya (RMT) memusatkan pada proses memobilisasi sumber

daya yang dimiliki, aksi lembaga dan transisi politik yang dapat membentuk gerakan sosial dapat mengintensifkan kemampuan struktural yang dimiliki oleh suatu gerakan sosial dalam mencapai tujuan yang telah dibentuk. Teori mobilisasi sumber daya mengkaji peran aktor yang terlibat dalam suatu gerakan sosial dengan memaksimalkan pemilihan strategi yang dipilih dalam menjalankan hubungan dengan lingkungan disekitarnya dalam mewujudkan tujuan-tujuan dari dibentuknya gerakan sosial tersebut. Teori yang digunakan oleh peneliti diimplementasikan pada tahap analisis karena memiliki kaitan dengan objek dalam menganalisis sebuah kasus yang akan diulas secara sempurna.

Keterlibatan dalam suatu gerakan sosial dinilai bukan menjadi sebuah dampak yang berasal dari keadaan dalam perkembangan psikologis, tetapi sebagai reaksi sebagian proses pengambilan keputusan yang rasional (rasionalitas instrumental) dengan mempertimbangkan sebuah *cost* dan *benefits*. Proses pergerakan sosial terbagi menjadi empat tahapan ialah *emergence* (tahap kemunculan), *coalescence* (tahap penggabungan), *bureaucratization* (tahap birokratisasi), dan *decline* (tahap kemunduran). Keempat tahap tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. *Emergence* (Tahap Kemunculan)

Munculnya suatu gerakan sosial didorong dengan adanya reaksi terhadap suatu permasalahan atau kesadaran yang dipimpin oleh kelompok kecil mengenai isu-isu tertentu.

b. *Coalescence* (Tahap Penggabungan)

Setelah tahap kemunculan, gerakan sosial digunakan dalam mengoptimalkan sebuah strategi yang digunakan untuk menuju publik. Pemimpin dalam gerakan sosial harus bisa menentukan sebuah strategi, membentuk moral, dan menerima anggota baru untuk bergabung dalam gerakan sosial. Dalam proses ini, gerakan sosial berkesinambungan dalam suatu tindakan kolektif yang digunakan dalam menarik perhatian media massa dan perhatian masyarakat yang dapat membentuk sebuah konfederasi dengan kelompok lainnya guna mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan.

c. *Bureaucratization* (Tahap Birokratisasi)

Gerakan sosial yang hadir di masyarakat harus memiliki sifat birokrasi (otoritas). Sehingga, gerakan yang terbentuk dapat berhasil karena adanya pemimpin dan staf yang mengayomi sumber daya yang dimiliki.

d. *Decline* (Tahap Kemunduran)

Kemunduran suatu gerakan sosial disebabkan oleh 4 (empat) alasan yaitu sebagai berikut:

- a) Menganggap suatu tujuan telah berhasil dicapai
- b) Terdapat pertentangan didalam sebuah organisasi
- c) Adanya kooptasi atas para pelopor gerakan
- d) Terdapat tekanan yang berasal dari eksternal

McCarthy mendefinisikan beberapa elemen yang dibutuhkan dalam gerakan serta bagaimana proses dari elemen tersebut, khususnya sumber daya di koordinasi kemudian digunakan dalam gerakan tersebut. McCarthy menjelaskan gerakan sosial dapat berkembang sebagai hasil dari kekuatan lingkungan sekitar, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal yang disinggung dalam pembahasan ini ialah kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, ukuran komunitas, dan tingkat dari lembaga internal itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal dalam pembahasan ini terdiri dari tingkat tekanan dari masyarakat, rasa simpati eksternal, dan kekuatan komunitas politik.

Terdapat 5 (lima) tipe sumber daya dalam suatu gerakan sosial: Pertama, sumber daya moral mencakup legitimasi, solidaritas antar individu, rasa simpati, dan dukungan yang berasal dari individu atau tokoh terkenal. Kedua, sumber daya kultural ialah konstruksi dan hasil budaya seperti seperangkat hipotesis dan pandangan khusus secara luas, walaupun tidak menyeluruh. Kelompok sumber daya kultural mencakup sebuah hasil dari gerakan atau hadirnya isu penting seperti musik, referensi, majalah, video, dan sebagainya. Ketiga, sumber daya institusi sosial yang mencakup organisasi sosial yang disengaja dan proporsional. Lembaga sosial yang disengaja ialah lembaga yang sengaja dibentuk secara khusus dalam meraih tujuan dari gerakan sosial tersebut.

Sedangkan lembaga proporsional sengaja dibentuk bukan untuk meraih suatu tujuan dari gerakan sosial, akan tetapi peran utama gerakan tersebut memungkinkan agar mendapatkan kesempatan sumber daya melalui lembaga ini. Keempat, sumber daya manusia lebih jelas dan mudah untuk diberikan penghargaan atau pujian jika dibandingkan dengan ketiga sumber daya yang telah dijelaskan. Lapisan sumber daya manusia mencakup tenaga kerja, kreativitas, dan kemahiran. Kelima, sumber daya material yang mengasosiasi antara modal fisik dan finansial yang mencakup keuangan, hak milik, peralatan dan sebagainya (Edwards dan McCarthy 2016).

John D. McCarthy dan Mayer Zald menjelaskan bahwa struktur mobilisasi ialah beberapa cara yang dilakukan oleh komunitas gerakan sosial bersatu dalam tindakan kolektif, termasuk strategi gerakan sosial dan bentuk lembaga gerakan sosial. Teori mobilisasi sumber daya menekankan pada tiap proses sosial yang mungkin hadir dalam tercapainya sebuah tujuan di suatu gerakan sosial. Teori ini beranggapan bahwa dalam ruang lingkup masyarakat mengalami ketidakpuasan sehingga gerakan sosial tersebut dapat terbentuk. Gerakan sosial mulai bergerak ketika terdapat pelaku yang memiliki kriteria berbeda, baik secara individu, kelompok informal, atau lembaga formal yang dapat berintegritas dengan menggabungkan identitas kolektifnya berperan sebagai bagian yang terdapat dalam sisi yang sama terhadap suatu hubungan konfliktual, baik melalui komunikasi ataupun tindakan kolektif bersama (Triwibowo, 2006).

Anggota yang bergabung dalam suatu gerakan sosial bertindak bukan karena adanya kepentingan yang dapat menguntungkan kelas mereka, tetapi karena adanya keinginan berjuang demi mencapai tujuan dan berusaha demi kepentingan kemanusiaan (Singh, 2010). Teori mobilisasi memfokuskan terhadap pentingnya elemen-elemen struktural seperti kesiapan sumber daya untuk keadaan kolektif dan kedudukan dalam sebuah jaringan sosial, kemudian mengutamakan objektivitas mengenai kontribusi dalam gerakan sosial. Para individu yang terlibat atau berkontribusi dalam suatu gerakan sosial harus menetapkan sebuah keputusan untuk ikut serta atau tidak, karena hal tersebut

berpengaruh terhadap keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh tiap individu yang bergabung kedalam suatu gerakan sosial (Sukmana, 2016)

McCarthy dan Mayer Zald serta Canel memfokuskan bahwa gerakan sosial harus membentuk hal-hal yang berkaitan dengan elemen yang berada di luar gerakan tersebut seperti menggerakkan kelompok yang mengakomodasi gerakan sosial yang dijalankan untuk menjadi wadah dalam mencapai tujuan yang dibentuk dalam gerakan sosial yang dijalankan (McCarthy & Zald, 1977). Darmawan Tribowo mengkaji pengertian organisasi gerakan sosial yang dicetuskan oleh McCarthy dan Mayer Zald memberi kesempatan supaya dapat mengklasifikasikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai gerakan sosial. Sehingga, dalam menganalisa keberhasilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mencapai suatu tujuan dapat menggunakan teori mobilisasi sumber daya.

Selain itu menurut J.Q Wilson gerakan sosial sebagai organisasi tidak dapat hanya mengandalkan sumber daya saja dalam mencapai sebuah tujuan, tetapi harus lebih dahulu memenuhi kepentingan organisasinya. Meskipun McCarthy dan Mayer N. Zald menafsirkan organisasi gerakan sosial harus dapat mendahului dalam memenuhi kepentingan organisasinya, McCarthy dan Zald juga memfokuskan bahwa tujuan gerakan sosial dapat tercapai dengan pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kepentingan organisasi harus seminimal mungkin, supaya dapat memanfaatkan jauh lebih banyak sumber daya untuk dapat mencapai suatu tujuan gerakan sosial yang dilakukan oleh organisasi gerakan sosial tersebut (McCarthy & Zald, 1977).

Keberhasilan sebuah lembaga masyarakat dapat dimonitor melalui *Resource Mobilization Theory*, menurut Jenkins berhasilnya pencapaian suatu gerakan sosial ditentukan melalui strategi yang digunakan dalam bertindak yaitu dengan memobilisasi sumber daya yang dimiliki. Teori mobilisasi sumber daya (*Resource Mobilization Theory*) memiliki dua pendekatan yang membahas terkait dengan pengembangan strategi serta berinteraksi dengan sekitarnya guna mencapai sebuah kepentingan yang ingin dituju oleh aktor-aktor yang terlibat dalam gerakan sosial. Pendekatan tersebut terdiri dari *political interactive model* yang dikaji oleh Tilly, Oberschall, MC Adam, dan Gamson. Kemudian

yang kedua *organizational-entrepreneurial* yang dikaji oleh McCarthy dan Mayer Zald.

Political interactive model merupakan pendekatan yang dikaji oleh Tilly, Oberschall, MC Adam, dan Gamson (2002). Fokus dari pendekatan *political interactive* model adalah mengutamakan transformasi struktur kesempatan untuk tindakan kolektif, dan hubungan horizontal yang telah dibangun dan tersusun berdasarkan dengan kelompok yang tertindas (*aggrieved groups*), kelompok tertindas berperan sebagai penentu sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh gerakan sosial tersebut. Pendekatan *political interactive* model dapat membentuk hubungan antara gerakan sosial dengan Negara serta sistem politik sebagai salah satu unsur yang dominan dalam menentukan sebuah keberhasilan suatu gerakan sosial.

Pendekatan kedua adalah *organization-entrepreneurial* yang dikaji oleh McCarthy dan Mayer Zald pada tahun 1977. Pendekatan *organization-entrepreneurial* menganggap bahwa antusiasme organisasi, kepemimpinan serta memobilisasi sumber daya menjadi faktor yang lebih relevan dalam proses mencapai suatu keberhasilan dalam gerakan sosial. Pendekatan ini menerapkan teori pengembangan organisasi dalam menguraikan gerakan sosial dan menjelaskan mengenai organisasi formal termasuk *carriers of social movement* (pembawa gerakan social). McCarthy dan Zald berpendapat bahwa organisasi gerakan sosial termasuk kedalam organisasi yang kompleks, dan menonjolkan tujuan dengan pengutamaan dari suatu gerakan sosial dalam meraih pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

Pendekatan *organization-entrepreneurial* yang dikaji oleh McCarthy dan Mayer Zald memberi ruang bagi organisasi non pemerintah (*Non Governmental Organization*) untuk menjadi bagian dari lembaga gerakan sosial. Diantara kasus-kasus yang terjadi terdapat gejala menarik yang membuktikan bahwa seiring berjalannya waktu gerakan sosial akan berubah menjadi bentuk tindakan yang lebih terlembaga dengan mengalami tingkat dampak yang rendah dalam menanggung ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu gerakan sosial dalam menyempurnakan proses-proses keberhasilan yang ingin dicapai dengan mengedepankan tujuan yang telah

dibentuk. Dalam kerangka ini ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) bukan dilihat sebagai sebuah perubahan, akan tetapi sebagai suatu modifikasi baru untuk tindakan selanjutnya dalam gerakan sosial.

Teori Mobilisasi Sumber Daya merupakan respon terhadap Teori Perilaku Kolektif. Munculnya Teori Mobilisasi Sumber Daya menandai bahwa mulainya kajian gerakan sosial modern. Teori Mobilisasi Sumber Daya muncul pada tahun 1977, gerakan sosial dinilai sebagai tindakan langsung pada keluhan serta kekecewaan. Menurut McCarthy dan Mayer Zald, dalam keadaan yang mengakomodasi suatu perubahan setiap nilai dalam tingkah laku nyata serta menekan pada keadaan yang dapat mempermudah organisasi gerakan sosial dalam bermufakat ataupun berjuang. Teori Mobilisasi Sumber Daya mendeskripsikan dua perspektif. Pertama, berhubungan dengan sumber daya fisik, dan non fisik yang dimiliki oleh sebuah gerakan seperti pengetahuan, keahlian, atau hubungan tertentu dalam usaha memperoleh tujuan dari gerakan tersebut.

Aspek sumber daya mampu didominasi dengan baik secara individu maupun bersamaan. Kedua, mobilisasi adalah sebuah mekanisme yang memiliki keterkaitan dengan tokohnya dengan cara menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam meraih sebuah tujuan melalui adanya gerakan. Gabungan dari aspek yang telah dijelaskan saling berintegritas dalam kedudukannya, sehingga hal ini dibutuhkan dalam usaha untuk mencapai tujuan.

Penelitian ini memfokuskan pada gerakan sosial yang mudah dipahami berdasarkan empat sudut pandang yang hadir karena disebabkan oleh rasa ketidakpuasan para aktor gerakan sosial, sumber daya yang dimiliki oleh suatu gerakan sosial, peluang politik yang dapat berubah di ruang lingkup gerakan sosial, dan pemulihan yang disebabkan dengan adanya permasalahan-permasalahan sosial (Klandermans, 2005). Oleh karena itu, dalam penelitian ini teori mobilisasi sumber daya yang dikembangkan oleh McCarthy dan Mayer Zald pada tahun 1977 akan digunakan sebagai referensi utama untuk menganalisis permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Terutama dalam mengkaji mobilisasi dalam gerakan sosial dengan fokus pada bidang lingkungan.

2. Asumsi Dasar Teori

Teori mobilisasi sumber daya memiliki 4 (empat) asumsi yang dapat menggambarkan mengenai munculnya suatu Gerakan sosial yaitu: Pertama, peserta gerakan sosial tidak berubah dari individu rasional menjadi emosional (irasional), akan tetapi mereka akan tetap menjadi aktor rasional. Individu bergabung dalam suatu gerakan sosial melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang rasional. Kedua, suatu kemarahan dan frustrasi yang disebabkan oleh ketegangan struktural tidak serta merta mendorong individu terlibat dalam suatu gerakan sosial, kecuali adanya sarana yang dapat memungkinkan mereka dapat terlibat dalam gerakan sosial, sarana tersebut merupakan sumber daya baik *tangible* (berwujud) maupun *intangible* (tidak berwujud).

Ketiga, pada proses pengambilan sebuah keputusan untuk dapat terlibat dalam gerakan sosial, aktor rasional dapat mempertimbangkan *cost* (kerugian) dan *benefits* (keuntungan) yang akan mereka dapatkan dan mereka akan menentukan atau memilih strategi yang paling efektif untuk digunakan dalam mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Keempat, individu yang berasal dari kelas sosial sama akan memiliki suatu kepentingan yang sama, diantaranya dapat memunculkan suatu kepentingan politik yang sama, sehingga mereka dapat menjalin keterkaitan antara satu dengan lainnya dalam mewujudkan tujuan melalui sebuah gerakan sosial (Edwards, 2014).

3. Istilah-Istilah Kunci Teori

Konsep kunci teori mobilisasi sumber daya mengarah kepada istilah sumber daya. Sumber daya yang dibahas dalam teori ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama, Sumber Daya *Tangible* (berwujud) seperti uang, peserta, dan infrastruktur komunikasi. Kedua, Sumber Daya *Intangible* (tidak berwujud) seperti keterampilan, dan dukungan publik. Selain itu, dalam teori mobilisasi sumber daya terdapat istilah-istilah kunci teori lainnya seperti *Cost* (kerugian), *Benefits* (keuntungan), Rasionalitas Instrumental (menemukan sarana yang paling efektif untuk memenuhi keinginan atau kepentingan dengan mempertimbangkan *cost* (kerugian) dan *benefits* (keuntungan), *Public Goods* (sarana dan prasarana), *Private Goods* (sarana dan prasarana pribadi).

Free Ride (orang-orang yang dapat menikmati *public goods* meskipun mereka tidak ikut memperjuangkannya), *Social Sanction* (tekanan dan sanksi social kepada individu yang tidak terlibat dalam gerakan sosial untuk memperjuangkan *public goods*), *Selective Incentive* (keuntungan baik material maupun non material bagi individu yang terlibat dalam gerakan sosial untuk memperjuangkan *public goods*), dan *Critical Mass* (individu-individu dengan kepentingan diri yang tinggi serta memiliki sumber daya yang berani melawan tantangan dan dapat berkomunikasi serta menemukan satu sama lain).

4. Implementasi Teori

Teori mobilisasi sumber daya berargumen bahwa individu memutuskan untuk bergabung dengan sebuah gerakan sosial atau tidak, berdasarkan proses rasional (melalui mekanisme pengambilan keputusan) oleh sebab itu gerakan sosial dinilai sebagai aksi kolektif yang rasional. Individu memiliki kecenderungan, keinginan, atau tujuan tertentu dan memiliki strategi dalam memenuhi keinginannya, dengan menimbang strategi apa yang paling efektif untuk digunakan dalam memenuhi keinginannya. Serta dalam proses pemilihan strategi, individu perlu memikirkan keuntungan dan kerugian, karena keputusan akan tindakan yang diambil oleh individu akan dipengaruhi oleh berubahnya keuntungan dan kerugian dalam lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, hal yang diperlukan untuk diketahui adalah sumber daya yang dimiliki.

Implementasi teori mobilisasi sumber daya terhadap penelitian ini adalah hadirnya Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) sebagai wadah bagi masyarakat yang bertempat tinggal di area TPST Bantargebang. Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) memiliki tujuan atau keinginan dalam memaksimalkan sumber daya manusia yang masih belum terpenuhi akan hak-hak yang seharusnya bisa didapatkan oleh mereka. Selain itu, lembaga kemasyarakatan tersebut juga menimbang *cost* (kerugian) dan *benefits* (keuntungan) yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Sumber daya manusia di area TPST Bantargebang dinilai kurang memiliki edukasi dalam memperjuangkan hak hidup yang dimiliki termasuk dalam menikmati *public goods*.

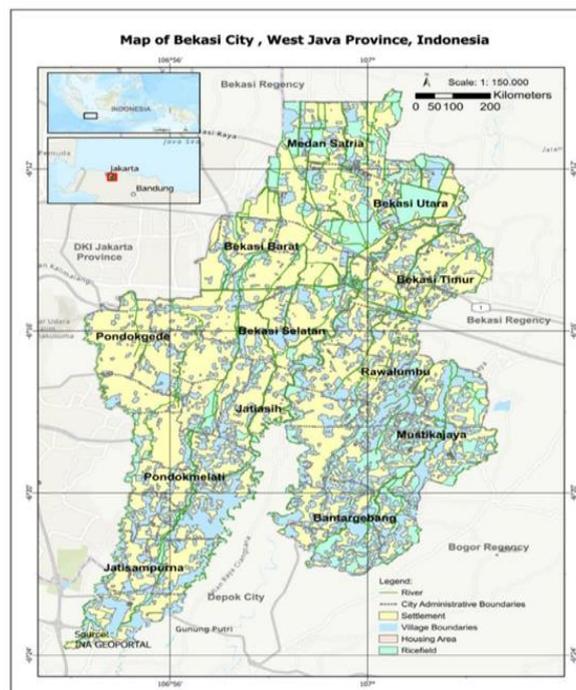
BAB III

GERAKAN MASYARAKAT BANTARGEBAK

A. Gambaran Umum Lokasi Gerakan Masyarakat Bantargebang

1. Kondisi Geografis

Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Bantargebang



Sumber:

<https://www.mdpi.com/2071-1050/14/21/14403>

Secara geografi Kecamatan Bantargebang berada pada posisi $106^{\circ}48'28''$ - $107^{\circ}27'29''$ bujur timur dan $6^{\circ}10'6''$ - $6^{\circ}30'6''$ lintang selatan, dengan memiliki ketinggian 51 m di atas permukaan laut. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Bantargebang terbagi menjadi 4 (empat) kelurahan. Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kecamatan Bantargebang adalah:

Tabel 1. Batas Wilayah Kecamatan Bantargebang

Batas Wilayah	Daerah
Timur	Kecamatan Setu dan Kecamatan Mustikajaya
Utara	Kecamatan Rawalumbu
Selatan	Kabupaten Bogor dan Kecamatan Cileungsi
Barat	Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Bantargebang 2022

Pada tahun 2022 wilayah administrasi Kecamatan Bantargebang memiliki luas daratan seluas 19,24 km². Kecamatan Bantargebang merupakan salah satu wilayah dari 12 kecamatan yang terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Bantargebang memiliki 4 kelurahan pada tahun 2018-2022 yang meliputi:

Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan Bantargebang

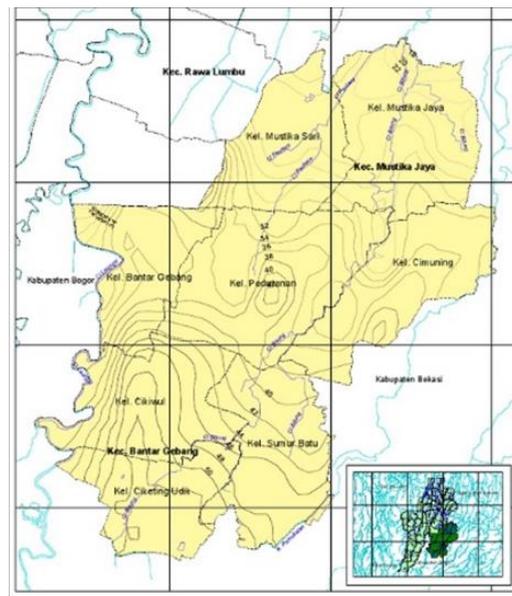
Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
Bantargebang	406,244
Ciketing Udik	568,955
Cikiwul	525,351
Sumur Batu	343,340

Sumber: BPS Kota Bekasi 2023

Berdasarkan tabel 2 wilayah yang memiliki luas terbesar di Kecamatan Bantargebang adalah wilayah Kelurahan Ciketing Udik dengan luas 568,955 Ha. Lokasi Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) terletak di Jalan Pangkalan 1B RT. 03 RW. 05 No. 119 Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

2. Kondisi Topografi, dan Geomorfologi

Gambar 2. Peta Topografi Kecamatan Bantargebang



Peta Topografi Kecamatan Bantar Gebang
(Sumber: RTRW Kota Bekasi 2010-2030)

Sumber:

<https://www.scribd.com/doc/266466284/Peta-Topografi-Kecamatan-Bantar-Gebang>

Kondisi topografi Kecamatan Bantargebang memiliki ketinggian 25 meter hingga 100 meter di atas permukaan air laut. Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah menyebabkan pada beberapa daerah sulit untuk membuang air hujan dengan cepat, sehingga menyebabkan terjadinya genangan air. Adapun penjelasan terkait dengan tinggi wilayah dan letak geografis di Kecamatan Bantargebang adalah:

Tabel 3. Tinggi Wilayah dan Letak Geografis Kecamatan Bantargebang

Kelurahan	Garis Lintang	Garis Bujur	Ketinggian
Ciketing Udik	6°34'48"	106°98'72"	100

Sumur Batu	6°20'37"	107°00'16"	58
Cikiwul	6°20'31"	106°58'47"	110
Bantargebang	6°19'31"	106°58'58"	90

Sumber: BPS Kecamatan Bantargebang 2020

Secara geomorfologi, kondisi tanah dapat membantu dalam menentukan wilayah yang cocok untuk digunakan sebagai pemukiman dengan mempertimbangkan beberapa aspek fisik yang meliputi kedalaman efektif, tekstur tanah, dan jenis tanah. Kedalaman yang dinilai efektif sebagian besar diatas 91 sentimeter (cm), dengan jenis tanah latosol dan alluvial, serta tekstur tanah didominasi sedang halus.

3. Kondisi Demografis

a. Penduduk Berdasarkan Laju Pertumbuhan

Penduduk Kecamatan Bantargebang berdasarkan data agregat kependudukan tahun 2022 semester 1 dari Dirjen Dukcapil Kemendagri sebanyak 109.443 jiwa yang terdiri atas 55.777 jiwa penduduk laki-laki dan 53.666 jiwa penduduk perempuan. Adapun penjabaran terkait dengan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin menurut kelurahan di Kecamatan Bantargebang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Kelurahan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per Km²)	Rasio Jenis Kelamin
Ciketing Udik	104,82	0,180752	105
Sumur Batu	102,13	0,211474	102
Cikiwul	104,77	0,194764	105
Bantargebang	103,89	0,131084	104
Total	103,93	...	104

Sumber: BPS Kota Bekasi Tahun 2021

Menurut tabel 4 besarnya angka rasio jenis kelamin pada tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bantargebang setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal tersebut disebabkan karena banyak masyarakat yang bermigrasi ke wilayah Kecamatan Bantargebang untuk mencari pekerjaan. Kecamatan Bantargebang menjadi wilayah yang banyak dipilih oleh masyarakat untuk bermigrasi karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi yakni merupakan Kawasan industri. Adapun penjelasan terkait keluar masuknya masyarakat di Kecamatan Bantargebang yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Mutasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa/ Kelurahan	Kepergian	Kedatangan
Ciketing Udik	414	612
Sumur Batu	210	746
Cikiwul	682	569
Bantargebang	903	587
Jumlah	2,209	2,514

Sumber: Kecamatan Bantargebang

b. Penduduk Berdasarkan Komposisi Usia

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi pada tahun 2021, rasio penduduk berdasarkan umur menurut Kecamatan Bantargebang adalah:

Tabel 6. Rasio Penduduk Kecamatan Bantargebang Berdasarkan Umur

Kelompok Umur (Age Groups)	Jenis Kelamin (Sex)		
	Laki-laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah (Total)
0-4	4,735	4,471	9,206
5-9	5,482	4,965	10,447
10-14	5,342	4,985	10,327
15-19	4,403	3,999	8,402

20-24	4,429	4,371	8,800
25-29	4,361	4,617	8,978
30-34	4,642	4,729	9,371
35-39	4,985	5,038	10,023
40-44	5,136	5,165	10,301
45-49	4,361	4,444	8,805
50-54	3,372	2,777	6,149
55-59	1,942	1,591	3,533
60-64	1,225	1,096	2,321
65-69	663	595	1,258
70-74	379	398	777
75+	320	425	745
Total	55,777	53,666	109,443

Sumber: BPS Kecamatan Bantargebang Tahun 2021

Berdasarkan tabel 6 kelompok usia menengah (30-34 tahun) memiliki jumlah penduduk tertinggi dengan jumlah 9,371 jiwa, sedangkan kelompok usia lanjut (>75 tahun) memiliki jumlah penduduk terkecil dengan jumlah 745 jiwa.

c. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada tahun 2021 menurut data laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelurahan	Penduduk (Population)		
	Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah (Total)
Ciketing Udik	12,342	11,775	24,117
Sumur Batu	12,022	11,771	23,793
Cikiwul	14,355	13,701	28,506

Bantargebang	17,058	16,419	33,477
Total	55,777	53,666	109,443

Sumber: BPS Kecamatan Bantargebang 2021

Berdasarkan tabel 7 diatas jumlah penduduk (populasi) terbanyak berada di Kelurahan Bantargebang dengan jumlah 33,477 jiwa dan yang terkecil berada di wilayah Kelurahan Sumur Batu dengan jumlah 23,793 jiwa. Secara keseluruhan dalam Kecamatan Bantargebang populasi terbanyak didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 55,777 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 53,666 jiwa.

d. Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan data Dinas Penduduk Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi pada tahun 2021, jumlah penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Bantargebang adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	103,404
2.	Kristen	3,186
3.	Katholik	893
4.	Hindu	38
5.	Budha	324
6.	Konghucu	4
7.	Kepercayaan	21
Total		107,870

Sumber: Disdukcapil Kota Bekasi Tahun 2021

Berdasarkan tabel 8 mayoritas penduduk di Kelurahan Bantargebang, Kota Bekasi menganut agama Islam dengan jumlah 103,404 jiwa. Sedangkan penganut agama terkecil adalah Konghucu dengan jumlah 4 jiwa.

e. Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan data Laporan Kependudukan Disdukcapil Kota Bekasi pada tahun 2021, kondisi kependudukan berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut

Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Tidak/Belum Sekolah	23,658
2.	Tidak/Belum Tamat SD	12,294
3.	Tamat SD	12,811
4.	Tamat SLTP	13,935
5.	Tamat SLTA	41,101
6.	D1/D2	231
7.	D3/Sarjana Muda	1,216
8.	D4/S1	2,502
9.	S2	115
10.	S3	7
Total		107,870

Sumber: Disdukcapil Kota Bekasi Tahun 2021

Keterangan pada tabel 9 menunjukkan beberapa kriteria dalam pendidikan diantaranya tidak sekolah, tidak tamat SD, SD, SLTP, SLTA, tamat Akademi dan Sarjana berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi pada tahun 2021. Mayoritas penduduk di Kecamatan Bantargebang kurang peduli terhadap pentingnya sebuah pendidikan, tetapi jika ditinjau berdasarkan tabel diatas beberapa diantaranya peduli akan pendidikan sehingga dapat menempuh gelar sarjana.

4. Profil Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Bantargebang

Lembaga kemasyarakatan Gerakan Masyarakat Bantargebang (Gerbang) terletak di Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Pada saat ini, Kelurahan Bantargebang di pimpin oleh Bapak Satim Susanto SH, M.Si. Adapun beberapa bagian struktur organisasi kepegawaian Kelurahan Bantargebang, Kota Bekasi sebagai berikut: Lurah Bantargebang, Sekretaris, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial.

1) Sosial dan Kesejahteraan Kecamatan Bantargebang

a) Fasilitas Sekolah

Pada tahun 2021 hingga 2022 jumlah sekolah dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Bantargebang sebanyak 47 sekolah, sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 4 sekolah. Untuk sekolah yang berada dibawah Kementerian Agama sebanyak 8 sekolah. Adapun data sekolah tersebut sebagai berikut:

Tabel 10. Fasilitas Sekolah di Kecamatan Bantargebang (2019-2021)

No.	Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021
1.	Sekolah Dasar (SD)	29	29	29
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	5	4	4
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	9	12	11
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	2	3	3
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3	3	3
6.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	4	4	4

7.	Madrasah Aliyah (MA)	1	1	1
8.	Akademi/Perguruan Tinggi	1	1	1

Sumber: Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019-2021

b) Fasilitas Kesehatan

Pada tahun 2021 fasilitas pelayanan Kesehatan yang terdapat di Kecamatan Bantargebang sebagai berikut:

Tabel 11. Fasilitas Kesehatan Kecamatan Bantargebang (2019-2021)

No.	Jenis Sarana Kesehatan	2019	2020	2021
1.	Rumah Sakit	1	2	2
2.	Rumah Sakit Bersalin	0	0	0
3.	Poli Klinik	11	12	11
4.	Puskesmas Rawat Inap	0	0	0
5.	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	1	3	3
6.	Apotek	7	8	9

Sumber: Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019-2021

c) Fasilitas Peribadatan

Pada tahun 2021 jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Bantargebang terdapat 196 buah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 12. Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Bantargebang

No.	Kelurahan	Tempat Peribadatan	
		Masjid	Mushola
1.	Ciketing Udik	11	33
2.	Sumur Batu	13	35
3.	Cikiwul	9	38

4.	Bantargebang	8	48
Total		41	154

Sumber: BPS Kecamatan Bantargebang 2021

2) Pertanian di Kecamatan Bantargebang

a) Produksi Tanaman Sayuran

Produksi tanaman sayuran semusim terbesar pada tahun 2021 di Kecamatan Bantargebang adalah bayam sebanyak 1.940 kuintal. Berikut produksi tanaman sayuran di Kecamatan Bantargebang:

Tabel 13. Produksi Tanaman Sayuran (Kuintal)

No.	Jenis Sayuran	2018	2019	2020	2021
1.	Cabai Besar	82	-	-	-
2.	Cabai Rawit	16	200	-	-
3.	Kangkung	3,220	2,100	1,680	1,820
4.	Bayam	3,430	2,850	1,950	1,940
5.	Petai	11	23	24	24
6.	Melinjo	124	84	179	209

Sumber: Statistik Pertanian Hortikultural

b) Produksi Buah-buahan Semusim

Produksi tanaman sayuran semusim terbesar pada tahun 2021 di Kecamatan Bantargebang adalah rambutan sebanyak 4.040 kuintal. Berikut produksi buah-buahan di Kecamatan Bantargebang:

Tabel 14. Produksi Buah-buahan Semusim (Kuintal)

No.	Jenis Buah	2018	2019	2020	2021
1.	Mangga	305	405	650	16
2.	Papaya	267	248	224	205
3.	Pisang	1,886	2,487	2,456	2,705

4.	Rambutan	-	-	597	4,040
5.	Belimbing	140	409	326	404

Sumber: Statistik Pertanian Hortikultural

c) Produksi Tanaman Biofarmaka

Produksi tanaman biofarmaka terbesar pada tahun 2020 di Kecamatan Bantargebang adalah jahe sebanyak 6.000 Kg. Adapun produksi tanaman biofarmaka di Kecamatan Bantargebang sebagai berikut:

Tabel 15. Produksi Tanaman Biofarmaka (Kg)

No.	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
1.	Jahe	48,000	33,000	6,000
2.	Kencur	28,500	16,000	3,000
3.	Kunyit	30,750	14,250	3,000
4.	Laos	37,000	70,000	3,000
5.	Lempuyang	31,215	8,210	-
6.	Temulawak	13,350	12,300	-

Sumber: Statistik Pertanian Hortikultural

3) Sarana Perdagangan di Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Bantargebang memiliki sarana perdagangan yang tersebar di beberapa kelurahan serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Adapun sarana perdagangan di Kecamatan Bantargebang sebagai berikut:

Tabel 16. Jenis Sarana Perdagangan (2021)

No.	Sarana Perdagangan	Kelurahan			
		Ciketing Udik	Sumur Batu	Cikiwul	Bantargebang
1.	Kelompok Pertokoan	7	3	14	18

2.	Pasar dengan Bangunan Permanen	0	0	0	1
3.	Pasar Tanpa Bangunan	1	0	0	04.
4.	Mini Market/ Swalayan	4	5	9	10

Sumber: Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

B. Profil Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (GERBANG NUSA)

Permasalahan sampah tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di wilayah TPST Bantargebang. Pada dasarnya timbulnya permasalahan sampah menimbulkan hal negatif yang dapat merugikan semua ekosistem serta makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan TPST Bantargebang. Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan untuk mengatasi permasalahan sampah di area TPST bantargebang. Karakteristik dari lembaga kemasyarakatan tersebut ialah peduli akan masyarakat dan lingkungan yang telah dirugikan dengan hadirnya TPST Bantargebang dalam jangka waktu yang panjang.

1. Sejarah Berdirinya Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara

Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang terletak di Jalan Pangkatan 1B RT. 03 RW. 05, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada tahun 2021 Gerbang di bentuk dan diketuai oleh Bapak Jamalludin SH. Dibentuknya lembaga kemasyarakatan ini didasari karena munculnya keresahan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh Bapak Jamal, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah sekitar TPST Bantargebang didirikan. Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang lingkungan ini sengaja dibentuk menjadi sebuah wadah bagi masyarakat setempat.

Gambar 3. Logo Gerakan Masyarakat Bantargebang (Gerbang)



Sumber: Dokumen Gerbang

Banyak masyarakat yang memiliki keluhan mengenai permasalahan sampah, tetapi kebanyakan dari mereka belum dapat menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada pihak yang lebih berwenang dalam mengurus dan bertanggung jawab atas TPST Bantargebang, seperti Institusi Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kemudian pada tahun 2023 lembaga kemasyarakatan ini mengalami perubahan nama yang berawal dari Gerakan Masyarakat Bantargebang (Gerbang) menjadi Gerakan Masyarakat Bantargebang (Gerbang) Nusantara yang ditetapkan pada bulan Juni 2023.

2. Legalitas , Visi dan Misi, Tujuan Gerakan Masyarakat Bantargebang

a. Legalitas Gerakan Masyarakat Bantargebang

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005106.AH.01.07.TAHUN 2023 tentang pengesahan pendirian perkumpulan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara menetapkan bahwa GERAKAN MASYARAKAT BANTARGEBOANG NUSANTARA disingkat GERBANG NUSA berkedudukan di Kota Bekasi, sesuai salinan Akta Nomor 02/2023 Tanggal 15 Juni 2023.

b. Visi dan Misi Gerakan Masyarakat Bantargebang

Terbentuknya Gerakan Masyarakat Bantargebang (GERBANG) Nusantara tentunya memiliki tanggung jawab sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang lingkungan, adapun visi dan misi yang dibentuk sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai berikut:

1) Visi

Perkumpulan yang dibentuk dalam gerakan masyarakat Bantargebang bertujuan supaya terwujudnya masyarakat yang idealis dan bersedia terlibat aktif dalam program pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan demi kemajuan Bangsa Indonesia.

2) Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, perkumpulan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran Hukum masyarakat tentang pentingnya kebersamaan dalam mewujudkan kejayaan Negara Indonesia
- b) Melaksanakan kegiatan sosial kemanusiaan yang responsive dan langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan
- c) Melakukan pendampingan dalam interaksi antara masyarakat yang membutuhkan pendampingan terhadap pemerintah maupun institusi penegak hukum
- d) Melaksanakan pendampingan hukum untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan
- e) Menjalin dan memperluas komunikasi dengan cara memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah maupun institusi penegak hukum
- f) Turut andil menciptakan kondisi kebijakan publik yang antisipasi dan responsif terhadap kepentingan masyarakat
- g) Melaksanakan komunikasi dan interaksi dengan institusi pemerintah maupun institusi penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi demi kejayaan Indonesia dan kemakmuran rakyat Indonesia
- h) Mempromosikan solidaritas sosial kemanusiaan secara luas
- i) Perduli terhadap lingkungan hidup

j) Perduli terhadap pendidikan dan kesehatan

k) Perduli terhadap ketenagakerjaan

l) Dapat melakukan gugatan *Class Action*

c. Tujuan Gerakan Masyarakat Bantargebang

Gerakan masyarakat Bantargebang (GERBANG) Nusantara merupakan sebuah wadah perkumpulan bagi masyarakat, adapun tujuan dari perkumpulan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Agar terwujud perkumpulan yang mampu menampung berbagai keluhan masyarakat dan mencari solusi dengan cara yang bermoral, bermartabat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Agar masyarakat sadar dan mengerti tentang pentingnya rasa kebersamaan dalam upaya mengisi kemerdekaan
- 3) Agar masyarakat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kemandirian dan taat hukum
- 4) Agar terwujud sinergitas yang baik antara masyarakat dengan pemerintah/lembaga serta badan hukum lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab dan sejahtera.

3. Fungsi, Tugas, dan Kewajiban Gerakan Masyarakat Bantargebang

a. Fungsi Gerakan Masyarakat Bantargebang

Perkumpulan dari lembaga masyarakat ini tentunya memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam mengisi Kemerdekaan berupa pemantauan dan pengawasan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- 2) Sebagai wadah dalam pendampingan, pengayoman, pelayanan terkait solusi atas permasalahan dan keluhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

- 3) Sebagai wadah dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum dalam berkelakuan terkait pencegahan, pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan penegak hukum.
- 4) Sebagai contoh dalam interaksi komunikasi permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

b. Tugas Gerakan Masyarakat Bantargebang

Perkumpulan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara memiliki beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab bersama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial dan kerukunan dalam mewujudkan hidup bertoleransi.
- 2) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjunjung tinggi supremasi hukum dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.
- 3) Menjalin interaksi dengan institusi Pemerintah/Swasta maupun institusi Penegak Hukum dalam mewujudkan sinergitas yang baik dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat.

c. Kewajiban Gerakan Masyarakat Bantargebang

Setiap anggota Gerakan masyarakat Bantargebang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- 2) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik perkumpulan
- 3) Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan perkumpulan
- 4) Mentaati keputusan-keputusan rapat
- 5) Membayar iuran anggota
- 6) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan.

4. Kegiatan Perkumpulan Gerakan Masyarakat Bantargebang

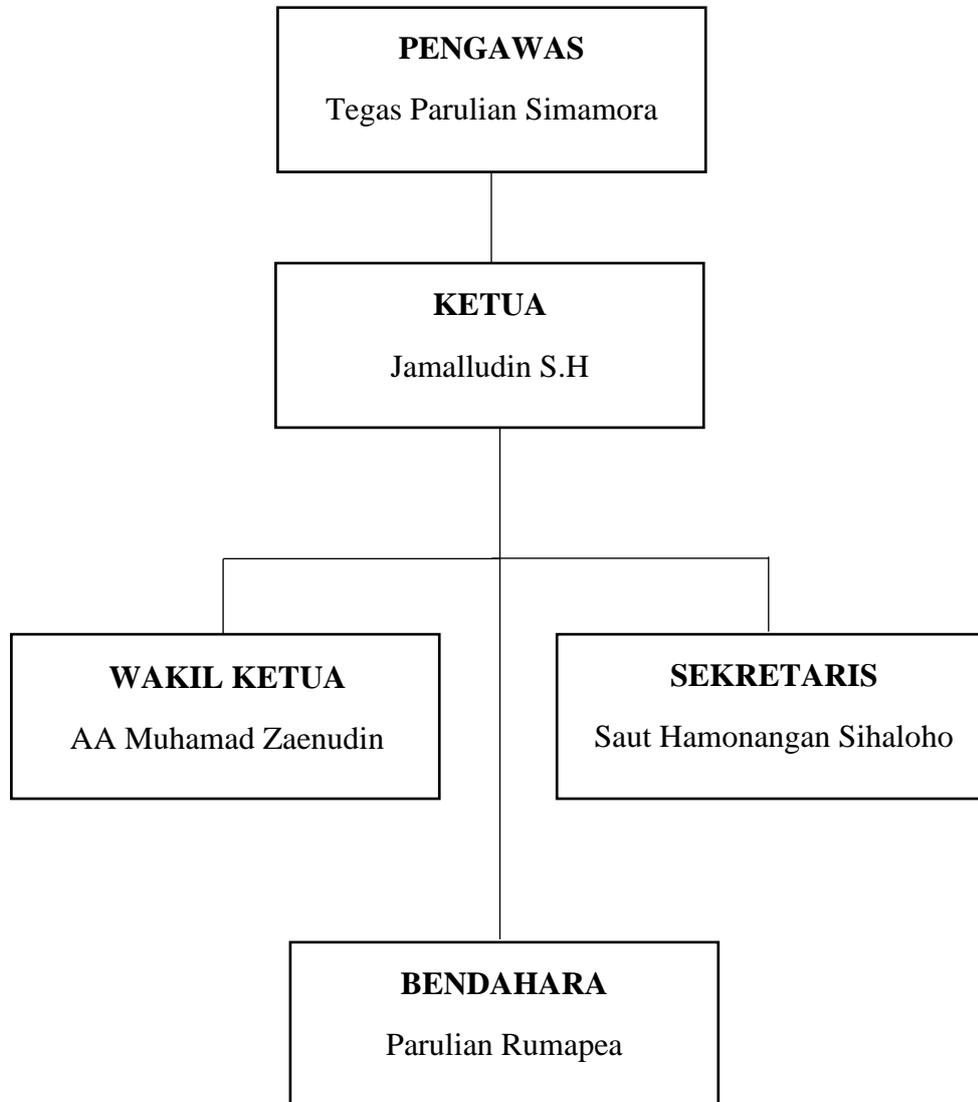
Kegiatan perkumpulan bertujuan dalam beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial dan kerukunan dalam mewujudkan hidup bertoleransi
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjunjung tinggi supremasi hukum dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara
- c. Control sosial demi terciptanya kemakmuran masyarakat

5. Struktur Organisasi dan Ketentuan Pembubaran Gerakan Masyarakat Bantargebang

a. Struktur Organisasi Gerakan Masyarakat Bantargebang

Gambar 4. Struktur Organisasi Gerakan Masyarakat Bantargebang



Sumber: Dokumen Gerakan Masyarakat Bantargebang

Pengurus Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (GERBANG NUSA) bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Pengawas

Tugas dan wewenang pengawas diantaranya sebagai berikut:

- a) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawas untuk kepentingan perkumpulan
- b) Ketua pengawas dan 1 (satu) anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas

2) Ketua/Pendiri

Tugas pendiri diantaranya sebagai berikut:

- a) Pendiri wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengembangan perkumpulan
- b) Berwenang bertindak untuk dan atas nama perkumpulan
- c) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal peringatan itu, pengawas diwajibkan untuk mengadakan rapat pendiri
- d) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak rapat anggota atau rapat pengurus menghasilkan keputusan, pendiri diwajibkan untuk mengadakan rapat pendiri untuk kepastian ketetapan akhir.

Tugas pengurus diantaranya sebagai berikut:

- a) Pengurus bertanggung jawab penuh atas lepengurusan perkumpulan untuk kepentingan perkumpulan
- b) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan perkumpulan untuk disahkan rapat anggota
- c) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Ketentuan Pembubaran Gerakan Masyarakat Bantargebang

Peraturan terkait dengan pembubaran berlandaskan pada pasal 55, perkumpulan usai dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bubarnya perkumpulan dalam hal;
 - a) Tujuan perkumpulan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai

- b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan
- c) Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
- d) Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau;
- e) Harta kekayaan perkumpulan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka pengurus bertindak sebagai likuidator

BAB IV

LATAR BELAKANG GERAKAN MASYARAKAT BANTARGEBOANG NUSANTARA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN

A. Keresahan dalam Bidang Lingkungan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi

1. Keresahan dalam Bidang Lingkungan

Kegelisahan terkait dengan permasalahan lingkungan sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan pertama Bapak Jamalludin selaku pendiri organisasi kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Adapun pendapat Bapak Jamalludin sebagai berikut:

“Masyarakat mengalami keresahan itu tidak hanya dari satu factor saja, tetapi banyak. Saya selaku ketua RW disini selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat, mereka selalu mengeluh karena setiap hari harus mencium aroma tidak sedap, aroma tersebut menyebar tidak mengenal waktu. Kita setiap hari menghirup bau sampah bisa pagi, siang, sore, malam. Kemudian, masyarakat juga resah karena banyak sampah yang berjatuh di jalan raya, padahal jatuhnya sampah tersebut dapat membahayakan pengguna jalan khususnya mereka yang mengendarai sepeda motor. Sampah yang jatuh itu bisa mengeluarkan air dan dapat membuat jalan raya utama menjadi licin sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.” (Wawancara Bapak Jamalludin, 24 Januari 2023)

Pada umumnya, permasalahan-permasalahan yang timbul akibat sampah sehingga dapat menimbulkan keresahan masyarakat turut diperjelas sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kedua Abdul Hasan sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa). Adapun pendapat Abdul Hasan sebagai berikut:

“Sebagai masyarakat saya cukup resah dengan hadirnya TPST Bantargebang, sebagai penduduk pribumi saya memang mengalami kerugian. Kerugian yang saya alami tidak hanya setahun atau dua tahun saja. Setiap hari saya harus menghirup udara yang tercemar oleh aroma tidak sedap dari sampah. Ditambah lagi, truk-truk pengangkut sampah yang mayoritas kondisinya sudah rusak parah, banyak yang berlubang dan pengait pintunya tidak memadai hanya diikat menggunakan tambang. Menurut saya hal tersebut bisa membahayakan pengguna jalan, terlebih mereka berlalu lintas di jalan raya besar yang sering dilewati oleh pengguna kendaraan bermotor. Air yang dihasilkan dari sampah menetes disepanjang jalan raya dan menyebabkan kecelakaan.” (Wawancara Abdul Hasan, 31 Mei 2023)

Gambar 5. Armada Pengangkut Sampah Tidak *Safety*



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kegelisahan terkait dengan permasalahan lingkungan lainnya turut diperjelas sebagaimana disampaikan oleh informan ketiga Bapak Deddy sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa). Adapun pendapat Bapak Deddy sebagai berikut:

“Keresahan yang saya alami dengan adanya TPST Bantargebang adalah baunya, setiap malam saya mencium aroma sampah dari rumah padahal kalau dilihat-lihat rumah saya ini tidak berdampingan langsung dengan TPST Bantargebang, mungkin masyarakat yang tinggal di area tersebut lebih menderita dengan adanya aroma tersebut. Selain aroma yang tidak enak, saya juga resah dengan adanya container dan truk-truk sampah yang parkir sembarangan di bahu jalan apakah izin dengan dishub atau tidak, ditemukan sampah-sampah yang berjatuhan di jalan dan banyak gumpalan tanah merah juga. Kemudian banyak armada yang mengangkut sampah melebihi muatan armada, selain itu di beberapa titik jalan rusak, bergelombang, dan berlubang. Mungkin karena setiap hari dilewati oleh truk dan container, saya resah karena kondisi jalan raya Bantargebang tidak sebaik jalan raya lainnya. Biasanya satu bulan diaspal dan diperbaiki, nanti setelah dua bulan kedepan sudah rusak lagi, dan belum tentu langsung diperbaiki oleh Pemerintah Kota Bekasi, padahal

anggaran yang diberikan oleh Pemerintah DKI Jakarta tidak kecil.”
(Wawancara Bapak Deddy, 31 Mei 2023)

Gambar 6. Armada Pengangkut Sampah Melebihi Muatan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh informan keempat Iwan mengenai keresahan yang dialami sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di area TPST Bantargebang. Adapun penjelasan terkait keresahan dalam bidang lingkungan sebagai berikut:

“Keresahan yang menurut saya paling merugikan adalah terkait dengan air, kita sebagai masyarakat belum tentu tahu apakah air yang selama ini kita gunakan tercemar atau tidak. Jika tercemar akan membahayakan bagi kesehatan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan air tersebut untuk diminum. Selain itu, armada yang digunakan untuk mengangkut sampah biasanya selalu penuh sampai tidak dapat ditutup sehingga menyebabkan banyak sampah yang berterbangan dan jatuh ke jalan. Menurut saya sebagai pengguna jalan tersebut sangat dirugikan, karena jika sampah tersebut kering kemudian terkena air hujan maka jalan menjadi licin, harusnya hal-hal seperti itu diperhatikan dan memiliki team khusus sendiri dalam mengawasi hal tersebut. Terkadang sampah-sampah yang jatuh hilang dengan sendirinya, tanpa ada yang bertanggung jawab menangani sampah tersebut. Keresahan satu lagi menurut saya terkait dengan saluran air dan sungai, saya merasakan itu sendiri, saluran menjadi bau dan berwarna keruh. Bagi saya itu cukup mengganggu.” (Wawancara Iwan, 31 Mei 2023)

Gambar 7. Sungai Berwarna Keruh



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Keresahan masyarakat dalam bidang lingkungan sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kelima Roy Sihombing selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi. Adapun pendapat yang disampaikan sebagai berikut:

“Menurut masyarakat terkait dengan hadirnya TPST Bantargebang tentunya memiliki dampak bagi kehidupan sehari-hari. Adapun dampak negatif yang dialami oleh masyarakat TPST Bantargebang seperti mengalami polusi air, banyaknya populasi lalat, dan yang terakhir masyarakat banyak mengalami polusi udara. Kegiatan yang terjadi di TPST Bantargebang dinilai merusak estetika dan sanitasi lingkungan diantaranya seperti adanya tumpukan sampah, lingkungan semakin gersang, bau, kotor, dan air tercemar serta kebisingan yang mengakibatkan warga sekitar menjadi kurang nyaman.” (Wawancara Bapak Roy Sihombing, 11 Juni 2023)

Gambar 8. Rusaknya Estetika Lingkungan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan terkait dengan keresahan masyarakat dalam bidang lingkungan dapat disimpulkan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

Gambar 9. Mind Mapping Keresahan dalam Bidang Lingkungan



Kegelisahan masyarakat yang ditimbulkan oleh TPST Bantargebang tentunya memiliki dampak berkepanjangan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Gambar 9 terdapat 10 macam keresahan dalam bidang lingkungan diantaranya adalah polusi air, aroma tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah, banyaknya sampah yang jatuh kejalan sehingga membuat kondisi jalan menjadi licin, terdapat truck sampah yang sering parkir di bahu jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas, rusaknya nilai estetika lingkungan masyarakat di TPST Bantargebang, kondisi jalan raya rusak (bergelombang dan berlubang), polusi udara akibat pembakaran sampah, populasi lalat meningkat, dan armada yang digunakan dalam mengangkut sampah sudah tidak *safety*.

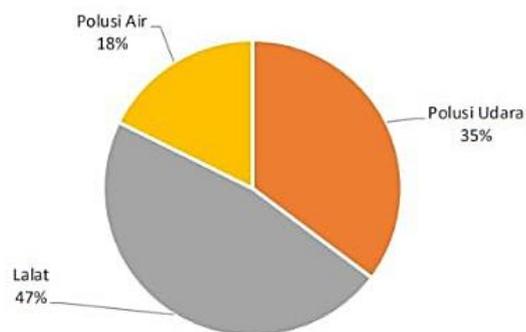
Gambar 10. Jalan Bergelombang dan Berlubang



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, Adapun hasil data sekunder yang diperoleh mengenai dampak negatif dari hadirnya TPST Bantargebang yang menyebabkan keresahan masyarakat sebagai berikut:

Gambar 11. Dampak Negatif TPST Bantargebang



Sumber: Laporan Implementasi RKL-RPL TPST Bantargebang 2022

Berdasarkan data sekunder Gambar 11 dijelaskan bahwa dampak negatif yang terjadi akibat hadirnya TPST Bantargebang adalah terjadinya polusi air sebesar 18%, polusi udara sebesar 35%, dan meningkatnya populasi lalat sebesar 47%. Diagram tersebut menjelaskan bahwa populasi lalat menjadi permasalahan lingkungan terbesar setelah polusi air dan polusi udara.

2. Keresahan dalam Bidang Kesehatan

Kegelisahan terkait dengan permasalahan kesehatan sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan pertama Bapak Jamalludin selaku pendiri organisasi kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Adapun pendapat Bapak Jamalludin sebagai berikut:

“Aktifitas pembakaran sampah di TPST Bantargebang setiap harinya tentu menghasilkan asap yang dapat mencemari udara. Kemudian udara tersebut dihirup oleh masyarakat setiap hari dan saya pikir hal tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat dalam jangka waktu panjang, kesehatan menjadi salah satu yang perlu diperhatikan karena menyangkut jiwa seseorang. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi salah satu penyakit yang disebabkan dari polusi udara akibat pembakaran sampah di TPST Bantargebang. Selain itu, terkait dengan tercemarnya air (polusi air) perlu ditindak lanjuti karena dapat berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dapat terjangkit penyakit kulit jika air yang digunakan sudah tercemar oleh limbah.” (Wawancara Bapak Jamalludin, 24 Januari 2023)

Keresahan yang ditimbulkan berkaitan dengan Kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal langsung dengan area TPST Bantargebang, sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kedua Abdul Hasan sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerakan yang bergerak dalam bidang lingkungan (Gerbang Nusa). Adapun pendapat Abdul Hasan sebagai berikut:

“Masyarakat yang bekerja di TPST Bantargebang sebagai pemulung cenderung terjangkit penyakit diare karena mereka suka menemukan sisa makanan dari tumpukan sampah. Sebagian dari mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan Kesehatan diri sendiri, mereka hanya berpikir yang penting mereka bisa makan. Selain penyakit diare, menurut saya penyakit saluran pernapasan juga banyak diderita oleh masyarakat di sekitar TPST Bantargebang karena adanya aktifitas pembakaran sampah setiap hari. Penyakit kulit juga jadi salah satu yang paling diwanti-wanti, karena setiap harinya kita menggunakan air untuk kebutuhan seperti masak, minum, mencuci baju, mandi, dan sebagainya. Sebenarnya bukan hanya kulit yang dapat terinfeksi, organ tubuh lainnya mungkin juga bisa terinfeksi melalui air tersebut.” (Wawancara Abdul Hasan, 31 Mei 2023)

Kegelisahan terkait dengan permasalahan Kesehatan turut diperjelas oleh Bapak Deddy sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerbang Nusa. Adapun penjelasan terkait dengan pendapat Bapak Deddy sebagai berikut:

“Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) jadi salah satu penyakit yang menurut saya banyak diderita oleh masyarakat. Mungkin tidak hanya masyarakat yang berada di sekitar area TPST Bantargebang saja, tetapi masyarakat yang berada diluar area TPST Bantargebang juga dapat terjangkau ISPA. Selain itu, masyarakat juga terjangkau penyakit kulit karena mayoritas masyarakat menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut tentunya berbahaya bagi kesehatan masyarakat dalam jangka waktu panjang, mengkonsumsi air yang tercemar tidak hanya berbahaya untuk kulit. Air yang tercemar oleh limbah bisa menyebabkan masyarakat terkena diare.” (Wawancara Bapak Deddy, 31 Mei 2023)

Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan keempat Iwan sebagai masyarakat yang bergabung dengan Gerbang Nusa dalam memperjuangkan haknya. Adapun pendapat Iwan sebagai berikut:

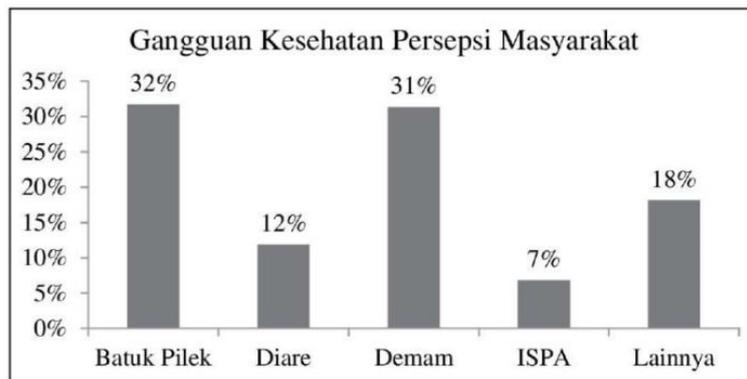
“Permasalahan kesehatan masyarakat di area TPST Bantargebang menurut saya tidak akan ada habisnya, karena selama TPST tersebut masih beroperasi akan semakin banyak masyarakat yang mengalami keresahan dalam bidang kesehatan. Mayoritas masyarakat yang saya ketahui terkena penyakit diare karena banyak dari mereka yang masak menggunakan air. Berasal dari air juga bisa memberikan dampak pada kulit masyarakat, terlebih digunakan untuk mandi dan sebagainya. Kemudian penyakit lainnya adalah ISPA, selama TPST Bantargebang masih beroperasi dan beraktifitas dalam pembakaran sampah maka masyarakat yang terjangkau penyakit ISPA kemungkinan bisa bertambah banyak setiap tahunnya.” (Wawancara Iwan, 31 Mei 2023)

Keresahan yang dialami oleh masyarakat terkait dengan kesehatan turut diperjelas sebagaimana dinyatakan oleh informan kelima Bapak Roy Sihombing selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi. Adapun penjelasan Bapak Roy Sihombing sebagai berikut:

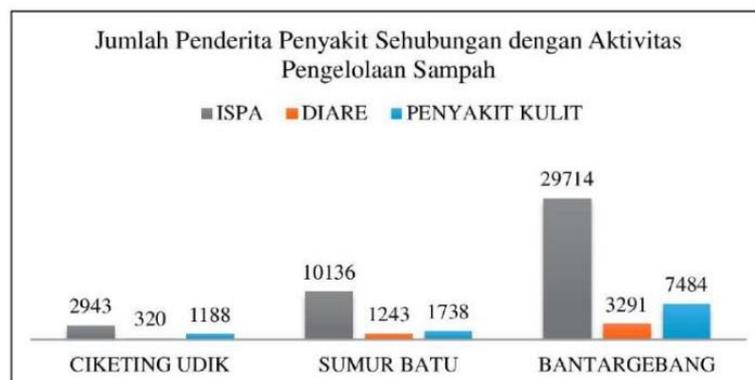
“Jika meninjau dari laporan puskesmas di tiga kelurahan, penyakit yang dialami oleh masyarakat adalah ISPA, diare, dan penyakit kulit. Penyakit tersebut menjadi keresahan masyarakat akan kesehatannya, saya lumayan khawatir dengan kondisi yang seperti ini. Lumayan susah untuk mengatasi hal-hal seperti itu, karena masyarakat hidup berdampingan dengan lingkup TPST Bantargebang. Apalagi mengenai polusi udara yang berasal dari pembakaran sampah dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, penggunaan air untuk masak dan minum serta mandi juga dapat berpengaruh kepada kesehatan kulit masyarakat. Jika bertempat tinggal di lingkungan yang tergolong kotor mungkin penyebab diare bisa berasal dari lingkungan itu sendiri, sehingga penyakit yang diderita oleh mayoritas masyarakat hanya itu saja.” (Wawancara Bapak Roy Sihombing, 11 Juni 2023)

Selain wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, adapun hasil data sekunder yang didapatkan melalui Laporan Implementasi RKL-RPL TPST Bantargebang Tahun 2022 mengenai potret masyarakat TPST Bantargebang yang ditinjau berdasarkan penyakit yang diderita oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Gambar 12. Gangguan Kesehatan Masyarakat



Sumber: Hasil kuesioner PT Enviro Total Solusi, 2020



Sumber: Puskesmas Bantargebang, Sumurbatu dan Ciketing Udik, 2020

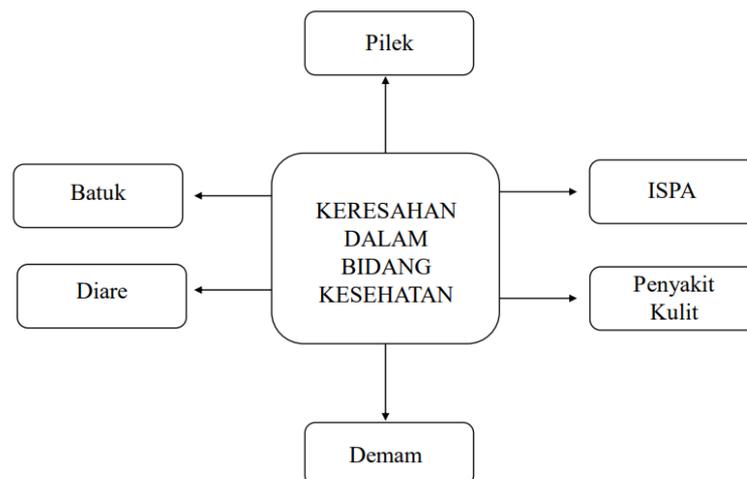
Berdasarkan data sekunder Gambar 12 dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat di TPST Bantargebang mengalami gangguan kesehatan seperti batuk dan pilek, diare, demam, ISPA, dan penyakit kulit. Jika ditinjau berdasarkan diagram diatas gangguan kesehatan persepsi masyarakat, batuk dan pilek berada diposisi pertama dengan persentase sebesar 32%. Kemudian diposisi kedua penyakit yang menjangkit masyarakat ialah demam dengan persentase 31%. Selain itu, penyakit diare berada diposisi ketiga dengan persentase sebesar 21%. Adapun penyakit ISPA yang memiliki persentase sebesar 7%, dan penyakit lainnya sebesar 18%. Dapat disimpulkan bahwa gangguan kesehatan yang dialami berdasarkan persepsi

masyarakat didominasi oleh penyakit batuk dan pilek, kemudian demam, dan penyakit lainnya.

Berbeda dengan diagram persepsi masyarakat, adapun data sekunder yang diperoleh berdasarkan jumlah penderita penyakit sehubungan dengan aktivitas pengelolaan sampah di tiga kelurahan Bantargebang yaitu Sumur Batu, Ciketing Udik, dan Bantargebang dengan jenis penyakit seperti ISPA, penyakit kulit, dan diare. Pertama, penyakit ISPA yang diderita oleh masyarakat Ciketing Udik mencapai 2.943 jiwa, sedangkan di Kelurahan Sumur Batu terdapat 10.136 jiwa, dan Kelurahan Bantargebang terdapat 29.714 jiwa yang terjangkit penyakit ISPA. Kedua, penyakit diare yang diderita oleh masyarakat Ciketing Udik sebesar 320 jiwa, sedangkan masyarakat yang terkena diare di Kelurahan Sumur Batu mencapai 1.243 jiwa, dan pada Kelurahan Bantargebang terdapat 3.291 jiwa yang terjangkit. Ketiga, penyakit kulit. Pada Kelurahan Ciketing Udik terdapat 1.188 jiwa yang terjangkit penyakit kulit, adapun masyarakat di Kelurahan Sumur Batu yang terjangkit sebanyak 1.738 jiwa, dan Kelurahan Bantargebang sebanyak 7.484 jiwa yang terkena penyakit kulit.

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan terkait dengan keresahan masyarakat dalam bidang kesehatan dapat disimpulkan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

Gambar 13. Mind Mapping Keresahan dalam Bidang Kesehatan



Keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh TPST Bantargebang tentunya memiliki dampak berkepanjangan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Gambar 13 terdapat 6 macam keresahan dalam bidang kesehatan diantaranya adalah

penyakit kulit, diare, batuk, pilek, infeksi saluran pernapasan akut, dan demam. Setiap penyakit yang menjangkit masyarakat disebabkan oleh factor lingkungan, sehingga antara kesehatan dan lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat saling berkesinambungan.

3. Keresahan dalam Bidang Sosial

Kegelisahan terkait dengan permasalahan sosial sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan pertama Bapak Jamalludin selaku pendiri organisasi kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Adapun pendapat Bapak Jamalludin sebagai berikut:

“Pendidikan menjadi salah satu permasalahan sosial bagi masyarakat. Banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan berkeliaran di TPST Bantargebang untuk mencari sampah, permainan sistem PPDB zonasi yang terjadi pada beberapa sekolah dasar di Bantargebang membuat orang tua resah karena dikenakan pungutan liar secara terang-terangan. Selain itu, adapun kemacetan lalu lintas setiap harinya yang disebabkan oleh truk sampah. Tidak adanya jam operasional dalam pengangkutan sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, disisi lain jalan raya juga tidak terlalu besar. Walaupun sudah dibangun beberapa infrastruktur seperti jalan layang tapi belum bisa mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas yang setiap hari terjadi. Permasalahan sosial selanjutnya adalah terkait dengan terbentuknya tim monitoring dan evaluasi (Monev) dalam pengawasan TPST Bantargebang, saya menilai bahwa dalam anggota tim monev banyak permainan oknum tidak bertanggung jawab dengan tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat dalam mengawasi TPST Bantargebang. Keanggotaan tim monev terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), dan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), anggota tersebut dinilai kerja bukan dalam ranah yang sesuai dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Saya dan masyarakat menentang karena yang seharusnya bisa masuk tim monev adalah masyarakat yang paham akan lingkungan mereka sendiri.” (Wawancara Bapak Jamalludin, 31 Mei 2023)

Pembahasan terkait dengan keresahan dalam bidang sosial turut dijelaskan sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kedua Abdul Hasan. Adapun pembahasan tersebut sebagai berikut:

“Kemacetan lalu lintas setiap pagi menurut saya sangat membuat resah karena jamnya masyarakat berangkat kerja, saya bertanya-tanya mengapa kendaraan pengangkut sampah tidak beroperasi pada siang hari atau malam hari saja. Keluar masuknya truk di daerah Kecamatan Bantargebang menyebabkan kemacetan karena jika mau masuk kedalam TPST harus mengantri terlebih dahulu, sedangkan pengguna jalan di Kecamatan Bantargebang bukan hanya warga disini saja, mereka yang dari Cileungsi, dan Kabupaten Bogor ikut terjebak kemacetan karena truk sampah. Armada pengangkut sampah yang beroperasi bukan satu atau dua saja setiap paginya, tetapi bisa mencapai puluhan. Permasalahan selanjutnya, terkait dengan tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang terdiri dari orang-orang pemerintahan. Selama tim monev dibentuk, tidak terdapat transparansi laporan pekerjaan yang

dilaporkan. Masyarakat juga banyak yang mengeluh terkait dengan pembentukan tim monev yang ditugaskan untuk mengawasi permasalahan lingkungan. Permasalahan sosial lainnya adalah terkait dengan dunia pendidikan, banyak orang tua yang resah karena dimintai uang tunai supaya anak mereka bisa bersekolah atau dikenal dengan istilah membeli kursi. Kecurangan yang dilakukan oleh oknum guru selalu terjadi disetiap pergantian tahun ajaran baru. (Wawancara Abdul Hasan, 31 Mei 2023)

Kegelisahan terkait dengan permasalahan sosial turut diperjelas oleh Bapak Deddy sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerbang Nusa. Adapun penjelasan terkait dengan pendapat Bapak Deddy sebagai berikut:

“Permasalahan sosial bukan hanya mencakup satu permasalahan saja, menurut saya permasalahan yang perlu dievaluasi dan ditanggapi adalah terkait dengan pendidikan masyarakat. Lagi-lagi permasalahan mengenai anggaran yang diberikan oleh pemerintah, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak bisa bersekolah akibat kendala biaya. Seharusnya, jika sudah diberikan anggaran oleh pemerintah untuk pendidikan masyarakat dapat menuntut ilmu secara gratis, adapun pungutan liar yang dilakukan oleh oknum guru dalam system PPDB di sekolah dasar dan membuat masyarakat khawatir karena anak-anak mereka tidak bisa bersekolah lagi. Miris terkait dengan jenjang pendidikan masyarakat di daerah sini sehingga banyak dari mereka yang tidak dapat memiliki pekerjaan. Adapun permasalahan sosial lainnya yaitu terkait dengan kemacetan lalu lintas, setiap pagi kalau saya berangkat kerja, berkendara hanya beberapa meter sudah terjebak macet. Masyarakat jadi dirugikan secara waktu dalam beraktifitas sehari-hari, dan penyebab dari kemacetan tersebut adalah dari truk yang ingin masuk TPST atau keluar dari TPST Bantargebang.” (Wawancara Bapak Deddy, 31 Mei 2023)

Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan keempat Iwan sebagai masyarakat yang bergabung dengan Gerbang Nusa. Adapun pendapat yang diberikan sebagai berikut:

“Permasalahan social pertama yang saya alami terkait dengan kemacetan lalu lintas, belum lagi didaerah ini berdekatan dengan Pasar Bantargebang yang pastinya setiap hari memungkinkan terjadinya penumpukkan kendaraan hingga macet. Tidak adanya jam operasional yang pasti membuat truk sampah ikut beraktifitas di pagi hari, seharusnya pemerintah peduli terhadap hal-hal seperti itu karena masyarakat sangat dirugikan dari segi waktu dan tenaga. Selain itu, permasalahan kedua adalah mengenai tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang baru terjadi beberapa bulan belakangan ini. Tidak terpenuhinya hak masyarakat menjadikan masyarakat resah, anggota tim monev dinilai tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh masyarakat. Seharusnya masyarakat menginginkan keanggotaan tim monev terdiri dari masyarakat sekitar TPST Bantargebang, karena masyarakat tersebut yang mengetahui bagaimana kondisi lingkungan mereka. Ditambah dengan tidak adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) seperti apa saja yang perlu diperbaiki, upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan, dan sebagainya. Permasalahan selanjutnya terkait dengan pendidikan. Mayoritas orang tua mengalami keresahan dengan adanya sistem zonasi yang dipermainkan oleh oknum guru, sehingga masyarakat yang seharusnya

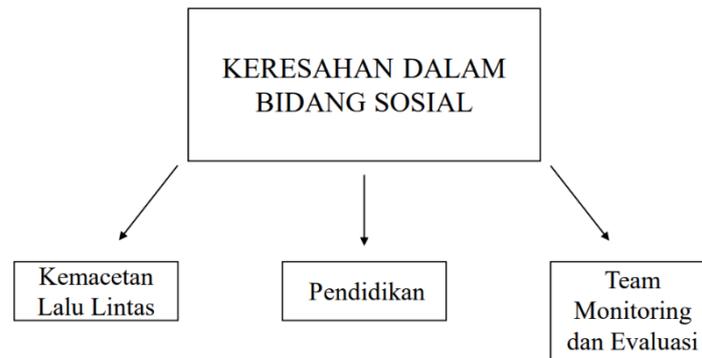
mendapatkan hak untuk bersekolah di dekat rumahnya tidak memiliki pilihan selain harus memilih sekolah lain.” (Wawancara Iwan, 31 Mei 2023)

Keresahan yang dialami oleh masyarakat terkait dengan permasalahan sosial turut diperjelas sebagaimana dinyatakan oleh informan kelima Bapak Roy Sihombing selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi. Adapun penjelasan Bapak Roy Sihombing sebagai berikut:

“Mengenai jam operasional aktifitas pengangkutan sampah memang tidak memiliki aturan yang berarti full 24 jam bisa pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Saya mengerti jika hal tersebut membuat masyarakat resah dan mengganggu kegiatan sehari-hari terlebih menyebabkan kemacetan karena banyak anak sekolah dan masyarakat pekerja. Selain itu, di area TPST ini banyak anak-anak dari pemulung tidak dapat bersekolah karena mereka tidak memiliki akta kelahiran sebagai persyaratan untuk menempuh pendidikan. Setiap hari anak-anak tersebut saya temukan di TPST Bantargebang berlalu lalang, saya tidak tahu orang tuanya tidak mengurus mengenai akta kelahirannya karena apa padahal pendidikan itu penting.” (Wawancara Bapak Roy Sihombing, 11 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan terkait dengan keresahan masyarakat dalam bidang sosial dapat disimpulkan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

Gambar 14. Mind Mapping Keresahan dalam Bidang Sosial



Kegelisahan masyarakat yang ditimbulkan oleh TPST Bantargebang tentunya memiliki dampak berkepanjangan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Gambar 14 terdapat 3 macam keresahan yang dialami oleh masyarakat dalam bidang sosial diantaranya kemacetan lalu lintas, pendidikan yang rendah, serta pemilihan anggota tim monitoring dan evaluasi yang tidak sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2019. Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan permasalahan sosial yang ada di TPST Bantargebang yaitu terkait dengan pendidikan dan tim monev. Pertama, menurut informan pertama bahwa pendidikan masyarakat di TPST

Bantargebang cenderung rendah karena banyak masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk bersekolah sehingga menyebabkan masyarakat susah mendapatkan lapangan pekerjaan. Kedua, menurut informan kelima bahwa rendahnya pendidikan disebabkan karena masyarakat di area TPST Bantargebang tidak memiliki akta kelahiran, hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat bersekolah karena persyaratan sekolah ialah wajib memiliki akta kelahiran.

Permasalahan lainnya terkait dengan pendidikan, sebenarnya setiap tahun ajaran baru permasalahan seperti ini sering terjadi di lingkungan pendidikan, adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum guru di beberapa sekolah membuat masyarakat khawatir khususnya orang tua yang cemas karena anak-anak tidak bisa bersekolah. Pungutan liar yang dilakukan oknum guru terjadi secara terang-terangan dengan cara jual beli kursi saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan meminta uang kepada orang tua murid yang dinyatakan tidak diterima di sekolah dengan anggaran Rp. 1.500.000 hingga Rp. 3.000.000 untuk membeli kursi. Adanya pungutan liar tersebut menyebabkan ribuan siswa di Bantargebang terancam tidak bisa sekolah.

4. Keresahan dalam Bidang Ekonomi

Kegelisahan terkait dengan permasalahan ekonomi sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan pertama Bapak Jamalludin selaku pendiri organisasi kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Adapun pendapat Bapak Jamalludin sebagai berikut:

“Permasalahan dalam bidang ekonomi yang paling menonjol adalah terkait dengan bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah memberikan uang kompensasi dari hadirnya TPST Bantargebang dengan jumlah yang tidak sedikit, tetapi dalam mendapatkan BLT sebesar Rp. 400.000,00- per bulan membuat masyarakat merasa tidak cukup atau tidak sebanding dengan kerugian yang selama ini mereka dapatkan dari hadirnya TPST Bantargebang. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan di wilayah ini menjadi penentu bagi kehidupan masyarakat dalam waktu mendatang, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan” (Wawancara Bapak Jamalludin, 31 Mei 2023)

Pembahasan terkait dengan keresahan dalam bidang ekonomi turut dijelaskan sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kedua Abdul Hasan. Adapun pembahasan tersebut sebagai berikut:

“Menurut saya uang kompensasi yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan langsung tunai (BLT) tidak cukup jika masyarakat hanya diberikan sebesar Rp. 400.000,00 setiap bulannya. Uang kompensasi yang diberikan

tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lagi untuk kedepannya. Jika pemerintah dapat menjamin kehidupan masyarakat dalam segi kesehatan maupun permasalahan sosial kita sebagai warga terima saja, sekarang untuk penggunaan BPJS juga tidak semua masyarakat membuat kartu BPJS jadi jika ingin berobat tidak bisa secara gratis. Mungkin kedepannya anggaran untuk BLT bisa lebih banyak dari yang diberikan sebelumnya.” (Wawancara Abdul Hasan, 31 Mei 2023)

Kegelisahan terkait dengan permasalahan ekonomi turut diperjelas sebagaimana disampaikan oleh informan ketiga Bapak Deddy sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerbang Nusa. Adapun penjelasan terkait dengan pendapat Bapak Deddy sebagai berikut:

“Anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada DKI Jakarta dalam kerjasama mengelola TPST Bantargebang cukup besar dari tahun ke tahun, tetapi kenapa uang kompensasi yang diberikan kepada masyarakat jumlahnya sangat sedikit. Seharusnya selain digunakan untuk membangun infrastruktur uang tersebut dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Lagi pula, infrastruktur yang dibangun hanya *fly over* saja seperti di Rawa Panjang, dan Cipendawa. Buktinya kondisi Jalan Raya Narogong hingga Jalan Bantargebang masih mengalami kerusakan yang parah, setidaknya anggaran sisa yang digunakan untuk infrastruktur dapat ditambahkan dalam pemberian bantuan langsung tunai (BLT) setidaknya dalam sebulan masyarakat mendapatkan dana lebih dari Rp. 400.000,00.” (Wawancara Bapak Deddy, 31 Mei 2023)

Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan keempat Iwan sebagai masyarakat yang bergabung dengan Gerbang Nusa. Adapun pendapat yang diberikan sebagai berikut:

“Uang bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat setiap 3 bulan sekali menurut saya kurang efektif walaupun hitungannya sebulan sekali mendapatkan sebesar Rp. 400.000,00 karena kita tidak tahu kebutuhan masyarakat bagaimana. Mungkin kedepannya terkait dengan BLT Pemerintah Kota Bekasi bisa memberikan dalam waktu sebulan sekali. Jadi memungkinkan uang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, saya sebenarnya terima saja diberikan Rp.400.000,00 per bulan tapi jika memungkinkan kan masyarakat bisa mendapatkan jumlah yang lebih besar kenapa tidak. Lebih besar anggaran yang diberikan justru masyarakat bisa lebih sejahtera kehidupannya.” (Wawancara Iwan, 31 Mei 2023)

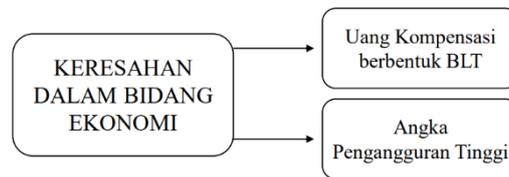
Keresahan yang dialami oleh masyarakat terkait dengan permasalahan ekonomi turut diperjelas sebagaimana dinyatakan oleh informan kelima Bapak Roy Sihombing selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi. Adapun penjelasan Bapak Roy Sihombing sebagai berikut:

“Permasalahan ekonomi yang saya ketahui adalah karena berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat, sesuai dengan yang saya katakan terkait dengan tidak bisanya masyarakat menempuh wajib pendidikan karena

faktor dari tidak memiliki akta lahir, sehingga membuat masyarakat susah untuk mencari pekerjaan ujung-ujungnya mereka mengikuti jejak orang tuanya yang berkerja di TPST Bantargebang yaitu sebagai pemulung. Sebenarnya saya juga resah tapi balik lagi kepada masyarakatnya, semakin susah diatur maka semakin banyak juga permasalahan yang akan datang nantinya. Selain itu, terkait dengan BLT saya tidak bisa memberikan tanggapan karena keputusan tersebut telah disepakati dalam kontrak kerjasama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi.” (Wawancara Bapak Roy Sihombing, 11 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan terkait dengan keresahan masyarakat dalam bidang ekonomi dapat disimpulkan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

Gambar 15. Mind Mapping Keresahan dalam Bidang Ekonomi



Kegelisahan masyarakat di TPST Bantargebang terjadi dalam bidang ekonomi. Berdasarkan Gambar 15 dijelaskan bahwa terdapat dua keresahan yang dialami oleh masyarakat yaitu terkait dengan uang kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan hanya sebesar Rp. 400.000,00 per bulan dan uang tersebut hanya diberikan pertiga bulan sekali. Rendahnya uang kompensasi yang diberikan membuat masyarakat resah karena uang tersebut dinilai tidak sebanding dengan dampak yang akan terjadi dalam jangka waktu panjang terhadap generasi selanjutnya. Selain itu, beberapa masyarakat juga senang terhadap uang yang diberikan tersebut. Mayoritas masyarakat yang senang tersebut tidak mengetahui atau tidak memiliki edukasi terkait dengan berbahayanya TPST Bantargebang untuk kehidupan sehari-hari. Permasalahan selanjutnya ialah terkait dengan angka pengangguran di Kecamatan Bantargebang, keterkaitan Pendidikan dengan mendapatkan pekerjaan merupakan dua hal yang berkesinambungan. Berdasarkan observasi dan wawancara bahwa kebanyakan masyarakat yang tidak menempuh pendidikan hanya mengikuti jejak orang tua mereka, yaitu bekerja di TPST Bantargebang sebagai pemulung sampah. Sehingga hal ini menjadi penentu untuk menghasilkan keuangan dalam mencukupi kehidupan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan bahwa keresahan yang dialami oleh masyarakat di TPST Bantargebang berasal dari beberapa kategori yaitu terkait dengan pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, serta lingkungan. Keresahan yang dialami oleh masyarakat lebih mengarah kepada *Cost* (kerugian), sesuai dengan teori mobilisasi sumber daya yang dibahas oleh Mayer Zald dan McCarthy mengarah kepada istilah sumber daya yang dibagi menjadi dua kategori yaitu *Tangible* (berwujud) dan *Intangible* (tidak berwujud). Pada permasalahan ini masyarakat menuntut akan hak sumber daya *Tangible* (berwujud) yang mencakup uang, peserta dan infrastruktur. Sedangkan sumber daya *Intangible* (tidak berwujud) mencakup keterampilan dan dukungan publik.

Membahas terkait dengan sumber daya *Tangible* yang diperjuangkan oleh masyarakat seperti uang bantuan langsung tunai (BLT) yang didapatkan setiap tiga bulan sekali sebesar Rp. 400.000,00 setiap bulannya. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai seperti belum tersebarunya puskesmas dan rumah sakit di wilayah Kelurahan Cikiwul sehingga membuat masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut harus mencari puskesmas atau rumah sakit di daerah lain. Adapun keresahan masyarakat terkait dengan pembangunan jalan, mayoritas dari mereka mengeluh akibat banyak jalan yang rusak sehingga dapat membahayakan para pengguna jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kerusakan jalan yang dimaksud oleh masyarakat ialah jalan berlubang dan bergelombang, tentunya hal tersebut turut diperjuangkan supaya masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan jalan yang baik tanpa membahayakan seseorang.

Berdasarkan sumber daya *Intangible* yaitu dukungan public, organisasi social menjadi salah satu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai elemen pendukung dalam memperjuangkan setiap hak yang ingin diperjuangkan. Organisasi sosial yang terdapat di TPST Bantargebang yaitu Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (GERBANG NUSA) menjadi salah satu organisasi kelembagaan yang bergerak dalam bidang lingkungan. Hadirnya Gerbang Nusa menarik perhatian masyarakat, karena pada dasarnya banyak aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat terkait dengan lingkungan, sehingga organisasi kelembagaan tersebut dapat menjadi wadah bagi masyarakat. Beberapa program yang dilakukan oleh Gerbang Nusa berfokus kepada kesejahteraan masyarakat dan

kesuksesan dalam memperjuangkan hak-hak dengan mempertimbangkan sebuah keuntungan (*benefits*) dan kerugian (*cost*) yang mampu didapatkan oleh masyarakat.

Gerakan masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) menjadi pendukung bagi masyarakat yang mampu menyuarakan aspirasi yang sebelumnya tidak tersampaikan. Dalam mempertimbangkan rasionalitas instrumental keuntungan tidak hanya didapatkan oleh masyarakat disekitar TPST Bantargebang saja, tetapi *Free Ride* (orang-orang yang dapat menikmati *Public Goods* meskipun mereka tidak ikut memperjuangkan) dapat ikut serta mendapatkan keuntungan dari keberhasilan program yang dijalankan oleh organisasi kemasyarakatan berbasis lingkungan tersebut. Menurut pandangan McCarthy dan Mayer Zald (1977) keberhasilan sebuah gerakan bergantung kepada siapa saja yang mendukung dari hadirnya tujuan tersebut, adapun sumber daya manusia yang secara aktif ikut terlibat dalam mencapai tujuan dengan mengorbankan diri dan waktu yang dimiliki atau dengan menyumbangkan sumber daya dan uang dalam memperjuangkan haknya.

Teori mobilisasi sumber daya yang dibahas oleh McCarthy dan Mayer Zald (1977) menekankan pada tiap proses sosial yang hadir dalam mencapai sebuah tujuan di suatu gerakan sosial. Teori tersebut beranggapan bahwa dalam ruang lingkup masyarakat mengalami ketidakpuasan sehingga gerakan sosial tersebut dapat terbentuk. Anggota yang bergabung dalam suatu gerakan sosial bertindak bukan karena adanya kepentingan yang dapat menguntungkan kelas mereka. Tetapi, karena adanya keinginan berjuang demi mencapai tujuan dan berusaha demi kepentingan kemanusiaan. Ketidakpuasan yang dialami oleh masyarakat di wilayah TPST Bantargebang baik dalam bidang lingkungan, sosial, kesehatan, maupun ekonomi menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) (Edwards, 2014). Luthfi Firmansyah, Ni Komang Oktrisia, dan Nisrina Meyrandani (2023) dalam artikelnya juga menemukan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat akar rumput di Indonesia dari adanya inovasi penggunaan galon sekali pakai sebagai bentuk air dalam kemasan (AMDK) adalah permasalahan pada lingkungan. Seperti halnya pada keresahan masyarakat terhadap penumpukan sampah plastic di Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama dan diupayakan oleh pemerintah

dalam menanggulangnya. Selain itu, permasalahan yang dapat mengancam kesehatan tubuh masyarakat akibat dari kandungan mikroplastik yang dapat berbahaya, jika digunakan dalam jangka waktu panjang (Firmansyah & dkk, 2023).

B. Upaya Gerbang Nusantara dalam Mengatasi Keresahan Masyarakat

1. Upaya yang Dilakukan dalam Bidang Lingkungan

Upaya yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (GERBANG NUSA) mencakup beberapa bidang diantaranya adalah lingkungan. Upaya tersebut adalah sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan pertama Bapak Jamalludin selaku pendiri organisasi kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Adapun pendapat Bapak Jamalludin sebagai berikut:

“Terbentuknya gerakan masyarakat ini belum lama, jadi upaya yang bisa kita wujudkan dalam menangani keresahan masyarakat tentunya belum banyak juga. Tapi setidaknya sedikit demi sedikit keresahan tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Upaya yang dilakukan adalah kami sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang lingkungan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi untuk mengambil keputusan yang tepat dalam konteks menertibkan armada truck yang tidak tertib memasuki kawasan TPST Bantargebang karena di kawasan tersebut banyak masyarakat yang beraktifitas untuk sekolah dan bekerja. Selain itu, gerakan masyarakat ini juga mengatasi terkait dengan muatan sampah yang dibawa oleh truk. Sudah dilaporkan kepada pihak DLH untuk membatasi sampah yang dibawa setiap harinya sehingga tidak ada lagi peristiwa sampah jatuh di jalan dan membuat jalan menjadi licin” (Wawancara Bapak Jamalludin, 31 Mei 2023)

Pembahasan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan tersebut turut dijelaskan sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kedua Abdul Hasan. Adapun pembahasan tersebut sebagai berikut:

“Gerakan Masyarakat Bantargebang bekerjasama dengan pihak DLH dalam mengatur dan menertibkan keluar masuknya armada truck pengangkut sampah, berhubung dengan tidak adanya jam operasional yang dibentuk membuat armada tersebut semena-mena dalam memasuki kawasan TPST Bantargebang dan dapat membahayakan masyarakat yang sedang beraktifitas. Adapun hal lainnya yang dibahas dengan pihak DLH yaitu terkait dengan muatan sampah, kami belum dapat memastikan kritik yang diberikan kepada DLH untuk lebih memperhatikan muatan sampah sudah diterapkan atau belum, yang penting organisasi kami sudah memperingati terkait muatan armada” (Wawancara Abdul Hasan, 31 Mei 2023)

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi keresahan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan turut diperjelas sebagaimana disampaikan oleh informan

ketiga Bapak Deddy sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerbang Nusa. Adapun penjelasan terkait dengan pendapat Bapak Deddy sebagai berikut:

“Dari jalan raya utama untuk masuk kedalam kawasan TPST Bantargebang harus menempuh jarak sekitar 1,8 KM. Pada area tersebut terdapat pabrik dan beberapa sekolah yang menyebabkan kekhawatiran. Sering kali armada truk tersebut ditemukan tidak tertib jika memasuki kawasan tersebut, banyak yang saling mendahului satu sama lain. Padahal jalan yang digunakan juga tidak cukup besar/luas, hal seperti ini tentunya dapat membahayakan bagi pengguna jalan yang lain. Sebelumnya hal-hal seperti itu tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, upaya yang dilakukan kami dalam mengatasi hal tersebut adalah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam konteks menertibkan armada-armada tersebut. Upaya lainnya yang dilakukan adalah Gerbang Nusa bekerjasama dengan DLH untuk memberikan peraturan baru terkait dengan jumlah muatan yang dibawa oleh armada kedalam TPST Bantargebang.” (Wawancara Iwan, 31 Mei 2023)

Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan keempat Iwan sebagai masyarakat yang bergabung dengan Gerbang Nusa. Adapun pendapat yang diberikan sebagai berikut:

“Hal yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan terkait dengan armada truk yang membuat masyarakat resah. Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara bekerjasama dengan pihak DLH dalam menertibkan armada truk pengangkut sampah yang ingin memasuki kawasan TPST Bantargebang, berhubung dengan akses jalan yang tidak terlalu besar dan terdapat beberapa sekolah serta PT membuat masyarakat banyak melakukan aktifitas di pagi dan siang hari, sehingga dapat membahayakan pengguna jalan jika kedepannya truk tersebut tidak dapat tertib memasuki Kawasan TPST Bantargebang, dengan dilakukannya pemantauan terkait dengan muatan sampah yang dibawa oleh armada bisa menjadi salah satu alternatif mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Terkadang ukuran dump truk tidak sesuai dengan kapasitas volume sampah yang berarti melebihi batas yang seharusnya, makanya kami mewanti-wanti pihak DLH untuk memperhatikan hal tersebut.” (Wawancara Iwan, 31 Mei 2023)

Berdasarkan keempat informan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh organisasi kelembagaan masyarakat yaitu Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (GERBANG NUSA) dalam mengatasi keresahan masyarakat pada bidang lingkungan melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menertibkan armada truk pengangkut sampah yang selalu semena-mena dalam menggunakan jalan, sehingga meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan para pengguna jalan atau masyarakat yang sedang beraktifitas serta memperingatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk lebih memperhatikan muatan sampah yang dibawa oleh armada kedalam TPST Bantargebang, karena jika

hal tersebut diabaikan justru menyebabkan kecelakaan lalu lintas akibat sampah yang jatuh kejalan dan membuat jalan menjadi licin.

2. Upaya yang Dilakukan dalam Bidang Sosial

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi keresahan masyarakat dalam bidang sosial sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan pertama Bapak Jamalludin selaku pendiri organisasi kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Adapun pendapat Bapak Jamalludin sebagai berikut:

“Sebenarnya ada kaitannya dengan permasalahan lingkungan yang armada sering ditemukan parkir di bahu jalan, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini adalah pihak Gerbang Nusa bekerjasama dengan Dishub untuk menertibkan truk dan memberikan sanksi apabila armada melanggar peraturan tersebut. Selain itu belakangan ini ada permasalahan terkait dengan pendidikan yaitu adanya permainan zonasi yang dilakukan oleh oknum guru, upaya yang dilakukan kami adalah dengan melapor kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi terkait dengan kecurangan/permainan zonasi oleh guru. Upaya terakhir dalam bidang sosial adalah dengan melakukan pengawasan terhadap tim monitoring dan evaluasi (monev) dengan melaporkan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) perihal dugaan gagal konstruksi kegiatan pembangunan turap dan perbaikan Jalan Pangkalan 1 Bantargebang.” (Wawancara Bapak Jamalludin, 31 Mei 2023)

Pembahasan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan tersebut turut dijelaskan sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kedua Abdul Hasan. Adapun pembahasan tersebut sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan dalam mengatasi keresahan masyarakat adalah dengan melakukan pengawasan permainan zonasi oleh guru, permainan zonasi ini biasanya terkait dengan uang yang diajukan untuk masyarakat bisa bersekolah. Selain itu, kami mengawasi tim monev yang selama dibentuk tidak memiliki hasil kinerja sama sekali. Gerbang Nusa membuat laporan yang diajukan kepada BPK terkait dengan gagal konstruksi kegiatan pembangunan turap dan perbaikan Jalan Pangkalan 1 Bantargebang. Upaya selanjutnya adalah mengenai kemacetan lalu lintas yang dampaknya tidak dialami oleh masyarakat Bantargebang saja tetapi menyeluruh, kami bekerjasama dengan pihak Dishub untuk menertibkan armada truk dan memberikan sanksi yang tegas apabila masih parkir di bahu jalan.” (Wawancara Abdul Hasan, 31 Mei 2023)

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi keresahan masyarakat terhadap permasalahan sosial turut diperjelas sebagaimana disampaikan oleh informan ketiga Bapak Deddy sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerbang Nusa. Adapun penjelasan terkait dengan pendapat Bapak Deddy sebagai berikut:

“Tidak adanya laporan penanggung jawaban yang dibuat oleh tim monev membuat masyarakat resah sehingga kami harus turun tangan untuk

mengawasi tim tersebut dengan cara membuat laporan kepada BPK perihal dugaan gagal konstruksi kegiatan pembangunan turap dan perbaikan jalan. Hal tersebut dikarenakan berhubungan dengan anggaran yang diberikan oleh DKI Jakarta kepada Pemerintah Kota Bekasi, melihat angka kecelakaan yang selalu meningkat dalam berkendara masyarakat jadi resah. Selain itu, upaya yang dilakukan dalam mensejahterakan masyarakat dalam pendidikan adalah melakukan pengawasan permainan zonasi oleh guru, laporan tersebut diajukan oleh Gerbang Nusa kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Adapun upaya dalam menertibkan armada truk yang selalu parkir di bahu jalan, Gerbang Nusa bekerjasama dengan pihak Dishub untuk menertibkan dan memberikan sanksi tegas sehingga kedepannya tidak adalagi truk yang parkir di bahu jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas.” (Wawancara Bapak Deddy, 31 Mei 2023)

Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan keempat Iwan sebagai masyarakat yang bergabung dengan Gerbang Nusa. Adapun pendapat yang diberikan sebagai berikut:

“Berdiskusi dengan Dishub dalam menertibkan armada yang selalu parkir di bahu jalan menurut saya salah satu upaya yang paling efektif untuk dilakukan, disisi lain mereka juga diberikan sanksi yang tegas jika melanggar aturan tersebut. Dishub menjadi alternatif yang cocok karena bertanggung jawab terhadap lalu lintas. Selain itu, dengan dilakukannya pengawasan terhadap tim monev yang tidak memiliki LPJ menjadikan kami tahu bahwa ada perputaran uang didalamnya, masyarakat yang menjadi bagian dari tim monev bukan berasal dari lingkungan TPST Bantargebang sendiri melainkan mereka yang menjadi PNS dan PKK. Sehingga dinilai tidak dapat bekerja dengan maksimal karena yang mereka kerjakan bukanlah ranah yang mereka kuasai. Upaya selanjutnya terkait dengan pendidikan, Gerbang Nusa melakukan pengawasan terhadap permainan zonasi yang dilakukan oleh guru. Hal tersebut tentunya merugikan masyarakat yang ingin menempuh pendidikan tetapi harus mengeluarkan uang secara cuma-cuma.” (Wawancara Iwan, 31 Mei 2023)

Berdasarkan keempat informan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi keresahan pada bidang sosial adalah: Pertama, terkait dengan menertibkan armada yang parkir di bahu jalan supaya tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kedua, melakukan pengawasan terhadap tim monitoring dan evaluasi (monev) dengan cara melaporkan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) perihal dugaan gagal konstruksi kegiatan pembangunan turap dan perbaikan Jalan Pangkalan 1 Bantargebang. Serta pengawasan terhadap adanya perputaran uang sehingga menimbulkan oknum yang tidak seharusnya masuk kedalam tim monev dapat menjadi bagian dari tim monev. Ketiga, melakukan pengawasan dalam permainan zonasi yang dilakukan oleh guru dalam ranah pendidikan yang membuat masyarakat menjadi dirugikan.

3. Upaya yang Dilakukan dalam Bidang Ekonomi

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi keresahan masyarakat dalam bidang ekonomi sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan pertama Bapak Jamalludin selaku pendiri organisasi kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Adapun pendapat Bapak Jamalludin sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi yaitu terkait dengan uang kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Dana yang diberikan oleh Pemerintah DKI Jakarta kepada Kota Bekasi pada tahun 2020 mencapai Rp. 367.226.865.000. Uang kompensasi yang diberikan kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan sebesar Rp. 400.000,00 setiap bulannya. Tetapi kesepakatan antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi adalah BLT tersebut diberikan setiap tiga bulan sekali. Belum lagi pembagian BLT tersebut tidak menyeluruh (tidak semua masyarakat mendapatkannya). Upaya yang dilakukan oleh Gerbang Nusa adalah dengan melakukan pemerataan pembagian BLT kepada masyarakat, dan mengedukasi masyarakat bahwa jangan terlalu terlena dengan dana yang diberikan karena dana tersebut tidak sebanding dengan apa yang akan dialami oleh masyarakat dalam jangka waktu panjang nanti, bisa saja anak dan cucu mereka akan terus dirugikan dari hadirnya TPST Bantargebang. Upaya selanjutnya adalah berhubungan dengan rendahnya pendidikan di Kecamatan Bantargebang yang menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi pengangguran, upaya yang dilakukan oleh Gerbang Nusa adalah dengan memberikan lapangan pekerjaan. Diantaranya adalah dengan memasuki tim monitoring dan evaluasi (monev), bekerja di TPST Bantargebang, dan bekerja di beberapa perusahaan/PT.” (Wawancara Bapak Jamalludin, 31 Mei 2023)

Pembahasan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan tersebut turut dijelaskan sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kedua Abdul Hasan. Adapun pembahasan tersebut sebagai berikut:

“Sebagai masyarakat saya pikir uang sebesar Rp. 400.000,00 tidak cukup sebagai dana kompensasi mungkin begitupun bagi masyarakat lainnya. Terlebih pemerintah menetapkan bahwa uang tersebut diberikan setiap tiga bulan sekali, lebih baik sebulan sekali karena kita tidak tahu kebutuhan setiap orang bagaimana. Terkait dengan tidak meratanya bantuan langsung tunai tersebut beberapa masyarakat merasa dirugikan, karena bagaimanapun itu hak yang harus mereka dapatkan dari hadirnya TPST Bantargebang. Oleh karena itu, Gerbang Nusa melakukan upaya terhadap pemerataan pembagian uang kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) walaupun anggaran yang diberikan tidak bisa di ganggu gugat setidaknya seluruh masyarakat yang terkena dampak dari hadirnya TPST Bantargebang mampu mendapatkan uang tersebut. Upaya lainnya adalah terkait dengan lapangan pekerjaan, sejujurnya hadirnya gerakan ini walaupun belum lama tetapi sudah mampu mengupayakan lapangan kerja untuk masyarakat yang menjadi pengangguran. Adapun beberapa lapangan pekerjaan yang diberikan seperti kuota untuk masuk kedalam tim monev, bekerja di TPST Bantargebang, dan bekerja di PT.” (Wawancara Abdul Hasan, 31 Mei 2023)

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi keresahan masyarakat terhadap permasalahan ekonomi turut diperjelas sebagaimana disampaikan oleh informan ketiga Bapak Deddy sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerbang Nusa. Adapun penjelasan terkait dengan pendapat Bapak Deddy sebagai berikut:

“Terbukanya lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh Gerbang Nusa sebagai bentuk upaya dalam mengatasi keresahan dalam bidang ekonomi menurut saya sangat efektif. Walaupun beberapa diantara mereka bekerja di PT atau TPST Bantargebang, setidaknya perbulannya mereka memiliki pemasukan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Upaya selanjutnya adalah terkait dengan BLT, keresahan masyarakat yang merasa di rugikan dari hadirnya TPST Bantargebang terlebih tidak mendapatkan uang kompensasi membuat masyarakat geram. Gerbang Nusa memberikan upaya dalam meratakan BLT kesetiap masyarakat yang belum mendapatkan haknya. Selain itu, kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan terlalu senang dengan uang yang diberikan oleh pemerintah, mereka harus memikirkan kualitas kehidupan untuk jangka panjang.” (Wawancara Bapak Deddy, 31 Mei 2023)

Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan keempat Iwan sebagai masyarakat yang bergabung dengan Gerbang Nusa. Adapun pendapat yang diberikan sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan oleh Gerbang Nusa sebagai wadah aspirasi keresahan masyarakat adalah dengan melakukan pemerataan bantuan langsung tunai (BLT) sehingga hak masyarakat dapat terpenuhi, terkait dengan BLT organisasi ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya kehidupan dalam jangka waktu panjang jika dibandingkan dengan uang kompensasi yang diberikan karena tidak dapat menutup kerugian yang dialami oleh masyarakat. Upaya selanjutnya adalah dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang menganggur supaya mereka memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, lapangan pekerjaan yang diberikan adalah untuk masyarakat yang paham terkait dengan permasalahan di TPST Bantargebang dimasukkan kedalam tim monitoring dan evaluasi (monev), sedangkan masyarakat awam lainnya dibantu untuk bekerja di TPST Bantargebang atau perusahaan dan PT yang terdapat disekitar TPST Bantargebang.” (Wawancara Iwan, 31 Mei 2023).

Berdasarkan keempat informan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi keresahan pada bidang ekonomi adalah: Pertama, Gerbang Nusa mengupayakan dalam pemerataan uang kompensasi berupa BLT yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat karena beberapa masyarakat belum terpenuhi akan haknya. Kedua, terbukanya lapangan pekerjaan yang diberikan oleh Gerbang Nusa dalam membantu perekonomian masyarakat yang rendah. Pekerjaan yang diberikan adalah bergabung dengan tim monev merupakan salah satu upaya yang paling selektif karena hanya masyarakat yang mengerti akan lingkungan mereka sendiri yaitu masyarakat yang bertempat tinggal disekitar TPST

Bantargebang. Selain itu, masyarakat lainnya bekerja di lingkungan TPST Bantargebang dan perusahaan atau PT yang terletak di wilayah TPST Bantargebang. Ketiga, mengedukasi masyarakat yang belum paham akan pentingnya kemaslahatan hidup dalam jangka waktu panjang yaitu dengan diberikannya uang kompensasi berupa BLT oleh pemerintah tidak dapat menutup kerugian yang dialami masyarakat dalam jangka waktu panjang.

McCarthy dan Mayer Zald (1977) mengemukakan bahwa pada gerakan sosial terdapat upaya yang digunakan dalam menciptakan sebuah perubahan. Keterlibatan dalam suatu gerakan sosial dinilai bukan menjadi suatu dampak yang berasal dari keadaan dalam perkembangan psikologis, tetapi nilai sebagai reaksi sebagian proses pengambilan keputusan yang rasional dengan mempertimbangan antara keuntungan dan kerugian yang mampu didapatkan. Selain itu, menurut McCarthy beberapa elemen dibutuhkan dalam gerakan sosial untuk melaksanakan berbagai upaya yang dilakukan serta bagaimana proses dari elemen tersebut, khususnya sumber daya yang dikordinasi kemudian digunakan dalam sebuah gerakan sosial tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Bantargebang (Gerbang) Nusantara dalam mengatasi permasalahan-permasalahan serta keresahan yang dialami oleh masyarakat mencakup beberapa sistem kehidupan yaitu baik dari segi sosial, ekonomi, ataupun lingkungan. Menurut McCarthy dan Mayer Zald (1977) individu yang berasal dari kelas sosial sama akan memiliki suatu kepentingan yang sama, diantaranya dapat memunculkan suatu kepentingan politik yang sama, sehingga mereka dapat menjalin antara satu dengan lainnya dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui sebuah gerakan sosial. Dalam permasalahan yang telah disampaikan ialah tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat karena permainan kepentingan politik oknum yang tidak bertanggung jawab dalam tim monev menyebabkan masyarakat tidak dapat memanfaatkan infrastruktur/ *public goods* (sarana dan prasarana) yang seharusnya dapat digunakan yaitu kenyamanan berkendara melalui Jalan Pangkalan 1 Bantargebang. Oleh karena itu, dengan hadirnya kepentingan yang sama tersebut gerakan masyarakat Bantargebang (Gerbang) Nusantara mengajukan laporan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sehingga menarik perhatian BPK untuk mengevaluasi lebih lanjut terkait dengan dana infrastruktur.

Ketidak merataan pembagian uang kompensasi tersebut membuat masyarakat geram, karena nominal dana yang diberikan oleh pemerintah tidak besar. Mayoritas dari mereka bertanya-tanya dengan jumlah nominal tersebut mengapa tidak bisa dibagikan secara merata. Menurut McCarthy dan Mayer Zald (1977) suatu kemarahan dan frustrasi yang disebabkan oleh ketegangan struktural tidak serta merta mendorong individu untuk terlibat dalam suatu gerakan sosial, kecuali tersedianya sarana yang dapat memungkinkan mereka agar terlibat dalam gerakan sosial, sarana tersebut merupakan sumber daya baik *tangible* (berwujud) maupun *intangible* (tidak berwujud).

Sumber daya yang dimaksud dalam pembahasan terkait dengan upaya yang dilakukan adalah masyarakat bergabung dan meluapkan hal-hal yang dirasakan kepada gerakan masyarakat Bantargebang (Gerbang) Nusantara dalam menghadapi permasalahan yang dialami, yaitu tidak terpenuhinya sumber daya *tangible* (berwujud). Berbeda dengan upaya sebelumnya, sumber daya tersebut adalah terkait dengan uang dan komunikasi. Gerakan tersebut berjalan karena masyarakat berjuang dalam mendapatkan haknya yang dirugikan akibat TPST Bantargebang. Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti terkait dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam proses pencairan bantuan langsung tunai (BLT), komunikasi antara pemerintah dan masyarakat seharusnya dibangun erat supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara satu dengan lainnya.

Menurut McCarthy dan Mayer Zald (1977) dalam teori mobilisasi sumber daya, proses pengambilan sebuah keputusan dapat terlibat dalam gerakan sosial, aktor rasional dapat mempertimbangkan *cost* (kerugian) dan *benefits* (keuntungan) yang akan mereka dapatkan dan mereka akan menentukan atau memilih strategi yang paling efektif untuk digunakan dalam mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Strategi yang dipilih dan digunakan oleh gerakan masyarakat Bantargebang (Gerbang) Nusantara dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan memanfaatkan peluang kerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dalam menertibkan truk sampah yang setiap harinya parkir dibahu jalan dan menyebabkan jalan menjadi rusak, kerjasama tersebut tentunya mendatangkan sebuah *benefits* (keuntungan) bagi masyarakat yang menggunakan jalan tersebut, baik mereka yang ikut memperjuangkan ataupun tidak ikut memperjuangkan (*Free Ride*). Karena

kedepannya mereka tidak harus mengalami *cost* (kerugian) yang disebabkan oleh armada TPST Bantargebang. Istilah pertimbangan tersebut dikenal dengan proses rasional (melalui mekanisme pengambilan keputusan) dengan memilih strategi terbaik untuk meminimalisir *cost* (kerugian) yang didapatkan, karena keputusan akan tindakan yang diambil oleh gerakan masyarakat Bantargebang (Gerbang) Nusantara akan dipengaruhi oleh berubahnya keuntungan dan kerugian dalam lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk diketahui adalah sumber daya yang dimiliki (Edwards, 2014).

Upaya yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara dalam mengatasi keresahan masyarakat terbagi menjadi 3 bidang yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pada bidang sosial terdapat tiga upaya yang dilakukan. Selain itu, pada bidang lingkungan terdapat dua upaya yang dilakukan, serta pada bidang ekonomi terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh Gerbang Nusa. Berbeda dengan peneliti Yosi Novita Damayanti, Nadilatun Nurin Afina, dan Nanda Zahiro Ar Ridlo (2023) dalam artikelnya juga mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan dalam menangani keresahan masyarakat terkait dengan sampah terbagi menjadi dua. Pertama, peningkatan kreativitas masyarakat dalam pengolahan sampah melalui pengembangan potensi yang ada di Desa Petak. Kedua, strategi pemasaran dan promosi melalui media online dilakukan agar masyarakat dapat menyalurkan produk-produk kerajinan hasil pengolahan sampah (Damayanti & dkk, 2023).

BAB V

DAMPAK GERAKAN MASYARAKAT BANTARGEBOANG NUSANTARA TERHADAP MASYARAKAT

A. Dampak dalam Bidang Sosial dan Ekonomi yang Dihasilkan Melalui Upaya Gerakan Masyarakat Bantargeboang

1. Dampak dalam Bidang Sosial

Dampak yang ditimbulkan dalam bidang sosial sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan pertama Bapak Jamalludin selaku pendiri organisasi kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Adapun pendapat Bapak Jamalludin sebagai berikut:

“Gerbang Nusa bekerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) dalam menertibkan armada yang sering parkir dibahu jalan. Upaya tersebut ternyata menghasilkan dampak yang dapat dirasakan oleh para pengguna jalan, tidak lagi ditemukannya armada parkir di bahu jalan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kemacetan lalu lintas di jam sibuk. Selain itu, dalam melakukan pengawasan terhadap tim monitoring dan evaluasi (monev) Gerbang Nusa berhasil melaporkan tim monev kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) dengan dugaan gagal konstruksi kegiatan pembangunan turap dan perbaikan Jalan Pangkalan 1 Bantargeboang dan mendapatkan respon yang baik oleh BPK atas laporan yang dibuat, BPK akan menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, dalam pengawasan tim monev juga kami berhasil mengeluarkan pegawai yang tidak berkepentingan dalam memasuki tim monev dan digantikan dengan masyarakat sekitar. Dampak lainnya adalah terkait dalam dunia pendidikan, pungutan liar yang dilakukan oleh oknum guru pada sistem zonasi penerimaan murid di salah satu sekolah Bantargeboang sudah ditindak lanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi, diantaranya ialah diberikan sanksi berupa skorsing, setelah video anak kecil bernama Key viral di media sosial kasus tersebut langsung cepat ditangani oleh Instansi Pemerintah Kota Bekasi” (Wawancara Bapak Jamalludin, 31 Mei 2023)

Gambar 16. 1 Tanggapan BPK Terhadap Laporan Dugaan Gagal Konstruksi



Sumber: Dokumentasi Gerbang Nusa

Dampak yang timbul pada bidang sosial turut diperjelas sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kedua Abdul Hasan sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa). Adapun pendapat Abdul Hasan sebagai berikut:

“Sebagai masyarakat saya merasakan bahwa Gerbang Nusa memberikan dampak positif selama gerakan ini terbentuk, khususnya dalam bidang lingkungan. Pertama, armada truk pengangkut sampah menjadi lebih tertib dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan untuk tidak parkir di bahu jalan oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Kedua, dampak yang dihasilkan dalam dunia pendidikan ialah beberapa guru yang terlibat dalam kasus pungutan liar (pungli) sistem PPDB zonasi di Bantargebang sudah teratasi dan diberikan sanksi berupa skorsing oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ketiga, selama pengawasan kepada tim monev Gerbang Nusa menemukan bahwa terjadinya perputaran uang didalam keanggotaan tersebut dan tidak adanya laporan pertanggung jawaban sehingga membuat Gerbang Nusa melaporkan hal tersebut ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan mendapatkan tanggapan yang baik. Terjadinya pengurangan anggota tim monev yang tidak berkepentingan memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga posisi tersebut dapat diisi oleh masyarakat setempat yang paham akan lingkungan mereka.” (Wawancara Abdul Hasan, 31 Mei 2023)

Dampak lainnya turut diperjelas sebagaimana disampaikan oleh informan ketiga Bapak Deddy sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa). Adapun pendapat Bapak Deddy sebagai berikut:

“Pengawasan terhadap tim monev yang dilakukan oleh Gerbang Nusa selama beberapa bulan menghasilkan dampak yang baik, yaitu dengan ditemukannya kecurangan, perputaran uang, serta tidak adanya laporan penanggungjawaban selama tim tersebut terbentuk. Kemudian Gerbang Nusa segera membuat laporan terkait dengan dugaan gagal konstruksi pembangunan turap dan perbaikan jalan yang kirim ke Badan Pengawas Keuangan (BPK), laporan

tersebut ditanggapi dengan sangat baik oleh pihak BPK dan akan menindak lanjuti proses penyelidikan. Selanjutnya, pengurangan pegawai juga dilakukan karena peristiwa tersebut, sehingga masyarakat memiliki peluang untuk dapat bergabung dengan tim monev. Adapun dampak selanjutnya yaitu terkait dengan armada pengangkut sampah yang dinilai lebih tertib dan tidak ditemukan parkir di bahu jalan lagi, hal tersebut berdampak langsung dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Dampak lainnya dalam bidang pendidikan, beberapa oknum guru sudah diberikan skorsing dan ditindak lanjuti oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan pengawasan di beberapa sekolah lainnya, sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi disetiap tahunnya karena kasihan bagi mereka yang tidak mampu untuk memiliki biaya sekolah harus menghentikan mimpinya hanya karena masalah biaya.” (Wawancara Bapak Deddy, 31 Mei 2023)

Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh informan keempat Iwan mengenai dampak yang dihasilkan. Adapun penjelasan terkait dampak dalam bidang sosial sebagai berikut:

“Dampak yang dihasilkan dari beberapa upaya di segala bidang menarik perhatian saya sebagai masyarakat, tentu masyarakat lainnya juga antusias dan mendukung Gerbang Nusa sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat. Pertama, armada truk pengangkut sampah menjadi lebih tertib dan menaati peraturan lalu lintas hal ini tentu berdampak baik bukan hanya untuk masyarakat setempat saja, melainkan untuk semua pengguna jalan karena dengan sikap tertib tersebut kemacetan lalu lintas jadi dapat di minimalisir sepanjang hari, terlebih di jam sibuk masyarakat. Kedua, diberikannya sanksi berupa skorsing kepada guru yang melakukan kecurangan dalam sistem PPDB sebagai teguran menurut saya dapat membawa pengaruh baik karena kedepannya bisa menjadi contoh untuk panitia yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PPDB di sekolah manapun. Ketiga, pengawasan terhadap tim monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gerbang Nusa turut menjadi perhatian publik karena dalam keanggotaan monev tersebut ditemukan kecurangan, perputaran dana yang diberikan oleh pemerintah, dan tidak adanya laporan penanggungjawaban yang dibentuk setiap minggu atau setiap bulannya. Adapun pengurangan anggota tim monev yang tidak memiliki kepentingan atau mengerti seluk beluk dari lingkungan TPST Bantargebang kemudian digantikan dengan beberapa masyarakat yang tinggal di wilayah TPST Bantargebang. Dampak tersebut membawa pengaruh yang baik untuk masyarakat dan lingkungannya, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kerugian akibat hal-hal seperti itu.” (Wawancara Iwan, 31 Mei 2023)

Dampak lainnya turut diperjelas sebagaimana disampaikan oleh informan kelima Ibu Suminah sebagai tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah TPST Bantargebang. Adapun pendapat Ibu Suminah sebagai berikut:

“Gerbang Nusa dalam mengatasi permasalahan diruang lingkup masyarakat menghasilkan suatu dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar maupun tidak. Saat ini, kemacetan hanya terjadi karena adanya lampu merah dan mungkin jam sibuk masyarakat dalam beraktivitas. Tidak ditemukannya lagi truk-truk yang parkir di bahu jalan, sehingga masyarakat dapat mengefisien waktu dengan tidak terhambat karena kondisi lalu lintas. Selanjutnya, tanggapan saya sebagai masyarakat dengan dilakukannya

pelaporan team monev cukup membantu dalam memberantas kasus korupsi, karena APD yang diterima oleh Kota Bekasi tidak digunakan dengan sebenarnya dalam menyejahterakan masyarakat. Pada dunia pendidikan dampak yang dihasilkan berguna untuk masyarakat yang ingin bersekolah tetapi terhalang oleh biaya, dengan melaporkannya oknum guru kedepannya bisa menjadi pelajaran untuk para guru lainnya supaya tidak memanfaatkan atau memaksakan kondisi seseorang yang tidak sesuai dengan kemampuannya, yaitu membeli kursi untuk dapat bersekolah.” (Wawancara Ibu Suminah, 16 September 2023)

Dampak yang timbul pada bidang sosial turut diperjelas sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan keenam Bapak Romin sebagai tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah TPST Bantargebang. Adapun pendapat Bapak Romin sebagai berikut:

“Adanya pergantian anggota di team monev yaitu anggota yang tidak berkepentingan membuat keresahan masyarakat mereda. Pada dasarnya anggota-anggota tersebut tidak bekerja sesuai dengan ketentuan. Waktu pergantian anggota kemarin saya sempat ditawarkan ingin menjadi anggota tersebut atau tidak. Berhubung saya memiliki pekerjaan dan kesibukan lainnya, terpaksa menolak ajakan tersebut. Menurut saya, upaya tersebut memberikan dampak yang baik karena kedepannya hal-hal yang bermasalah dan yang harus ditangani dapat diatasi dengan baik. Kemudian dampak lainnya diharapkan mampu membawa perubahan dalam dunia pendidikan dengan kepekaan dan tanggapan yang cepat dalam menangani kasus pungli di sistem PPDB menjadi gambaran untuk guru-guru lainnya, karena kecurangan tersebut dapat berdampak pada karir mereka kedepannya. Adapun perubahan yang terjadi dan dapat dirasakan oleh masyarakat Bantargebang maupun pengguna jalan lainnya, yaitu kemacetan dapat diatasi dan hal tersebut sangat membantu pengguna jalan dalam beraktivitas.” (Wawancara Bapak Romin, 16 September 2023)

Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh informan ketujuh Ibu Kasur mengenai dampak yang dihasilkan. Adapun penjelasan terkait dampak dalam bidang sosial sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan dalam bidang pendidikan dengan memiliki keberanian untuk melaporkan para guru yang melakukan pungli sangat saya akui, karena disetiap tahun ajaran baru kasus seperti ini selalu terjadi. Tetapi, kebanyakan orang tua yang mendapatkan perlakuan tersebut memilih untuk bungkam dan tetap membeli kursi supaya anak mereka bisa tetap sekolah. Adanya Tindakan tersebut seharusnya membuat orang-orang yang melakukan kecurangan seperti berubah pikiran untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu, karena menurut saya perbuatan tersebut termasuk korupsi. Sedangkan untuk kemacetan lalu lintas yang saat ini sudah lumayan teratasi memberikan dampak bagi pengguna jalan seperti saya yang selalu ke pasar untuk berbelanja sayur dan termasuk mereka yang beraktivitas pada jam sibuk.” (Wawancara Ibu Kasur, 17 September 2023)

Gambar 17. 1 Mind Mapping Dampak dalam Bidang Sosial



Berdasarkan ketujuh informan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya dalam bidang sosial yaitu: Pertama, hadirnya peraturan atau tata tertib yang diberikan berasal dari kerjasama antara Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dinilai efektif dalam menertibkan armada yang sebelumnya banyak ditemukan parkir di bahu jalan dan berdampak pada kemacetan lalu lintas di setiap harinya serta membuat masyarakat dirugikan karena waktu yang dimiliki habis untuk perjalanan. Kedua, upaya yang dilakukan dengan cara mengawasi kinerja tim monitoring dan evaluasi (monev) dalam bekerja menghasilkan dampak positif yang membuat masyarakat tidak lagi dirugikan, yaitu Gerbang Nusa melaporkan kinerja tim monev kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Laporan tersebut diterima oleh BPK dan ditanggapi dengan baik bahwa akan dilakukannya penyelidikan terkait dengan dugaan gagal konstruksi pembangunan turap dan perbaikan Jalan Pangkalan 1 Bantargebang. Ketiga, Gerbang Nusa mengetahui bahwa didalam tim monitoring dan evaluasi (monev) yang dibentuk oleh pemerintah tidak sesuai dengan UU No.5 Tahun 2019 merupakan orang yang memang dibentuk untuk mengawasi berbagai aspek seperti apa saja aktivitas sehari-hari, apa saja dampak yang diterima oleh masyarakat, apa saja yang harus diperbaiki. Segala aspek tersebut tidak ada yang dilaksanakan oleh tim monev, anggaran yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta kepada Kota Bekasi bernilai tidak sedikit. Hal-hal penting yang seharusnya dikerjakan justru terabaikan dengan

tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat dalam mengawasi TPST Bantargebang, selain itu anggota tim monev bukan berasal dari orang-orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas lingkungan mereka, justru anggotanya berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kecurangan tersebut dinilai merugikan masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, pengurangan anggota tim monev yang dilakukan akibat Gerbang Nusa menarik perhatian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang menjadi pengangguran.

Keempat, dalam dunia pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Bekasi menanggapi atas laporan jual beli kursi saat PPDB di salah satu Sekolah Dasar (SD) di wilayah Bantargebang seharga Rp. 1.500.000 – Rp. 3.000.000 supaya masyarakat dapat bersekolah. Mengenai hal tersebut Institusi Pemerintah tersebut memberikan sanksi berupa skorsing kepada oknum guru tersebut. Hal tersebut menjadi sebuah pelajaran bagi seluruh guru yang pada dasarnya mengajarkan perihal moral. Praktik pungutan liar (Pungli) terjadi di lingkungan pendidikan menjadi sebuah ancaman karena dalam mempengaruhi moral generasi penerus bangsa. Praktik pungli dinilai sebagai perbuatan tercela, jika semua masalah dapat diatasi atau terselesaikan melalui jalur uang, maka kasus korupsi di negara ini akan terus meningkat karena pada dasarnya yang diserang atau dipermainkan adalah dunia yang paling berpengaruh pada moral, yaitu dunia pendidikan.

2. Dampak dalam Bidang Ekonomi

Dampak hadir sebagai sebab akibat yang ditimbulkan dengan melakukan upaya dalam menangani suatu permasalahan sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan pertama Bapak Jamalludin selaku pendiri organisasi kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Adapun pendapat Bapak Jamalludin sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan dalam pemerataan dana kompensasi berdampak pada kehidupan masyarakat Bantargebang untuk saat ini, karena beberapa masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan dana kompensasi berupa BLT menjadi dapat walaupun diberikannya setiap tiga bulan sekali. Dana kompensasi tersebut digunakan oleh mayoritas masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti belanja bulanan, kebutuhan makan dan pokok lainnya. Masyarakat sangat bersyukur atas upaya yang dilakukan oleh Gerbang Nusa dalam pemerataan BLT karena dinilai dapat membantu mengatasi kerugian yang dialami oleh masyarakat. Selain itu, Gerbang Nusa berupaya dalam membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang

menganggur. Masyarakat dengan senang menerima bantuan tersebut karena dengan dilakukannya hal tersebut berdampak baik bagi kehidupan masyarakat, mereka dapat bekerja dan membuat perekonomian menjadi stabil dan masyarakat bisa mendapatkan penghasilan. Dampak terakhir ialah berasal dari edukasi yang diberikan oleh Gerbang Nusa kepada masyarakat, saat ini mereka paham bahwa diberikannya uang kompensasi berupa BLT tidak dapat menutup kerugian yang ditimbulkan dari TPST Bantargebang terutama dari segi lingkungan dan Kesehatan.” (Wawancara Bapak Jamalludin, 31 Mei 2023)

Dampak yang timbul pada bidang ekonomi turut diperjelas sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kedua Abdul Hasan sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa). Adapun pendapat Abdul Hasan sebagai berikut:

“Rendahnya pendidikan di Kecamatan Bantargebang membuat masyarakat banyak yang tidak bekerja, upaya yang dilakukan oleh Gerbang Nusa dalam membantu masyarakat ialah dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tentunya upaya tersebut memberikan dampak yang baik dan berkepanjangan bagi masyarakat, saat ini masalah tersebut sedikit demi sedikit sudah teratasi. Beberapa masyarakat di RW 05 dimasukkan kedalam tim monev, bekerja di TPST Bantargebang, dan beberapa PT yang terdapat di sekitar TPST Bantargebang. Adapun dampak dari upaya yang dilakukan lainnya yaitu dengan dilakukannya pemerataan bantuan langsung tunai (BLT) saat ini masyarakat telah mendapatkan haknya dan meminimalisir kerugian yang dialami. Uang kompensasi tersebut digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti membeli gas, membayar listrik, air, dan sebagainya. Dampak dari upaya lainnya terkait dengan edukasi yang dilakukan oleh kami sebagai gerakan masyarakat, saya sendiri pun menjadi teredukasi berkat Gerbang Nusa bahwa dengan adanya uang kompensasi yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat menggantikan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat secara berkepanjangan terutama masyarakat yang dirugikan terkait dengan lingkungan dan kesehatan.” (Wawancara Abdul Hasan, 31 Mei 2023)

Dampak lainnya turut diperjelas sebagaimana disampaikan oleh informan ketiga Bapak Deddy sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa). Adapun pendapat Bapak Deddy sebagai berikut:

“Upaya dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan bahayanya TPST Bantargebang dan dana kompensasi yang tidak cukup untuk mengatasi kerugian yang telah dialami berdampak pada masyarakat, saat ini mayoritas masyarakat sudah mengetahui bahaya yang akan dialami dalam jangka waktu panjang. BLT yang didapatkan masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun nominal yang diberikan tidak banyak. Pada dasarnya masyarakat kurang peka dan peduli akan bahaya dari TPST Bantargebang, tetapi untuk saat ini masyarakat paham akan bahaya area tersebut untuk generasi selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan tingginya pengangguran di Kecamatan Bantargebang yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan, saat ini masyarakat dapat bekerja walaupun dengan gaji yang tidak

besar. Gerbang Nusa memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yaitu diantaranya adalah dengan memasukkan masyarakat kedalam tim monev yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bekasi, bekerja di TPST Bantargebang, dan beberapa PT yang terdapat di area Kecamatan Bantargebang. Dampak dari upaya selanjutnya adalah dilakukannya pemerataan BLT membuat masyarakat bersyukur karena hak yang wajib mereka dapatkan telah berhasil diraih karena Gerbang Nusa.” (Wawancara Bapak Deddy, 31 Mei 2023)

Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh informan keempat Iwan mengenai dampak yang dihasilkan. Adapun penjelasan terkait dampak dalam bidang ekonomi sebagai berikut:

“Saya merupakan salah satu masyarakat yang pada saat itu belum mendapatkan uang kompensasi dari pemerintah yaitu BLT, upaya yang dilakukan oleh Gerbang Nusa sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat saya pikir cukup membantu dan memberikan efek yang baik. Saat ini, saya dan masyarakat lainnya mendapatkan hak kami dalam menerima uang kompensasi tersebut. Walaupun uang tersebut diberikannya per tiga bulan sekali, tetapi menurut saya dana tersebut sangat membantu bagi masyarakat terutama mereka yang tergolong miskin, uang tersebut biasanya digunakan ibu saya untuk membeli minyak, gas, dan bahan pokok lainnya. Selain itu, saya juga bersyukur atas lapangan pekerjaan yang dapat bekerja dalam waktu beberapa bulan ini di salah satu PT sekitar sini, dengan saya bekerja jadi keluarga saya memiliki pemasukkan untuk bertahan hidup karena bapak saya sudah tua dan tidak dapat bekerja lagi. Dampak lainnya adalah edukasi yang diberikan oleh Gerbang Nusa dinilai cukup mengedukasi masyarakat dalam memahami pentingnya Kesehatan dan lingkungan dari pada uang kompensasi yang jumlahnya hanya sedikit, pada dasarnya masyarakat terlalu senang dalam mendapatkan uang bantuan tersebut tapi tidak sedikitpun dari mereka yang paham akan bahaya yang dapat menimpa mereka dan generasi selanjutnya.” (Wawancara Iwan, 31 Mei 2023)

Dampak lainnya turut diperjelas sebagaimana disampaikan oleh informan kelima Ibu Suminah sebagai tokoh masyarakat di wilayah TPST Bantargebang. Adapun pendapat Ibu Suminah sebagai berikut:

“Adanya edukasi yang diberikan oleh Gerbang Nusa sebagai bentuk perhatian untuk masyarakat, menurut saya sangat berpengaruh. Kami sebagai masyarakat merasakan perubahan dalam pola pikir ya tentunya. Sebelumnya kan orang-orang awam seperti kami tidak terlalu peka terhadap imbasnya lingkungan TPST ini untuk anak cucu kita, setelah dipikir-pikir BLT yang dikasih oleh pemerintah tidak cukup untuk menutup kerugian yang kita alami selama bertahun-tahun. Kalau dampak terkait pemerataan BLT, awalnya saya tidak merasakan dampaknya ya karena pada saat itu saya termasuk salah satu masyarakat yang tidak mendapatkan BLT atau uang kompensasi tersebut. Akhirnya saya usul dan berusaha meminta hak saya kepada Bapak Jamal sekaligus ketua RW disini, walaupun proses mendapatkan BLTnya lama tetapi tidak masalah. Mungkin proses dari sananya yang rumit, saat ini saya cukup terbantu dengan adanya BLT karena bisa menambah uang yang dikeluarkan untuk kebutuhan bulanan.” (Wawancara Ibu Suminah, 16 September 2023)

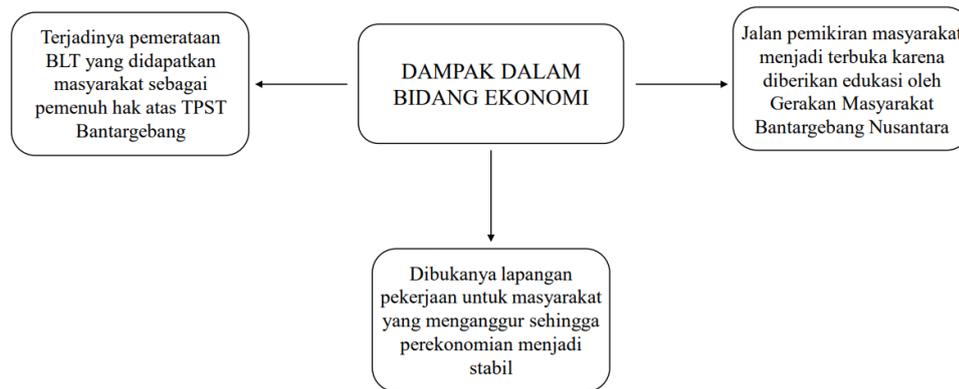
Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh informan keenam Bapak Romin sebagai tokoh masyarakat di wilayah TPST Bantargebang mengenai dampak yang dihasilkan. Adapun penjelasan terkait dampak dalam bidang ekonomi sebagai berikut:

“Dampak yang saya alami sebagai masyarakat cukup merasa puas dan senang karena adanya Gerbang Nusa sebagai wadah bagi masyarakat yang tidak memiliki keberanian untuk bersuara. Masyarakat awam yang tidak ikut berjuang dalam mempertaruhkan haknya bisa ikut merasakan dampak yang baik. Dalam pemerataan BLT yang menurut saya anggarannya tidak besar tetapi cukup membantu pengeluaran keluarga yang digunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok. Kemudian dengan dibukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, upaya tersebut menurut saya sangat membantu mereka yang sulit dalam perekonomiannya saat ini bisa lebih stabil pemasukannya. Program yang dijalankan oleh Gerbang Nusa terkait dengan mengedukasi kami cukup membuat masyarakat menjadi lebih paham akan keselamatan dalam jangka waktu panjang yang menjadi prioritas dibandingkan BLT yang anggarannya hanya Rp. 400.000 per bulan.” (Wawancara Bapak Romin, 16 September 2023)

Dampak yang hadir dalam bidang ekonomi turut diperjelas sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan ketujuh Ibu Kasur sebagai tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah TPST Bantargebang. Adapun pendapat Ibu Kasur sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan Gerbang Nusa dalam pemerataan BLT menurut saya belum terealisasi sepenuhnya, saya tidak tahu BLT tersebut masih dalam proses pencairan atau tidak, karena sampai saat ini saya belum mendapatkan BLT dari pemerintah. Tetapi, untuk upaya lainnya yang dilakukan oleh Gerbang Nusa menurut saya cukup memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Terkait dengan edukasi yang diberikan untuk selalu berpikir bahwa keberlangsungan hidup saya dan masyarakat lainnya lebih penting untuk jangka waktu yang panjang terutama bagi anak-anak dan generasi selanjutnya. Selain itu, dampak dari dibukanya lapangan pekerjaan sangat membantu keluarga saya, karena salah satu anak saya hanya berpendidikan hingga jenjang SMP sehingga sangat sulit dalam mendapatkan pekerjaan di zaman yang semakin maju.” (Wawancara Ibu Kasur, 17 September 2023)

Gambar 18. 1 Mind Mapping Dampak dalam Bidang Ekonomi



Berdasarkan ketujuh informan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak yang dihasilkan melalui upaya yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) dalam bidang ekonomi adalah: Pertama, masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) saat ini sudah mendapatkan dana kompensasi tersebut sebesar Rp. 400.000,00 per bulan yang diberikannya setiap tiga bulan sekali. Uang tersebut dinilai cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, masyarakat antusias dan senang dengan upaya tersebut. Hak yang mereka perjuangkan terkait dengan BLT pada akhirnya dapat dinikmati dan digunakan dengan sebaik-baiknya.

Kedua, dibukanya lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh Gerbang Nusa membuat masyarakat saat ini dapat bekerja dan membuat perekonomian menjadi lebih stabil serta masyarakat mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan tidak hanya mengandalkan dana bantuan langsung tunai (BLT) saja. Ketiga, edukasi yang diberikan oleh Gerbang Nusa membuka jalan pemikiran masyarakat terkait dengan pentingnya kesehatan dibandingkan dengan uang kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Kerugian yang dialami oleh masyarakat tidak dapat digantikan oleh jumlah uang yang diberikan setiap bulannya.

B. Dampak dalam Bidang Lingkungan yang Dihasilkan Melalui Upaya Gerakan Masyarakat Bantargebang

1. Tertib dalam Berkendara

Dampak hadir sebagai sebab akibat yang ditimbulkan dengan melakukan upaya dalam menangani suatu permasalahan sebagaimana dinyatakan oleh seorang

informan pertama Bapak Jamalludin selaku pendiri organisasi kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Adapun pendapat Bapak Jamalludin sebagai berikut:

“Dampak yang ditimbulkan dari upaya yang sudah kami berikan menurut masyarakat mereka sangat senang dan antusias, walaupun beberapa keresahan yang dialami belum teratasi dengan sempurna. Terkait dengan menertibkan armada yang selalu semena-mena dalam menggunakan jalan upaya yang dijalankan tentu memberikan dampak yang positif dengan adanya kerjasama antara Gerbang Nusa dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi. Hingga saat ini armada truck menjadi lebih teratur, tertib, dan mematuhi aturan, serta mengantri jika ingin memasuki area TPST Bantargebang.” (Wawancara Bapak Jamalludin, 31 Mei 2023)

Dampak yang timbul pada bidang lingkungan turut diperjelas sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kedua Abdul Hasan sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa). Adapun pendapat Abdul Hasan sebagai berikut:

“Saya sebagai tokoh masyarakat yang antusias gabung kedalam Gerbang Nusa merasakan kebahagiaan terutama dalam lingkungan kita sendiri, hadirnya Gerbang Nusa membawa banyak dampak positif bagi masyarakat dan beberapa kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat dapat diatasi oleh gerakan ini. Pertama, dengan adanya kerjasama antara Gerbang Nusa dengan pihak DLH Kota Bekasi memberikan dampak positif yang membuat armada truk saat memasuki area TPST Bantargebang bisa lebih tertib.” (Wawancara Abdul Hasan, 31 Mei 2023)

Dampak yang dihasilkan melalui upaya yang dilakukan turut diperjelas sebagaimana disampaikan oleh informan ketiga Bapak Deddy sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa). Adapun pendapat Bapak Deddy sebagai berikut:

“Saya salah satu anggota Gerbang Nusa yang baru bergabung beberapa bulan lalu, saya tertarik bergabung dalam gerakan ini karena melihat dampak-dampak positif yang dihasilkan dalam jangka waktu yang tergolong belum lama sejak berdirinya Gerbang. Adanya perubahan yang dihasilkan dari beberapa upaya yang dilakukan masyarakat menjadi lebih tenang yaitu melalui kerjasama antara Gerbang Nusa dan DLH memberikan dampak positif, truck sampah yang ingin memasuki kawasan TPST Bantargebang saat ini harus mengantri untuk menimbang muatan sampah, dan kecepatan kendaraan turut dikurangi karena melihat banyak aktifitas masyarakat pada pagi hingga sore hari.” (Wawancara Bapak Deddy, 31 Mei 2023)

Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh informan keempat Iwan mengenai keresahan yang dialami sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di area TPST Bantargebang. Adapun penjelasan terkait keresahan dalam bidang lingkungan sebagai berikut:

“Saya cukup merasa senang dengan hadirnya gerakan yang bergerak dalam lingkungan hidup. Gerbang Nusa sangat membantu dalam menangani beberapa permasalahan yang timbul akibat hadirnya TPST Bantargebang, masyarakat sangat menerima adanya gerakan ini karena memberikan dampak positif diantaranya truk sampah sudah tidak semena-mena dalam menggunakan jalan ke area TPST Bantargebang dan selalu mengantri untuk masuk kedalam wilayah timbangan muatan.” (Wawancara Iwan, 31 Mei 2023)

Dampak yang timbul pada bidang lingkungan turut diperjelas sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kelima Ibu Suminah sebagai tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah TPST Bantargebang. Adapun pendapat Ibu Suminah sebagai berikut:

“Jalan yang dilalui oleh masyarakat TPST Bantargebang dalam beraktivitas sehari-hari sekaligus menjadi jalan utama yang digunakan oleh truk pengangkut sampah dalam memasuki kawasan TPST Bantargebang. Biasanya para armada tersebut ugul-ugalan dan selalu saling mendahului antara armada satu dengan armada lainnya, belum lagi banyak ditemukan jalan yang berlubang sehingga membuat para pengguna jalan lainnya celaka. Untuk saat ini dengan dilakukannya kerjasama antara Gerbang Nusa dengan DLH dan dengan dibuatnya kebijakan oleh DLH, para pengendara armada truk tersebut mampu mematuhi dan berkendara dengan tertib serta berhati-hati.” (Wawancara Ibu Suminah, 16 September 2023)

Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh informan keenam Bapak Romin mengenai keresahan yang dialami sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di area TPST Bantargebang. Adapun penjelasan terkait keresahan dalam bidang lingkungan sebagai berikut:

“Jika ditinjau melalui upaya yang dilakukan oleh Gerbang Nusa menurut saya dampak yang muncul dalam lingkungan cukup memberikan perubahan, perubahan tersebut tentunya mampu menguntungkan masyarakat sekitar atau bahkan masyarakat lainnya. Saya pernah mendapatkan laporan dari anak saya bahwa ketika anak saya ingin berangkat sekolah berpapasan dengan armada yang berkendara dengan kecepatan tinggi dan membawa muatan sampah yang melebihi kapasitas dumptruck. Kalau dipikir kejadian tersebut dapat membahayakan masyarakat. Pertama, dengan truk yang melaju dengan kecepatan tinggi bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kedua, dengan membawa sampah melebihi kapasitas juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas akibat sampah yang dibawa jatuh atau terbang, yang memungkinkan sampah tersebut mengeluarkan air dan jalan menjadi licin. Dampak dari adanya kerjasama antara DLH dan Gerbang Nusa saat ini dapat menertibkan armada untuk tidak berkendara dengan kecepatan tinggi.” (Wawancara Bapak Romin, 16 September 2023)

Dampak yang dihasilkan melalui upaya yang dilakukan turut diperjelas sebagaimana disampaikan oleh informan ketujuh Ibu Kasur sebagai tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah TPST Bantargebang. Adapun pendapat Ibu Kasur sebagai berikut:

“Informasi yang saya ketahui terkait dengan TPST itu tidak memiliki jam operasional. Otomatis aktivitas pembuangan sampah terjadi dalam 24 jam setiap harinya. Saya pernah menemukan beberapa armada yang membawa sampah melebihi besarnya truk, bahkan sampah tersebut ada yang menyangkut di jaring penutup bak truk. Belum lagi kondisi truk pengangkut sampah banyak yang mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan sampah-sampah kecil berjatuhan. Dengan adanya kejadian seperti itu lagi-lagi yang terkena dampaknya itu pengendara bermotor. Dengan adanya kesadaran dan teguran yang diberikan oleh DLH menurut saya kondisi tersebut dapat berubah” (Wawancara Ibu Kasur, 17 September 2023)

2. Disiplin dan Menaati Peraturan

Dampak hadir sebagai sebab akibat yang ditimbulkan dengan melakukan upaya dalam menangani suatu permasalahan sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan pertama Bapak Jamalludin selaku pendiri organisasi kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Adapun pendapat Bapak Jamalludin sebagai berikut:

“Armada tersebut mengalami kemajuan disiplin dalam mengangkut sampah. Upaya tersebut sudah dilakukan dengan sebaik mungkin walaupun tidak semua armada sadar akan bahaya karena muatan sampah yang melebihi kapasitas, sehingga tidak membahayakan para pengguna jalan.” (Wawancara Bapak Jamalludin, 31 Mei 2023)

Dampak yang timbul pada bidang lingkungan turut diperjelas sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kedua Abdul Hasan sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa). Adapun pendapat Abdul Hasan sebagai berikut:

“Armada mampu menaati peraturan seperti mengantri untuk menimbang muatan sampah. Selanjutnya saat ini saya sudah minim melihat armada yang membawa muatan sampah melebihi kapasitas truk, mungkin itu dampak dari kerjasama yang dibangun oleh kami dan DLH. Sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat sampah yang jatuh kejalan dan membuat jalan menjadi licin.” (Wawancara Abdul Hasan, 31 Mei 2023)

Dampak yang dihasilkan melalui upaya yang dilakukan turut diperjelas sebagaimana disampaikan oleh informan ketiga Bapak Deddy sebagai tokoh masyarakat yang bergabung dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa). Adapun pendapat Bapak Deddy sebagai berikut:

“Dampak selanjutnya adalah pengemudi menjadi lebih disiplin dalam mengangkut sampah dengan tidak melebihi kapasitas truk, sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat sampah yang jatuh ke jalan.” (Wawancara Bapak Deddy, 31 Mei 2023)

Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh informan keempat Iwan mengenai keresahan yang dialami sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di

area TPST Bantargebang. Adapun penjelasan terkait keresahan dalam bidang lingkungan sebagai berikut:

“Selain itu, beberapa truk sampah menjadi lebih disiplin dalam membawa muatan sampah. Saat ini saya sudah jarang melihat truck yang membawa muatan melebihi kapasitas, mungkin karena sudah diberlakukannya sanksi oleh DLH jadi lebih disiplin. Sehingga tidak menimbulkan dampak negative bagi pengguna jalan.” (Wawancara Iwan, 31 Mei 2023)

Dampak yang timbul pada bidang lingkungan turut diperjelas sebagaimana dinyatakan oleh seorang informan kelima Ibu Suminah sebagai tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah TPST Bantargebang. Adapun pendapat Ibu Suminah sebagai berikut:

“Dampak lain dari adanya kerjasama tersebut memberikan sanksi kepada supir truk yang membawa muatan melebihi kapasitas, aturan tersebut saya pikir cukup efektif karena beberapa armada sudah mulai menaati peraturan dengan tidak membawa sampah melebihi muatan truk.” (Wawancara Ibu Suminah, 16 September 2023)

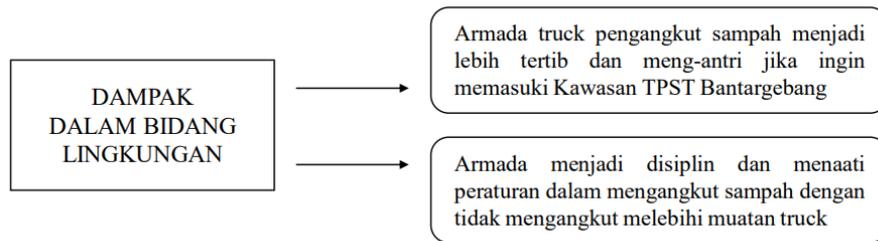
Pendapat yang sama sebagaimana dinyatakan oleh informan keenam Bapak Romin mengenai keresahan yang dialami sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di area TPST Bantargebang. Adapun penjelasan terkait keresahan dalam bidang lingkungan sebagai berikut:

“Dampak dari adanya kerjasama antara DLH dan Gerbang Nusa saat ini dapat dilihat melalui kegiatan dalam membawa sampah tidak melebihi kapasitas, sehingga para pengguna jalan lainnya bisa aman dalam berkendara ” (Wawancara Bapak Romin, 16 September 2023)

Dampak yang dihasilkan melalui upaya yang dilakukan turut diperjelas sebagaimana disampaikan oleh informan ketujuh Ibu Kasur sebagai tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah TPST Bantargebang. Adapun pendapat Ibu Kasur sebagai berikut:

“Untuk beberapa saat belakangan ini setiap saya ke pasar sudah tidak bertemu dengan kondisi truk yang membawa sampah melebihi besarnya truk. Mungkin karena adanya perhatian dalam bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Gerbang Nusa dengan DLH.” (Wawancara Ibu Kasur, 17 September 2023)

Gambar 19. 1 Mind Mapping Dampak dalam Bidang Lingkungan



Berdasarkan ketujuh informan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya dalam bidang lingkungan yaitu: Pertama, kerjasama antara Gerbang Nusa dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi memberikan dampak yang baik terhadap keselamatan masyarakat karena saat ini armada pengangkut sampah mampu menggunakan atau memanfaatkan jalan dengan baik. Mayoritas supir pengangkut sampah menaati tata tertib lalu lintas. Kedua, beberapa armada sudah lebih disiplin dalam mengangkut sampah yaitu dengan tidak membawa sampah melebihi kapasitas truk sehingga tidak membahayakan pengguna jalan akibat kelalaian dalam pengangkutan sampah.

Upaya yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) menghasilkan sebuah reaksi dalam proses keberhasilannya dengan melibatkan suatu keputusan rasional dengan mempertimbangkan apa yang dapat merugikan masyarakat dan apa saja yang dapat menguntungkan masyarakat. Salah satu dampak yang dapat dialami oleh masyarakat ialah dampak dalam bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada bidang lingkungan dampak yang menjadi sebuah perubahan adalah Kerjasama yang dijalin oleh Gerbang Nusa dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi dalam menghasilkan sebuah peraturan baru terkait dengan tata tertib dan kedisiplinan armada pengangkut sampah. Sehingga, kerugian yang terjadi dapat diminimalisir dengan adanya aturan tersebut. Keputusan yang diambil oleh Gerbang Nusa maupun DLH merupakan keputusan yang tergolong rasional.

Sedangkan dalam bidang sosial Gerbang Nusa bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam menertibkan armada yang selalu parkir di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Kerjasama lainnya adalah dengan Institusi Pemerintah yang bertanggungjawab dengan bidang monitoring dan evaluasi karena

dengan mencapai sebuah kesepakatan dalam kerjasama tersebut, anggota tim monev yang tidak berkepentingan bisa digantikan dengan masyarakat yang mengerti terkait ranah lingkungan mereka. Adapun campur tangan yang ikut serta dalam menangani kasus tim monev yang tidak bisa bertanggungjawab atas laporan pekerjaan ialah Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang langsung menanggapi terkait dengan dugaan gagal konstruksi pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan Anggaran Pemerintah Daerah (APD) yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Pada bidang ekonomi, dampak yang dihasilkan memberikan pengaruh perubahan yang cukup membuat masyarakat senang. Pertama, pemerataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk kompensasi terhadap hadirnya TPST Bantargebang yang dinilai merugikan menjadi dana alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun pada dasarnya, masyarakat menilai anggaran yang diberikan tidak dapat menutupi kerugian yang dialami baik dari segi lingkungan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Kedua, dibukanya lapangan pekerjaan dengan bantuan dari Gerakan Masyarakat Bantargebang memberikan pengaruh besar dalam masyarakat yang tidak bekerja, mayoritas masyarakat bersyukur karena dengan pekerjaan yang diberikan saat ini perekonomian masyarakat menjadi lebih stabil dan tercukupi dalam membiayai keperluan hidup seperti sekolah, dan biaya tak terduga lainnya.

Dampak yang dihasilkan melalui upaya Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) dalam mengatasi keresahan masyarakat dinilai sebagai keberhasilan walaupun tidak semua keresahan yang dialami oleh masyarakat dapat teratasi. Hal tersebut selaras dengan Teori Mobilisasi Sumber Daya yang dikembangkan oleh McCarthy dan Mayer Zald (1977) keberhasilan gerakan sosial bergantung pada orang-orang yang mendukung tujuan tersebut serta orang-orang yang secara aktif terlibat dalam mencapai tujuan dengan merelakan diri dan waktu mereka atau dengan menyumbangkan sumber daya dan uang. Penjelasan tersebut termasuk kedalam sumber daya *tangible* (berwujud) dan *intangible* (tidak berwujud).

Teori Mobilisasi Sumber Daya dinilai penting bagi penyelenggara dan pemimpin gerakan sosial untuk memahami teori gerakan sosial tersebut dinilai

dapat mempengaruhi suatu kesuksesan mereka. Gerakan tersebut lebih mampu merencanakan dan memastikan bahwa organisasi yang dibentuk dapat melanjutkan pekerjaan dan meningkatkan serta memperluas layanan mereka dalam mewujudkan segala hal yang telah direncanakan sebelumnya. Upaya yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara memberikan dampak yang cukup membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Gerbang Nusa menjadi salah satu lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang lingkungan dan menerapkan teori mobilisasi sumber daya dalam mewujudkan hal-hal yang telah direncanakan tersebut.

Menurut McCarthy dan Mayer Zald (1977) teori mobilisasi sumber daya mengkaji peran aktor yang terlibat dalam suatu gerakan sosial dengan memaksimalkan pemilihan strategi yang dipilih dalam menjalankan hubungan dengan lingkungan disekitarnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari dibentuknya gerakan sosial tersebut. Keterlibatan dalam suatu gerakan sosial dinilai bukan menjadi sebuah “dampak” yang berasal dari keadaan dalam perkembangan psikologis, tetapi sebagai reaksi sebagian proses pengambilan keputusan yang rasional dengan mempertimbangkan sebuah keuntungan (*benefits*) dan kerugian (*cost*).

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) sebagai organisasi non pemerintah (ORNP) melakukan berbagai upaya dengan memberikan dampak positif dan meminimalisir dampak negative dalam menyempurnakan proses keberhasilan yang ingin dicapai dengan mengedepankan visi dan misi yang telah dibentuk sebelumnya. Gerbang Nusa sebagai ORNP yang bergerak bukan sebagai pengubah, akan tetapi sebagai modifikasi baru untuk melakukan upaya-upaya selanjutnya dengan menghasilkan lebih banyak dampak positif untuk masyarakat. Dampak yang dialami oleh masyarakat saat ini merupakan bentuk pencapaian keberhasilan dari terbentuknya Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) sebagai organisasi non pemerintah dalam mengatasi keresahan dan kekhawatiran yang disebabkan karena adanya TPST Bantargebang.

McCarthy dan Mayer Zald (1977) memfokuskan bahwa gerakan sosial harus membentuk hal-hal yang berkaitan dengan elemen yang berada diluar gerakan

tersebut seperti menggerakkan kelompok yang mengakomodasi Gerakan sosial yang dijalankan untuk menjadi wadah dalam mencapai tujuan yang dibentuk dalam gerakan sosial yang dijalankan. Hal tersebut selaras dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) dalam menghasilkan suatu dampak yang dapat menguntungkan masyarakat. Gerakan tersebut membentuk kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam melaksanakan upaya-upaya baik dalam bidang sosial dan ekonomi maupun lingkungan.

Pada dasarnya DLH dan Dishub berperan penuh dalam mengatasi permasalahan lingkungan serta hal-hal yang dapat merugikan masyarakat di TPST Bantargebang. Selain itu, kedua Instansi Pemerintah tersebut merupakan wadah bagi Gerbang Nusa untuk dapat diajak bekerjasama dalam meminimalisir kerugian, sehingga tujuan yang telah dibentuk sebelumnya oleh Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara dapat dijalankan dengan baik tanpa merugikan pihak lain yaitu masyarakat yang terdampak maupun tidak.

Teori Mobilisasi Sumber Daya membahas bahwa gerakan sosial dinilai sebagai tindakan langsung pada keluhan serta kekecewaan. Menurut McCarthy dan Mayer Zald (1977) keadaan dapat mengakomodasi suatu perubahan setiap nilai dalam tingkah laku nyata serta menekan pada keadaan yang dapat mempermudah organisasi gerakan sosial dalam bermufakat, teori mobilisasi sumber daya mendeskripsikan dua perspektif. Pertama, berhubungan dengan sumber daya fisik dan non fisik yang dimiliki oleh sebuah gerakan seperti pengetahuan, keahlian, dan hubungan tertentu dalam usaha memperoleh tujuan dari gerakan tersebut. Kedua, mobilisasi adalah sebuah mekanisme yang memiliki keterkaitan dengan tokohnya dengan cara menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam meraih sebuah tujuan melalui adanya gerakan.

Implementasi McCarthy dan Mayer Zald (1977) sesuai dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) merupakan gerakan sosial yang dinilai sebagai tindakan langsung yang mengatasi pada keluhan masyarakat. Teori mobilisasi sumber daya mendeskripsikan hal tersebut menjadi dua perspektif. Pertama, keterkaitan dengan sumber daya fisik dan non fisik, seperti Gerbang Nusa memiliki pengetahuan terkait dengan kondisi masyarakat di wilayah TPST

Bantargebang, apa saja yang menjadi keresahan bagi masyarakat, dan sebagainya. Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) memiliki keahlian, jika ditinjau melalui keahlian yang dimiliki oleh Gerbang Nusa sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang lingkungan adalah berani untuk terus terang dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Selain itu, gerakan tersebut memiliki keberanian dalam menyinggung pihak-pihak yang dapat merugikan masyarakat Bantargebang. Kemudian mencari sumber permasalahannya dan mampu untuk melaporkan pihak terkait seperti melaporkan kinerja tim monev kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) terkait dengan dugaan gagal konstruksi pembangunan turap dan perbaikan Jalan Pangkalan 1 Bantargebang. Anggaran dana yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi dinilai tidak digunakan secara efektif dalam menyejahterakan masyarakat setempat. Keberanian lainnya adalah dengan melaporkan kasus oknum guru kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi terkait dengan adanya pungutan liar dalam sistem zonasi.

Tentunya dengan sikap keberanian Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) dalam memberantas penyimpangan oknum tidak bertanggungjawab, dapat memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Adapun sumber daya non fisik lainnya seperti hubungan, Gerbang Nusa memiliki hubungan baik dengan pihak-pihak terkait seperti bekerjasama dengan DLH dalam mengatasi permasalahan lingkungan, bekerjasama dengan Dishub dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, dan instansi lainnya. Kedua, Gerbang Nusa sebagai mobilisasi merupakan sebuah mekanisme yang memiliki keterkaitan dengan cara menggunakan sumber daya yang dimiliki yaitu masyarakat dalam meraih sebuah tujuan melalui adanya gerakan yang menghasilkan suatu dampak berkepanjangan yang mendatangkan keuntungan untuk masyarakat yang terdampak ataupun tidak.

McCarthy dan Mayer Zald (1977) menjelaskan terkait dengan *organization-entrepreneurial*, pendekatan tersebut memberi ruang bagi organisasi non pemerintah yaitu Gerbang Nusa untuk menjadi bagian dari lembaga gerakan sosial. Diantara kasus-kasus yang terjadi terdapat fenomena menarik yang membuktikan bahwa seiring berjalannya waktu gerakan sosial akan berubah menjadi bentuk tindakan yang lebih terlembaga dengan mengalami tingkat dampak negatif yang rendah dalam menanggung ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu

gerakan sosial dalam menyempurnakan proses keberhasilan yang ingin dicapai untuk masyarakat, dalam penjelasan ini organisasi non pemerintah (ORNP) tidak dipandang sebagai sebuah perubahan, akan tetapi sebagai modifikasi baru untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Syifa Izdihar Firdausa Asfianur, Rahmawati Husein, dan Dian Eka Rahmawati (2022) dalam artikelnya juga menemukan bahwa munculnya gerakan sosial sangasanga melawan memberikan perubahan disuatu daerah yang mengalami permasalahan serius, sehingga bentuk-bentuk gerakan sosial yang dijalankan menjadikan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bangkit didalam keterpurukan terkait kondisi lingkungan yang tidak layak huni tetapi dapat diubah menjadi lingkungan yang sangat baik (Asfianur & dkk, 2022).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keresahan masyarakat yang ditimbulkan dari hadirnya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang mencakup empat bidang. Pertama, keresahan dalam bidang lingkungan terjadinya polusi air, armada pengangkut sampah tidak *safety*, populasi lalat meningkat, polusi udara, jalan bergelombang dan berlubang, rusaknya nilai estetika, aroma tidak sedap, sampah berjatuhan di jalan, jalan raya licin, dan banyak armada parkir di bahu jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kedua, keresahan dalam bidang kesehatan ditandai dengan timbulnya berbagai macam penyakit yang menjangkit masyarakat seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), pilek, penyakit kulit, demam, batuk, dan diare. Ketiga, keresahan dalam bidang sosial diantaranya terjadi kemacetan lalu lintas, rendahnya pendidikan dan permainan sistem zonasi oleh oknum guru, serta terbentuknya tim monitoring dan evaluasi (monev) tanpa melibatkan masyarakat setempat. Keempat, keresahan dalam bidang ekonomi mencakup ketidak merataan uang kompensasi bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat, dan tingginya angka pengangguran masyarakat.
2. Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) melakukan berbagai upaya dalam mengatasi keresahan dan kekhawatiran masyarakat. Pertama, upaya yang dilakukan dalam bidang lingkungan adalah melakukan Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menertibkan armada pengangkut sampah yang selalu semana-mena dalam menggunakan jalan. Sehingga, meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan para pengguna jalan atau masyarakat yang sedang beraktifitas. Upaya lainnya adalah dengan memperingati DLH untuk lebih memperhatikan muatan sampah yang dibawa oleh armada ke dalam TPST Bantargebang, karena jika hal tersebut diabaikan akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas akibat sampah yang jatuh ke jalan dan membuat jalan menjadi licin. Kedua, upaya yang dilakukan dalam bidang sosial terbagi menjadi tiga tindakan yaitu menertibkan armada yang selalu parkir di bahu jalan supaya tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas,

melakukan pengawasan terhadap tim monitoring dan evaluasi (monev) dan menemukan kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban yang menyebabkan pihak Gerbang Nusa melaporkan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) perihal dugaan gagal konstruksi pembangunan turap dan perbaikan Jalan Pangkalan 1 Bantargebang. Selain itu, pengawasan terhadap adanya perputaran uang sehingga menimbulkan oknum yang tidak seharusnya menjadi keanggotaan tim monev dapat menjadi bagian dari tim monev. Upaya selanjutnya adalah melakukan pengawasan dalam permainan zonasi yang dilakukan oleh oknum guru dalam ranah pendidikan yang membuat masyarakat menjadi dirugikan dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ketiga, upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi yaitu, Gerbang Nusa mengupayakan dalam pemerataan uang kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat karena beberapa masyarakat belum terpenuhi akan haknya, terbukanya lapangan pekerjaan yang diberikan oleh Gerbang Nusa dalam membantu perekonomian masyarakat yang rendah. Pekerjaan yang diberikan ialah menjadi anggota team monev. Pekerjaan tersebut merupakan salah satu upaya yang dinilai paling selektif karena hanya masyarakat yang mengerti akan lingkungan mereka sendiri yaitu masyarakat yang bertempat tinggal disekitar TPST Bantargebang, selain itu masyarakat lainnya bekerja di lingkungan TPST dan PT yang terletak di wilayah TPST Bantargebang. Upaya selanjutnya adalah mengedukasi masyarakat yang belum paham akan pentingnya kemaslahatan hidup dalam jangka waktu panjang yaitu dengan diberikannya uang kompensasi berupa BLT oleh pemerintah tidak menutup kerugian yang dialami masyarakat dalam jangka waktu panjang.

3. Upaya yang dilakukan oleh Gerbang Nusa tentunya menghasilkan sebuah dampak yang dapat merubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Pertama, dampak dalam bidang sosial. Armada truk menjadi lebih tertib dan tidak ditemukan parkir di bahu jalan, sehingga mengurangi kemacetan, Badan Pengawas Keuangan (BPK) menanggapi laporan terkait dengan dugaan gagal konstruksi pembangunan turap dan perbaikan Jalan Pangkalan 1 Bantargebang oleh tim monev, dan pengurangan anggota tim monev yang tidak berkepentingan dan digantikan dengan masyarakat sekitar. Kedua, dampak dalam bidang ekonomi. Terjadinya pemerataan BLT yang didapatkan masyarakat sebagai pemenuh hak atas TPST Bantargebang, dibukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang menganggur sehingga saat ini

perekonomian masyarakat menjadi stabil, dan jalan pemikiran masyarakat menjadi terbuka karena diberikan edukasi oleh Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa). Ketiga, dampak dalam bidang lingkungan. Armada pengangkut sampah menjadi lebih tertib dan mengantri jika ingin memasuki Kawasan TPST Bantargebang, dan armada menjadi lebih disiplin dan menaati peraturan dalam mengangkut sampah dengan tidak mengangkut melebihi muatan truk.

B. Saran

1. Bagi pengurus Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa), hendaknya dapat lebih aktif dalam memperkenalkan Gerbang Nusa kepada masyarakat, sehingga masyarakat kedepannya bisa lebih mengandalkan atau memanfaatkan berbagai bantuan yang diberikan.
2. Bagi pengurus Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa) hendaknya bisa lebih maju dalam menggunakan teknologi dengan cara membuat website atau media sosial terkait dengan Gerbang Nusa, sehingga dapat membantu masyarakat lainnya yang ingin mencari tahu terkait dengan informasi masyarakat TPST Bantargebang.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian terkait dengan Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa), hendaknya dapat berfokus kepada permasalahan-permasalahan yang belum dibahas dalam penelitian ini, karena seiring berjalannya waktu tentu dapat terjadi permasalahan baru didalam masyarakat. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. N. (2018). *Ilmu dan Rekayasa Lingkungan* . Makassar: SAH MEDIA.
- Abdussamad, Z. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adam, M., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1988). *Social Movements*. Newbury Park: Sage Publication.
- Afifah, T., & dkk. (2020). Implikasi Ideologi Pancasila Pada Gerakan Sosial Islam dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional . *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2*, 183.
- Amin, A., & dkk. (2019). Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup dan Budaya di Sekolah Menengah Pertama. *IJSSE: Indonesian Journal of Social Science Education, 1 (1)*, 86.
- Amiruddin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aribowo. (2020). *Peta Teori Gerakan Sosial* . Surabaya: Airlangga University Press.
- Ariyansyah, R., & Masyhur. (2020). Identitas Agama dan Pola Gerakan Sosial (Studi Kasus Front Pembela Islam di Kota Palembang). *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization Vol. 1 No. 1*, 51.
- Asfianur, S. I., & dkk. (2022). Analisis Gerakan Sosial "Sangasanga Melawan" dalam Konservasi Lingkungan Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Vol. 8 No. 4*, 1021.
- Assidiqi, M. H., & Sumarni, W. (2020). Pemanfaatan Platform Digital di Masa Pandemi Covid-19. *In Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Vol. 3 No. 1*, 299.
- Aulia, N. (2020). Mobilisasi Masyarakat Bekasi di Bawah Pimpinan KH. Noer Alie dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950. *Doctoral Dissertation, Universitas Siliwangi*, 14-15.
- Campbell, & dkk. (1983). *Biologi*. Erlangga.
- Damayanti, Y. N., & dkk. (2023). Peningkatan Kreativitas Pengolahan Sampah dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Petak. *Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1*, 57.
- Edwards, G. (2014). *Social Movement and Protest*. UK: Cambridge University Press.
- Faliyandra, F. (2019). *TRI PUSAT KECERDASAN SOSIAL "Membangun Hubungan Baik Antar Manusia Pada Lingkungan Pendidikan di Era Teknologi*. Malang : Literasi Nusantara.
- Firmansyah, L., & dkk. (2023). Peran Masyarakat Akar Rumput dalam Menangani Permasalahan Sampah Galon Sekali Pakai. *Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 2*, 142.
- Geraldine, A., & dkk. (2021). Strategi Gerakan Sosial Baru dalam Kampanye Pengurangan Sampah Plastik di Bali. *E-Journal Politika*, 1-13.

- Giddens, A. (1993). *Sociology*. Oxford: Polity Press.
- Haris, A., & dkk. (2019). Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS) Vol. 1 No. 1*, 15-24.
- Harsasto, P. (2020). Membedah Diskursus Modal Sosial dan Gerakan Sosial : Kasus Penolakan Pabrik Semen di Desa Maitan, Kabupaten Pati . *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1*, 19.
- Hidayat, A. (2019). Dakwah Pada Masyarakat Pedesaan dalam Bingkai Psikologi dan Strategi Dakwah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol. 01, No. 02*, 181-182.
- Indrasari, Y. (2020). Efisiensi Saluran Distribusi Pemasaran Kopi Rakyat di Desa Gending Waluh Kecamatan Sempol (Ijen) Bondowoso. *Jurnal Manajemen Pemasaran Vol. 14 No. 1*, 45.
- Jayusman, I., & dkk. (2020). Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak Vol. 7 No.1* , 15.
- Klandermans, B. (2005). *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial (Terj. Helly P. Soetjipto)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Locher, D. (2002). *Collective Behavior* . New Jersey: Prentice Hall.
- Macionis, J. (1999). *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Manik. (2016). *Pengelolaan Lingkungan Hidup* . Jakarta: KENCANA.
- McCarthy, J. D. (n.d.). *Comparative Perspectives on Social Movement*.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *The American Journal of Sociology, Vol. 82, No. 6*, 1212-1241.
- Nainggolan, D. M., & E, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat* . Yogyakarta: Deepublish.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan Masyarakat* . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Nurdin, & dkk. (2018). *Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia*. Aceh: Unimal Press.
- Nurdin, A., & dkk. (2020). *Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia* . Madani Press.
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya . *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Volume 1, Issue 1*, 163-165.
- Purwaningsih, S. (2020). *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat* . Alprin .
- Qisti, D. A., & dkk. (2021). Analisis Aspek Lingkungan dan Perilaku Terhadap Kejadian Diare Pada Balita di Tanah Sareal. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2 No. 6*, 1662.
- Rizal, R. (2017). *Analisis Kualitas Lingkungan* . Jakarta: Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Saebani, B. A. (2012). *Pengantar Antropologi* . Bandung : CV Pustaka Setia .
- Sembel, D. T. (2015). *Toksikologi Lingkungan* . Yogyakarta: Andi Offset.

- Sidiq, U., & dkk. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.
- Sijatmiko, I. G. (2006). *Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat*. Jakarta: Pusaka LP3ES.
- Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resit Book.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta: Rajawali Press.
- Soemarwoto, O. (2008). *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan* . Jakarta : Djambatan .
- Syahbaini, S. (2013). *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syawaludin, M. (2017). *Sosiologi Perlawanan Studi Perlawanan Repertoar Petani di Rengas Ogan Illir Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tarrow, S. (1998). *Power In Movement: Social Movements and Contentious Politics*. United Kingdom : The Press Syndicate of The University of Cambridge.
- Triwibowo, D. (2006). *Gerakan Sosial (Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi)* . Salatiga: LP3ES.
- Wihardjo, S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup* . Pekalongan : Nasya Expanding Management .

LAMPIRAN



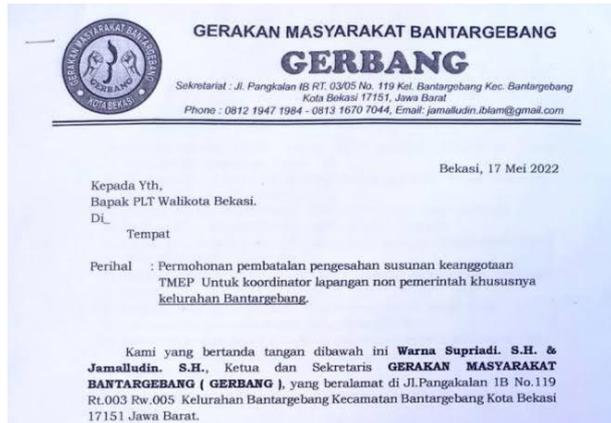
Lampiran 1. Wawancara dengan Bapak Roy Sihombing



Lampiran 2. Observasi ke TPST Bantargebang dengan DLH



Lampiran 3. Berkunjung ke Gerakan Masyarakat Bantargebang



Lampiran 4. Upaya dalam pembatalan pengesahan susunan keanggotaan TMEP



Lampiran 5. Pertemuan dengan kepala bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Amelia Aulia Rahma
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 08 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Indra, KP. Rawa Roko,
No.51 RT.01/RW.01,
Kecamatan Rawalumbu,
Kelurahan Bojong
Rawalumbu, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat.
No. Whatsapp : 085693527936
Email : ameliaauliarhma@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Ikhlas : Tahun 2006-2007
2. SDIT Baabut Taubah : Tahun 2007-2013
3. SMPIT Gameel Akhlaq : Tahun 2013-2016
4. MAN 2 Kota Bekasi : Tahun 2016-2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota UKM FORSHA FISIP UIN Walisongo Tahun 2020

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Agustus 2023



Amelia Aulia Rahma
NIM. 1906026011